BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG, SERTA CAPAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TRIWULAN II 2026

MEMPERKUAT RESPONS KEBIJAKAN, TRANSFORMASI, DAN SINERGI UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LEBIH TINGGI DAN BERDAYA TAHAN

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG, SERTA CAPAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Triwulan II 2026

Laporan Kelembagaan Bank Indonesia - Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia adalah laporan kinerja kelembagaan yang disusun sebagai pemenuhan kewajiban akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		iv
Ringkasan Eksekutif		viii
BAB 1	**Kelembagaan Bank Indonesia**	**1**
1.1.	Profil Bank Indonesia	2
1.2.	Dewan Gubernur Bank Indonesia	3
1.3.	Organisasi Bank Indonesia	12
1.4.	Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia	16
BAB 2	**Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia**	**21**
2.1.	Lingkungan Strategis Perekonomian Global dan Nasional	22
2.2.	Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan	25
BAB 3	**Respons Kebijakan Bank Indonesia**	**29**
3.1.	*Stance* Kebijakan Bank Indonesia	30
3.2.	Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia	31
BAB 4	**Transformasi Bank Indonesia**	**35**
4.1.	Transformasi Kebijakan	36
Boks 1	Penguatan Sinergi *Supply dan Demand* kredit melalui PINISI	40
4.2.	Transformasi Kelembagaan	49
BAB 5	**Capaian Kinerja Bank Indonesia**	**55**
PS 01	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	56

Boks 2.	Bank Indonesia Terus Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah di Tengah Volatilitas Global	58
PS 02	Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektor riil Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	59
Boks 3.	Memperkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS)	60
PS 03	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	61
PS 04	Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	63
PS 05	Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta pelindungan konsumen, untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	65
Boks 4.	*Launching* QRIS Antarnegara Indonesia-Korea Selatan	66
Boks 5.	Penguatan ekosistem inovasi digital nasional melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia	67
PS 06	Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran, serta pelindungan konsumen antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	70
Boks 6.	Pemusnahan kertas uang Rupiah palsu di Bank Indonesia	71
PS 07	Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi.	75
Boks 7.	Sosialisasi Penerbitan *Market Code of Conduct* (MCoC) Edisi V untuk Perkuat Integritas Pasar Keuangan	76
PS 08	Merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah serta memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	77
PS 09	Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional	80
Boks 8.	Posisi Bank Indonesia dalam Merespons Ketidakpastian Ekonomi Global pada IMF Spring Meetings 2026	83
PS 10	Merumuskan dan implementasi bauran kebijakan kelembagaan, serta dukungan organisasi, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional.	85
PS 11	Merumuskan dan implementasi landasan hukum, manajemen risiko, audit internal, dan komunikasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional.	86
PS 12	Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional.	88

Lampiran **91**

Daftar Istilah 92

Daftar Singkatan 98

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Bank Indonesia dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia periode triwulan II 2026. Sebagai bagian dari Laporan Kelembagaan Bank Indonesia, laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Laporan ini disusun sebagai perwujudan dari komitmen Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral yang kredibel dalam mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan taat asas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi perekonomian global pada triwulan II 2026 menghadapi tekanan yang semakin berat di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan dunia. Meskipun ketidakpastian global sempat mereda setelah tercapainya *interim deal* antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada pertengahan Juni 2026, reeskalasi konflik pada awal Juli 2026 kembali meningkatkan risiko global. Perkembangan tersebut semakin menekan prospek pertumbuhan ekonomi dunia di tengah tekanan inflasi yang masih tinggi. Kebijakan moneter sejumlah bank sentral cenderung lebih ketat, sementara suku bunga kebijakan moneter AS dan imbal hasil aset keuangan AS tetap berada pada level tinggi. Kondisi ini memperkuat preferensi investor global terhadap aset aman (*safe-haven assets*), sehingga aliran modal ke negara berkembang tetap terbatas serta menopang penguatan dolar AS terhadap mata uang negara maju maupun negara berkembang.

Dinamika tersebut mencerminkan masih tingginya tantangan yang dihadapi perekonomian global dan menjadi faktor penting yang perlu terus diantisipasi dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mempertahankan momentum pertumbuhan. Kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,29% (yoy), melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,61% (yoy), yang ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh seiring momentum libur sekolah dan berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta dukungan kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia. Ketahanan eksternal perekonomian tetap terjaga meskipun dinamika pasar keuangan global masih memberikan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran, sementara sektor keuangan menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan kredit yang tetap positif dan stabilitas sistem keuangan yang terpelihara. Sejalan dengan itu, transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia yang konsisten dalam menjaga stabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Merespons tantangan perekonomian global dan domestik yang semakin berat, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 100 bps pada triwulan II 2026 menjadi 5,75% dan mempertahankannya pada bulan Juli 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk semakin memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah *preemptive* untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah. Bank Indonesia juga memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain guna meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA), serta meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan. Keputusan BI-Rate dan kebijakan lain dimaksud merupakan bagian terintegrasi dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global (*"pro-stability"*).

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (*"pro-growth"*). Kebijakan makroprudensial akomodatif terus ditempuh untuk memperkuat fungsi intermediasi perbankan, meningkatkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui percepatan digitalisasi sistem pembayaran, peningkatan efisiensi transaksi ekonomi dan keuangan, serta penguatan

integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional. Seluruh respons bauran kebijakan tersebut didukung oleh sinergi yang erat dengan Pemerintah, KSSK, dan mitra kerja lainnya, serta diperkuat melalui kerja sama internasional di area kebanksentralan, konektivitas sistem pembayaran, dan penggunaan mata uang lokal guna menjaga stabilitas makroekonomi kawasan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Transformasi kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia mengembangkan kerangka kerja *macrofinancial linkages* yang mengintegrasikan kebijakan moneter dan makroprudensial dalam pengelolaan likuiditas guna memperkuat efektivitas transmisi suku bunga dan kredit. Transformasi kebijakan juga terus ditempuh melalui implementasi Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) yang melengkapi instrumen kebijakan makroprudensial dari sisi penawaran (*supply*) melalui penguatan sisi permintaan (*demand*), sehingga efektivitas transmisi kebijakan dalam mendorong kredit dan pembiayaan menjadi lebih optimal.

Transformasi juga dilanjutkan pada sistem pembayaran melalui modernisasi infrastruktur dan penguatan konektivitas pembayaran lintas negara, serta transformasi pada pendalaman pasar keuangan melalui pengembangan infrastruktur PUVA. Pemanfaatan teknologi dan data dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan juga terus diperkuat melalui pengembangan berbagai *use case artificial intelligence* (AI), integrasi data dan metadata, serta digitalisasi proses bisnis untuk mendukung analisis dan perumusan kebijakan yang semakin cepat, terintegrasi, dan *forward-looking*.

Transformasi di area kelembagaan diarahkan pada penguatan tata kelola, penyederhanaan proses kerja, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang didukung oleh penguatan ekosistem *Integrated Digital Central Bank* (IDCB) dan pemanfaatan teknologi digital secara lebih terintegrasi. Berbagai transformasi tersebut diharapkan semakin memperkuat kapasitas Bank Indonesia yang adaptif, tangguh, dan profesional dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

Di tengah tantangan lingkungan strategis yang semakin berat, Bank Indonesia dapat mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan II 2026 sesuai tahapannya. Capaian ini didukung oleh efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, serta penajaman sejumlah inisiatif transformasi di area kebijakan maupun kelembagaan. Penerapan kebijakan yang konsisten dan bertata kelola, inovasi yang berkelanjutan, serta eratnya sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan turut memperkuat persepsi positif terhadap Bank Indonesia, yang tecermin pada berbagai pengakuan di tingkat internasional.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas mulia dalam menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami berharap Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia periode triwulan II 2026 ini dapat menjadi rujukan terpercaya bagi masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam menyusun langkah bersama untuk memajukan perekonomian Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan keberkahan, kesempurnaan, dan kemudahan bagi setiap langkah kita untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional.

Jakarta, September 2026

Gubernur Bank Indonesia

Destry Damayanti

THOMAS A. M. DJIWANDONO
Deputi Gubernur

FILIANINGSIH HENDARTA
Deputi Gubernur

DESTRY DAMAYANTI
Gubernur

AIDA S. BUDIMAN
Deputi Gubernur Senior

RICKY P. GOZALI
Deputi Gubernur

SOLIKIN M. JUHRO
Deputi Gubernur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia

Perekonomian global pada triwulan II 2026 menghadapi tekanan yang semakin berat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan dunia. Meskipun ketidakpastian global sempat mereda setelah tercapainya *interim deal* antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada pertengahan Juni 2026, reeskalasi konflik pada awal Juli 2026 kembali meningkatkan risiko global. Perkembangan tersebut semakin menekan prospek pertumbuhan ekonomi dunia di tengah tekanan inflasi yang masih tinggi, sehingga mendorong kebijakan moneter global yang cenderung lebih ketat.

Di pasar keuangan global, prospek suku bunga kebijakan AS yang tetap tinggi seiring tekanan inflasi, tingginya imbal hasil aset keuangan AS, serta berlanjutnya ketidakpastian geopolitik memperkuat preferensi investor terhadap aset aman (*safe-haven assets*). Dinamika tersebut membatasi aliran modal ke negara berkembang, mendorong penguatan indeks dolar AS terhadap negara maju dan negara berkembang, serta menyebabkan tekanan di pasar keuangan global tetap tinggi. Pandangan berbagai lembaga internasional dan otoritas global seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, Bank of England (BOE), European Central Bank (ECB), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta JP Morgan mengonfirmasi bahwa kondisi perekonomian global pada triwulan II 2026 semakin berat akibat meningkatnya ketidakpastian yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tekanan inflasi, serta memperbesar volatilitas pasar keuangan dan risiko stabilitas keuangan.

Di tengah kondisi global yang semakin berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tetap baik, meski turut menghadapi tekanan eksternal yang meningkat. Kondisi tersebut menuntut penguatan respons bauran kebijakan dan sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Lembaga nasional dan internasional turut mengakui ketahanan perekonomian Indonesia, meskipun tekanan terhadap prospek pertumbuhan, nilai tukar, inflasi, serta ruang kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi diperkirakan tetap tinggi seiring pelemahan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Di tengah beratnya tantangan perekonomian tersebut, perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 tetap tumbuh baik. Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,29% (yoy), melanjutkan pertumbuhan sebesar 5,61% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat seiring momentum libur sekolah dan berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), meningkatnya konsumsi Pemerintah, termasuk realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), investasi yang meningkat sejalan dengan realisasi penanaman modal, serta ekspor yang tetap tumbuh didukung oleh permintaan mitra dagang utama. Ketahanan eksternal perekonomian tetap terjaga, tecermin dari cadangan devisa yang tetap kuat sebesar 145,3 miliar dolar AS, meskipun kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat di tengah defisit neraca perdagangan migas dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, seiring upaya Bank Indonesia untuk terus memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. Inflasi IHK tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah, didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dan sinergi pengendalian inflasi bersama Pemerintah. Intermediasi perbankan dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, tecermin dari pertumbuhan kredit yang meningkat, permodalan dan likuiditas perbankan yang tetap kuat, serta risiko kredit yang rendah. Di sisi lain, transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal untuk menopang aktivitas ekonomi.

Selain dinamika perekonomian global dan domestik, pada triwulan II 2026 Bank Indonesia juga mencermati perubahan lingkungan strategis yang semakin kompleks yang memerlukan penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan. Perubahan tersebut terutama bersumber

dari penguatan mandat Bank Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, pergeseran lanskap ekonomi dan keuangan global, akselerasi inovasi keuangan digital, serta pesatnya perkembangan teknologi. Pada saat yang sama, kebutuhan sumber daya manusia dengan keahlian yang semakin spesifik dan tuntutan efisiensi anggaran juga meningkat. Berbagai perkembangan tersebut menghadirkan peluang untuk memperkuat peran Bank Indonesia, sekaligus menuntut respons kebijakan dan transformasi kelembagaan yang semakin terintegrasi, adaptif, dan akuntabel. Berbagai lembaga, termasuk pengamat ekonomi, mengonfirmasi bahwa meningkatnya ketidakpastian global tidak hanya memperberat tantangan perekonomian, tetapi juga meningkatkan kompleksitas kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia, terutama dalam implementasi amandemen UU P2SK, penguatan efektivitas transmisi kebijakan, serta respons terhadap perkembangan teknologi.

Respons Kebijakan Bank Indonesia

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang menghadirkan tantangan perekonomian domestik yang berat pada triwulan II 2026, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional dan program Asta Cita Pemerintah. Kebijakan moneter difokuskan pada penguatan stabilitas nilai tukar Rupiah dan ketahanan eksternal ("*pro-stability*") melalui kenaikan BI-Rate sebesar 100 bps menjadi 5,75%, penguatan intensitas intervensi di pasar valuta asing, penyesuaian tingkat struktur suku bunga instrumen moneter, peningkatan daya tarik instrumen keuangan domestik bagi investasi portofolio asing, serta percepatan pendalaman PUVA untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan dan menjaga kecukupan likuiditas.

Kebijakan makroprudensial akomodatif terus ditempuh untuk memperkuat fungsi intermediasi perbankan, meningkatkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui percepatan digitalisasi sistem pembayaran, peningkatan efisiensi transaksi ekonomi dan keuangan, serta penguatan integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional. Keseluruhan bauran kebijakan tersebut didukung oleh sinergi yang erat dengan Pemerintah, KSSK, dan mitra kerja lainnya, serta diperkuat melalui kerja sama internasional di bidang kebanksentralan, konektivitas sistem pembayaran, penggunaan mata uang lokal, dan fasilitasi investasi serta perdagangan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Transformasi Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat transformasi kebijakan dan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan di tengah dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks. Di area kebijakan, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan kerangka kerja *macrofinancial linkages* yang mengintegrasikan kebijakan moneter dan makroprudensial dalam pengelolaan likuiditas guna memperkuat efektivitas transmisi kebijakan. Bank Indonesia juga mengembangkan kerangka transmisi kebijakan melalui sektor perbankan dan lembaga keuangan nonbank (IKNB), termasuk pemetaan kanal transmisi dan penguatan peran sektor keuangan dalam mendukung intermediasi serta penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor riil. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan, memperkuat intermediasi, serta mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat fungsi koordinasi dan komunikasi kebijakan melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) guna mempercepat transmisi kebijakan di sisi *demand*, termasuk membangun optimisme pelaku usaha dan investor. Program tersebut juga diarahkan untuk menyelaraskan berbagai program

dan sinergi antarpemangku kepentingan, di antaranya Kementerian/Lembaga, Otoritas, dan Industri (KLOI) untuk mengidentifikasi serta memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan intermediasi.

Transformasi sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan terus dilanjutkan. Transformasi sistem pembayaran dilanjutkan melalui pengembangan New BI-FAST, modernisasi BI-RTGS dan BI-SSSS, penguatan konektivitas pembayaran lintas negara, serta pendalaman *Wholesale Securities Ledger* sebagai bagian dari pengembangan Rupiah Digital. Transformasi juga dilakukan untuk memperkuat proses bisnis dan proses kerja perumusan dan pelaksanaan baruan kebijakan melalui integrasi data dan pengembangan AI dalam proses analisis dan perumusan kebijakan, antara lain *nowcasting*, *sentiment analysis*, dan pengembangan berbagai *use case* berbasis data untuk menghasilkan asesmen yang lebih cepat, granular, dan *forward-looking*. Transformasi juga dilakukan untuk memperkuat infrastruktur PUVA melalui pengembangan BI-ETP untuk mendukung penerbitan SVBI/SUVBI dan transaksi repo valas, serta pengembangan infrastruktur data untuk meningkatkan transparansi harga dan *price discovery*. Berbagai inisiatif tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperdalam pasar keuangan, dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan.

Di area kelembagaan, transformasi difokuskan pada penguatan tata kelola, penyederhanaan proses kerja, kualitas SDM, dan digitalisasi kelembagaan. Implementasi Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK) diperkuat melalui penyederhanaan, standardisasi, dan digitalisasi proses bisnis, termasuk pengembangan *platform* kerja digital untuk mendukung evaluasi dan pengendalian kinerja, serta pengambilan keputusan secara *end-to-end*, yang didukung oleh integrasi data dan pemanfaatan AI. Penguatan SDM difokuskan pada pengembangan kompetensi pegawai *officer* maupun *non-officer*, antara lain melalui penataan dan penyesuaian struktur program pengembangan kepemimpinan kebanksentralan bagi pegawai potensial agar selaras dengan kebutuhan organisasi, serta pengembangan kurikulum pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas digital dan AI. Transformasi digital juga dilakukan di area kelembagaan melalui pengembangan infrastruktur teknologi digital, antara lain untuk mendukung pemanfaatan AI, *cloud computing*, serta peningkatan keamanan informasi dan manajemen risiko.

Capaian Kinerja Bank Indonesia

Di tengah semakin beratnya tantangan lingkungan strategis global, nasional, dan kelembagaan, Bank Indonesia berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan II 2026 sesuai tahapan yang sudah direncanakan. Capaian ini menegaskan efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam merespons dinamika ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh inovasi dan transformasi berkelanjutan, baik di area kebijakan maupun kelembagaan, termasuk penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional. Sinergi erat yang terus dilakukan oleh Bank Indonesia sepanjang triwulan II 2026, baik dengan Pemerintah maupun mitra kerja strategis lainnya, turut memperkuat persepsi positif terhadap kebijakan Bank Indonesia dan perekonomian Indonesia, termasuk pengakuan dari lembaga internasional.

Komplek Perkantoran Bank Indonesia (Koperbi) Jakarta

BAB 1

KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

1.1. Profil Bank Indonesia

Status dan Kedudukan

Keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Republik Indonesia diamanatkan dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Amanat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999 (UU Bank Indonesia), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlaku sejak 17 Juni 2026. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dalam UU Bank Indonesia tersebut.

Dalam menjalankan independensinya, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan profesional sebagaimana diamanatkan undang-undang. Sebagai perwujudan dari tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, Bank Indonesia mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) selama 23 tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Hal ini merupakan bukti komitmen Bank Indonesia untuk mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menyampaikan laporan kinerja kelembagaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden, serta memublikasikannya kepada masyarakat.

Visi

"Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan dengan Tata Kelola Kuat, yang Berkontribusi Nyata terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju."

Misi

01 Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

02 Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

03 Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

04 Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional.

05 Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing (valas), termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.

06 Turut meningkatkan inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta pelindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Bank Indonesia.

07 Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Tujuan dan Tugas

Tujuan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK adalah mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut ditempuh secara terintegrasi melalui bauran kebijakan Bank Indonesia, yang didukung oleh pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi-keuangan inklusif termasuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, kebijakan internasional, serta sinergi yang erat dengan Pemerintah, KSSK, dan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan tugas di bidang moneter, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai Rupiah yang mencakup kestabilan harga barang dan jasa, serta kestabilan nilai tukar Rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar Rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Stabilitas nilai Rupiah merupakan prasyarat penting bagi terciptanya kepastian ekonomi, terjaganya daya beli masyarakat, serta tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang transparan dan *forward looking*, didukung oleh strategi operasi moneter *pro-market*, pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta penguatan koordinasi kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional.

Dalam menjalankan tugas di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia memastikan terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Bank Indonesia juga menjaga ketersediaan uang Rupiah yang cukup dan layak edar di seluruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan pesatnya digitalisasi ekonomi dan keuangan, Bank Indonesia terus memperkuat transformasi sistem pembayaran melalui implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, pengembangan infrastruktur pembayaran yang saling terhubung, terintegrasi, dan interoperabel, perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan struktur industri sistem pembayaran. Bank Indonesia juga terus mendorong inovasi, konektivitas pembayaran lintas negara, dan pengembangan Rupiah Digital untuk memastikan kedaulatan Rupiah tetap terjaga di era digital sekaligus mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Dalam melaksanakan tugas di bidang makroprudensial, Bank Indonesia turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta keuangan berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial ditempuh melalui pengelolaan siklus keuangan, penguatan ketahanan sistem keuangan, dan dukungan terhadap penyaluran kredit/pembiayaan bagi perekonomian. Sejalan dengan perkembangan sistem keuangan yang semakin dinamis dan kompleks, Bank Indonesia terus menyempurnakan kerangka dan instrumen kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia bersama kebijakan moneter dan sistem pembayaran untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.2. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas: Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan 4 (empat) hingga 7 (tujuh) Deputi Gubernur. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Gubernur menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis. Dalam kaitan ini, RDG dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Setiap anggota Dewan Gubernur mempunyai hak suara yang sama. Pengambilan keputusan oleh Dewan Gubernur di dalam RDG dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menerapkan prinsip kolektif kolegial. Keputusan Dewan Gubernur dalam RDG merupakan keputusan Bank Indonesia dan mengikat seluruh anggota Dewan Gubernur.

Saat ini Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan 4 (empat) Deputi Gubernur dengan profil sebagai berikut:

Destry Damayanti
Gubernur

Menjabat mulai 2 September 2026

DESTRY DAMAYANTI ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026–2031 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 1 September 2026 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 2 September 2026. Sebelumnya, dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026, Destry Damayanti ditunjuk sebagai Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia untuk menjalankan tugas Gubernur sampai dengan ditetapkannya Gubernur Bank Indonesia.

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti mengemban posisi sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2019–2024 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 dan kembali dipercaya untuk periode 2024–2029 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan pengucapan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2024.

Pada 2015-2019, Destry Damayanti merupakan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2019–2024, Destry Damayanti juga dipercaya sebagai Anggota Dewan Komisioner (*ex officio* Bank Indonesia) sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Destry Damayanti mengawali karier sebagai Peneliti dan Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada tahun 1987–1990 serta Asisten Peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID) pada 1988. Kariernya berlanjut di Kementerian Keuangan selama periode 1992-1997 dan Citibank pada 1997–2000, serta menjadi *Senior Economic Advisor* Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2000–2003. Kariernya sebagai ekonom berlanjut sebagai Kepala Ekonom di Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri selama periode 2005–2015, sekaligus sebagai Direktur Eksekutif Mandiri Institute.

Di samping pengalaman profesional tersebut, Destry Damayanti dipercaya sebagai Ketua *Task Force* Ketahanan Ekonomi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2014–2015. Selanjutnya, pada tahun 2015, Presiden Republik Indonesia menunjuk Destry Damayanti sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019. Destry Damayanti juga pernah menjadi Ketua ILUNI FEB UI periode 2019–2021 dan Ketua Umum Paguyuban MASTRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) sejak tahun 2015 sampai saat ini.

Destry Damayanti lahir di Jakarta pada tahun 1963. Gelar Sarjana Ekonomi diraihnya dari Universitas Indonesia dan gelar Master of Science pada *Field of Regional Science* diraihnya dari Cornell University, New York, AS, pada tahun 1992.

Perry Warjiyo

Menjabat Gubernur Bank Indonesia
sampai dengan 25 Juli 2026

PERRY WARJIYO menjabat kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk masa jabatan 2023–2028 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 24 Mei 2023. Masa jabatan tersebut berakhir pada 25 Juli 2026, menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya, Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018–2023 dan sebagai Deputi Gubernur untuk masa jabatan 2013–2018. Sepanjang lebih dari satu dekade pengabdiannya di jajaran pimpinan Bank Indonesia, Perry Warjiyo memimpin Bank Indonesia dengan kebijakan yang kuat, antisipatif dan kredibel untuk menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan, dan mengakselerasi transformasi digital.

Sebelum menduduki jabatan Deputi Gubernur, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional. Jabatan ini diembannya setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia sejak 2009. Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada Juli 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam the South-East Asia Voting Group (SEAVG), yang berkedudukan di Washington, D.C., AS. Perry Warjiyo mempunyai karier yang panjang di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa, dan utang luar negeri.

Perry Warjiyo pada periode laporan menduduki posisi sebagai *Chairman of Executive Committee* (EC) – Islamic Financial Services Board (IFSB), Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (KAFEGAMA). Selain itu, Perry Warjiyo juga berperan sebagai *chair* di Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP) Governor's Meeting (BOG) dan SEACEN Board of Governors' (BOG) Meeting, sebagai Governor of the fund IMF, serta sebagai Alternate Governor Islamic Development Bank (IsDB) dan World Bank MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency). Perry Warjiyo juga mewakili Bank Indonesia dan Indonesia dalam The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Central Bank Governors' Meeting (ACGM) dan ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM), ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM+3), G20 dalam Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) *Meeting*, Bank for International Settlements (BIS) Bimonthly Meeting, Financial Stability Board (FSB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Islamic International Liquidity Management (IILM). Pada periode 2018-2023, Perry Warjiyo aktif menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, di samping sebagai dosen tamu pada sejumlah universitas di dalam dan luar negeri.

Perry Warjiyo dilahirkan di Sukoharjo pada tahun 1959. Gelar Sarjana diraih dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1982. Gelar Master dan PhD di bidang Moneter dan Keuangan Internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada tahun 1989 dan 1991.

Aida S. Budiman
Deputi Gubernur Senior

Menjabat mulai 2 September 2026

AIDA S. BUDIMAN diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2026–2031 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2026 tanggal 1 September 2026 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 2 September 2026. Sebelum mengemban amanah tersebut, Aida S. Budiman menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 2022–2026. Pengangkatannya sebagai Deputi Gubernur ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021. Penunjukannya sebagai Deputi Gubernur Senior menandai kelanjutan pengabdiannya dalam memperkuat perumusan dan pelaksanaan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Aida S. Budiman memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1991 dan selama perjalanan kariernya telah memiliki pengalaman yang luas melalui berbagai penugasan, termasuk sebagai Wakil Direktur Eksekutif untuk South East Asia Voting Group (SEAVG) *office* di International Monetary Fund (IMF). Sebelum terpilih menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menjabat sebagai Kepala Departemen Internasional (DInt) dari tahun 2014–2018, dan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) pada tahun 2018, sekaligus sebagai Asisten Gubernur yang bertugas mengoordinir kebijakan strategis sektor moneter, bauran kebijakan Bank Indonesia, dan sinerginya dengan kebijakan nasional dalam kurun waktu tahun 2020–2022. Di bawah kepemimpinannya di DKEM, Aida S. Budiman memainkan peran kunci dalam merumuskan penguatan Kerangka Bauran Kebijakan Bank Indonesia, mengembangkan sektor prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta memperkuat peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat regional dan nasional.

Sebagai seorang ekonom, Aida S. Budiman telah menerbitkan sejumlah artikel dalam bidang moneter, keuangan, dan perbankan di berbagai jurnal internasional, termasuk di antaranya The Falsification of Four Popular Hypotheses about the Asian Crisis, Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global. Selain itu, Aida S. Budiman aktif sebagai pembicara dalam berbagai forum dan seminar baik di tingkat nasional maupun internasional, serta pernah memberikan berbagai kuliah umum di Perguruan Tinggi. Aida S. Budiman juga telah menjadi pengajar dalam berbagai diklat internal Bank Indonesia dan Sekolah Staf dan Komando TNI serta menjadi dosen pengajar di Program Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Saat ini, Aida S. Budiman menjabat sebagai Ketua Bidang II Perumusan Kebijakan di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Aida S. Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menyelesaikan pendidikan pada bidang Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Aida S. Budiman melanjutkan pendidikan di University of Southern California dan meraih gelar Master di bidang Ekonomi pada tahun 1996. Aida S. Budiman kemudian melanjutkan pendidikan di Claremont Graduate University dan mendapat gelar PhD di bidang Ekonomi pada tahun 2001.

Filianingsih Hendarta
Deputi Gubernur

FILIANINGSIH HENDARTA ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 18 April 2023 untuk masa jabatan 2023–2028.

Filianingsih Hendarta memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1986. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur, Filianingsih Hendarta menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi kebijakan strategis di sektor sistem pembayaran sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019–2023). Sebelumnya, Filianingsih Hendarta memimpin Departemen Kebijakan Makroprudensial (2015–2019) dan Departemen Pengelolaan Moneter (2013–2015).

Sepanjang kariernya, Filianingsih Hendarta memimpin berbagai proyek berskala nasional dan internasional. Filianingsih merupakan figur kunci dalam peluncuran Proyek Garuda yang mengawali eksplorasi desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Rupiah Digital. Filianingsih Hendarta juga memimpin implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang diarahkan untuk mempercepat transformasi dan integrasi ekonomi serta keuangan digital guna meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Dengan pengalaman lebih dari 36 tahun di hampir seluruh sektor di Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta dipercaya untuk terlibat dalam berbagai forum strategis lintas Kementerian/Lembaga di tingkat domestik maupun internasional. Di dalam negeri, Filianingsih Hendarta berperan dalam berbagai forum, antara lain Penyusunan Regulasi dan Kelembagaan Sektor Keuangan, Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital dan Elektronifikasi Lintas Kementerian/Lembaga, serta berbagai komite internal Bank Indonesia. Di kancah internasional, Filianingsih Hendarta acapkali mewakili Bank Indonesia dalam berbagai fora, seperti G20, Bank for International Settlements (BIS), FSB, IMF, World Bank, ECB, dan Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP).

Filianingsih Hendarta lahir di Surabaya pada tahun 1963. Setelah menempuh pendidikan pada bidang hukum di Universitas Airlangga, Filianingsih Hendarta melanjutkan pendidikan di Boston University dan mendapatkan gelar *Master of Business Administration (Economics and Finance)* pada tahun 1992. Filianingsih Hendarta juga pernah aktif terlibat sebagai pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) *Focus Group* Moneter dan Makroprudensial pada tahun 2018 – 2021. Saat ini, Filianingsih Hendarta menjabat sebagai Wakil Ketua 1 – Dewan Kehormatan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga periode tahun 2021–2025.

RICKY P. GOZALI menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68/P Tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.

Ricky P. Gozali memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1995 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Dalam perjalanan kariernya selama lebih dari dua dekade, Ricky P. Gozali banyak terlibat dalam pengelolaan portofolio cadangan devisa negara, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, Ricky P. Gozali juga pernah ditugaskan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York selama empat tahun (2004–2008) dan menjadi *Chief Dealer* di pasar valuta asing. Pengalaman tersebut melengkapi pemahamannya atas dinamika pasar keuangan global secara menyeluruh.

Setelah kembali ke tanah air, Ricky P. Gozali melanjutkan penugasan strategis di Departemen Pengelolaan Devisa sebagai Kepala Divisi Manajemen Valuta Asing, Kepala Divisi Analisa Pasar Internasional, serta di Departemen Internasional sebagai Kepala Grup Hubungan Internasional dan Kepala Grup Kebijakan Internasional. Karier Ricky P. Gozali termasuk memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia di sejumlah provinsi, seperti Gorontalo (2018–2019), Kalimantan Timur (2022–2023), Sumatera Selatan (2023–2025), dan terakhir di Provinsi DKI Jakarta (2025). Dalam kapasitas ini, Ricky P. Gozali berperan aktif dalam mendorong pengembangan UMKM, ekonomi syariah, digitalisasi sistem pembayaran, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Ricky P. Gozali juga berpengalaman di bidang keorganisasian dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) periode 2020–2023, serta mengoordinasikan pelaksanaan *event* Presidensi G20 Sektor Keuangan.

Ricky P. Gozali lahir di Jakarta pada tahun 1970. Setelah menempuh pendidikan di bidang Manajemen Universitas Pancasila, Ricky P. Gozali melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia pada tahun 2011. Ricky P. Gozali juga mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia–SESPIBI (2019) serta beragam program pengembangan kompetensi dan kepemimpinan strategis di berbagai lembaga internasional, seperti *Strategic Leadership Program* di London Premier Center Spanyol (2024), Columbia University (2023), dan Bayes Business School London (2022). Selain itu, Ricky P. Gozali juga aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi kebanksentralan dan pasar keuangan baik di dalam maupun di luar negeri.

THOMAS A.M. DJIWANDONO menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/P Tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 9 Februari 2026 untuk masa jabatan 2026–2031.

Thomas memulai karier sebagai jurnalis sebelum beralih ke sektor keuangan dan bisnis. Dalam perjalanan kariernya, Thomas memiliki pengalaman yang luas di berbagai bidang, mulai dari analis keuangan, konsultan, hingga manajemen perusahaan, serta pernah menduduki berbagai posisi strategis di sektor swasta, baik di dalam maupun luar negeri. Pengalaman tersebut membentuk pemahamannya terhadap dinamika dunia usaha, pasar keuangan, dan investasi.

Pada Juli 2024, Thomas dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia dan kembali dipercaya menduduki jabatan tersebut pada Oktober 2024. Dalam kapasitas tersebut, Thomas terlibat dalam berbagai agenda strategis kebijakan fiskal dan sektor keuangan keuangan, pembiayaan fiskal, pendalaman pasar keuangan, serta penguatan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selama menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Thomas juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK *ex officio* dari Kementerian Keuangan periode 2025–2026. Pasca dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas kembali dipercaya untuk menjabat Anggota Dewan Komisioner OJK *ex officio* dari Bank Indonesia sejak 17 Maret 2026.

Dalam perannya sebagai Deputi Gubernur, pengalaman Thomas di sektor swasta, kebijakan fiskal, dan sektor keuangan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, khususnya dalam pendalaman pasar keuangan, hubungan internasional, dan stabilitas sistem keuangan.

Thomas A.M. Djiwandono lahir di Jakarta pada Mei 1972. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Studi Sejarah di Haverford College, Amerika Serikat, pada tahun 1994, serta meraih gelar Master di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat, pada tahun 2003.

SOLIKIN M. JUHRO diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026–2031 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2026 tanggal 1 September 2026 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 2 September 2026.

Solikin M. Juhro memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1994. Sebelum mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M. Juhro menjabat sebagai Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial, dengan tanggung jawab di bidang stabilitas sistem keuangan dan transformasi digitalisasi perumusan bauran kebijakan Bank Indonesia, periode 2023-2026. Sebelumnya, Solikin dipercaya memimpin Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter pada 2022–2023, setelah menjabat sebagai Direktur Eksekutif/Kepala Bank Indonesia Institute selama periode 2016–2021.

Sepanjang lebih dari tiga dekade perjalanan kariernya, Solikin banyak terlibat dalam pengembangan kerangka kebijakan bank sentral yang responsif terhadap perubahan struktur perekonomian dan sistem keuangan. Ia menjadi bagian dari perwakilan Bank Indonesia dalam forum G20, Financial Stability Board (FSB), serta Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP), dan menjadi narasumber dalam berbagai forum ekonomi, akademik, dan kebanksentralan di dalam maupun luar negeri.

Selain di Bank Indonesia, Solikin juga aktif dalam kegiatan profesional dan pengembangan pemikiran kebijakan ekonomi. Sejak tahun 2005, ia aktif sebagai pengajar maupun pembimbing pada sejumlah program pascasarjana, serta telah mempublikasikan berbagai karya akademik secara internasional dalam bentuk artikel jurnal dan buku pada area kebijakan bank sentral, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, transformasi ekonomi, dan ekonomi keberlanjutan. Sejumlah karya akademiknya turut menjadi referensi dalam pengembangan literatur kebanksentralan, termasuk "*Central Bank Policy: Theory and Practice*" dan"*Central Bank Policy Mix*", yang membahas perkembangan teori dan praktik kebijakan bank sentral serta kerangka bauran kebijakan. Saat ini, Solikin M. Juhro juga menjabat sebagai Sekretaris Umum di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Solikin M. Juhro lahir di Surabaya pada tahun 1967. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Airlangga pada tahun 1991. Meraih gelar Master in Applied Economics dari University of Michigan, Amerika Serikat pada tahun 1998 dan Master of Arts in Economics dengan spesialisasi Macroeconomics dari University of Maryland, Amerika Serikat pada tahun 2001. Solikin kemudian memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2005, dengan spesialisasi Ekonomi Moneter dan Ekonomi Makro.

1.3. Organisasi Bank Indonesia

Struktur Organisasi Bank Indonesia

Per September 2026

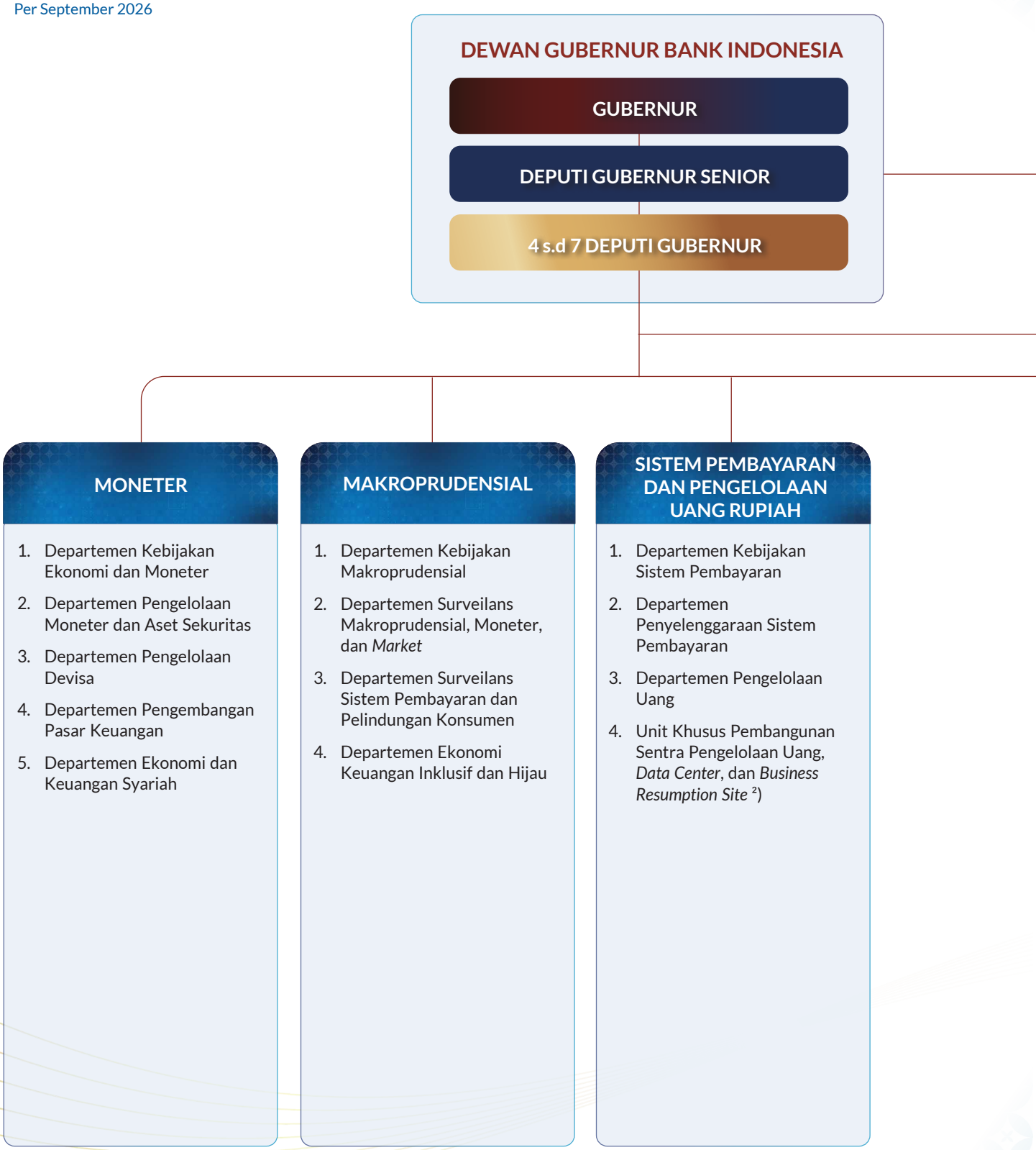

Keterangan:
[1]) Komite adalah organ pendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melakukan perumusan rekomendasi kebijakan prinsipil dan strategis yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur
[2]) Satuan Kerja khusus yang bersifat sementara

Komite[1)]

Staf Ahli Dewan Gubernur

PENDUKUNG KEBIJAKAN

1. Departemen Internasional
2. Departemen Statistik
3. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
4. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
5. Departemen Manajemen Risiko
6. Departemen Komunikasi

PENDUKUNG ORGANISASI

1. Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola
2. Departemen Hukum
3. Departemen Sumber Daya Manusia
4. Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital
5. Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data
6. Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber
7. Departemen Keuangan
8. Departemen Manajemen dan Advisory Pengadaan
9. Departemen Audit Intern
10. Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran
11. Departemen Pengelolaan Aset Perumahan dan Non-Perkantoran
12. Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas
13. Institut Bank Indonesia

JARINGAN KANTOR

Dalam Negeri

1. Departemen Regional (berkedudukan di Kantor Pusat)
2. Kantor Koordinator dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi sebanyak 5
3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi sebanyak 29
4. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota/ Kabupaten sebanyak 12

Luar Negeri

1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York
2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia London
3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tokyo
4. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Singapura
5. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Beijing

Sebaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI)

Per September 2026

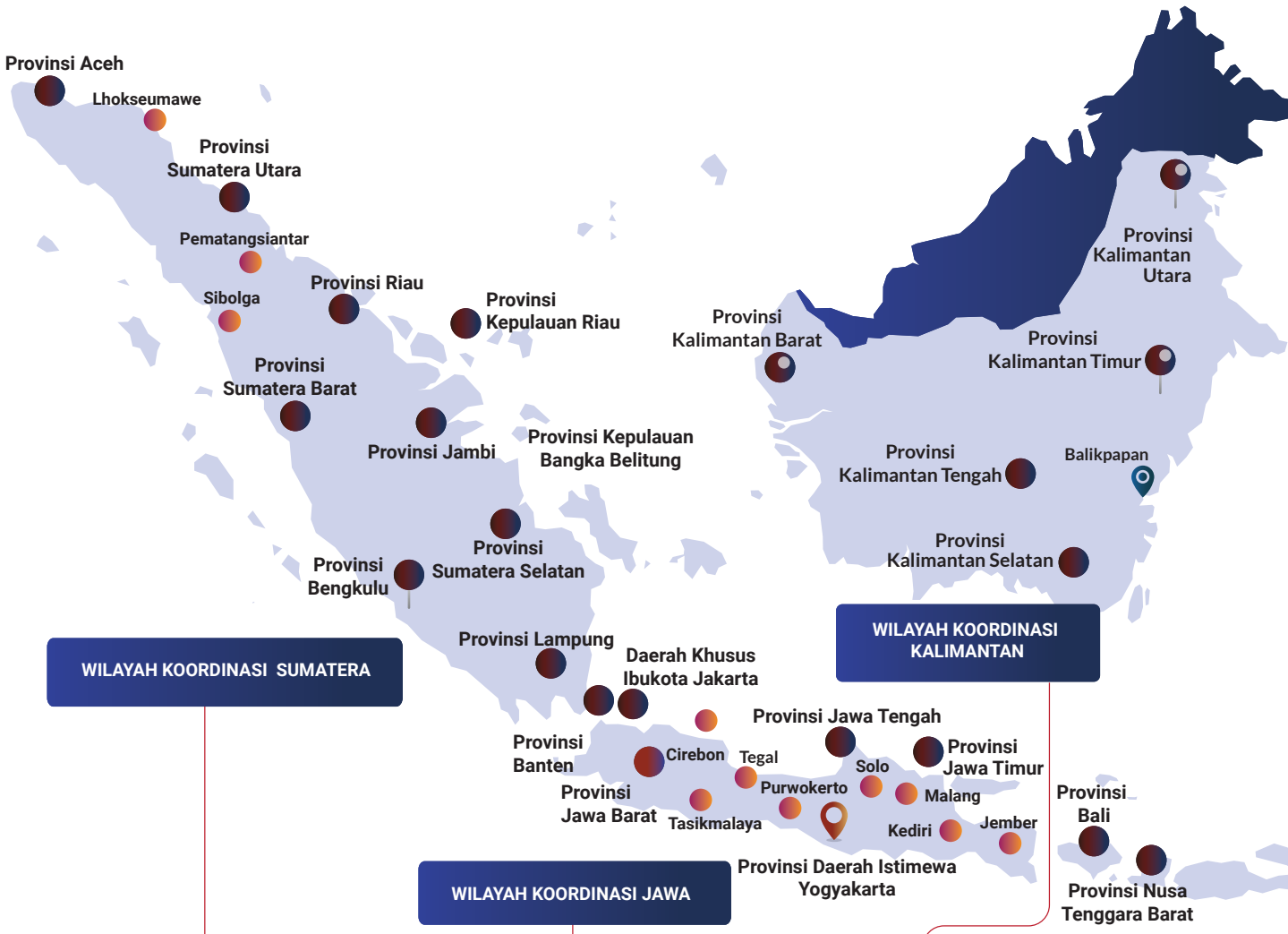

Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sumatera Utara

- KPw BI Provinsi Aceh
- KPw BI Provinsi Sumatera Barat
- KPw BI Provinsi Kepulauan Riau
- KPw BI Provinsi Riau
- KPw BI Provinsi Sumatera Selatan
- KPw BI Provinsi Bengkulu
- KPw BI Provinsi Lampung
- KPw BI Provinsi Jambi
- KPw BI Provinsi Bangka Belitung
- KPw BI Lhokseumawe
- KPw BI Pematangsiantar
- KPw BI Sibolga

Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Jawa Timur

- KPw BI Provinsi Jawa Barat
- KPw BI Provinsi Banten
- KPw BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- KPw BI Provinsi Jawa Tengah
- KPw BI Provinsi DKI Jakarta
- KPw BI Tasikmalaya
- KPw BI Cirebon
- KPw BI Tegal
- KPw BI Purwokerto
- KPw BI Solo
- KPw BI Malang
- KPw BI Kediri
- KPw BI Jember

Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan

- KPw BI Provinsi Kalimantan Barat
- KPw BI Provinsi Kalimantan Timur
- KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah
- KPw BI Provinsi Kalimantan Utara
- KPw BI Balikpapan

KPw BI Luar Negeri

- KPw BI London
- KPw BI New York
- KPw BI Singapura
- KPw BI Tokyo
- KPw BI Beijing

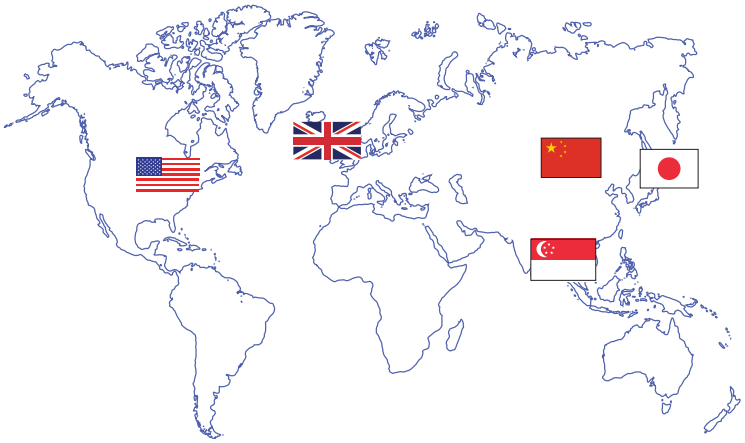

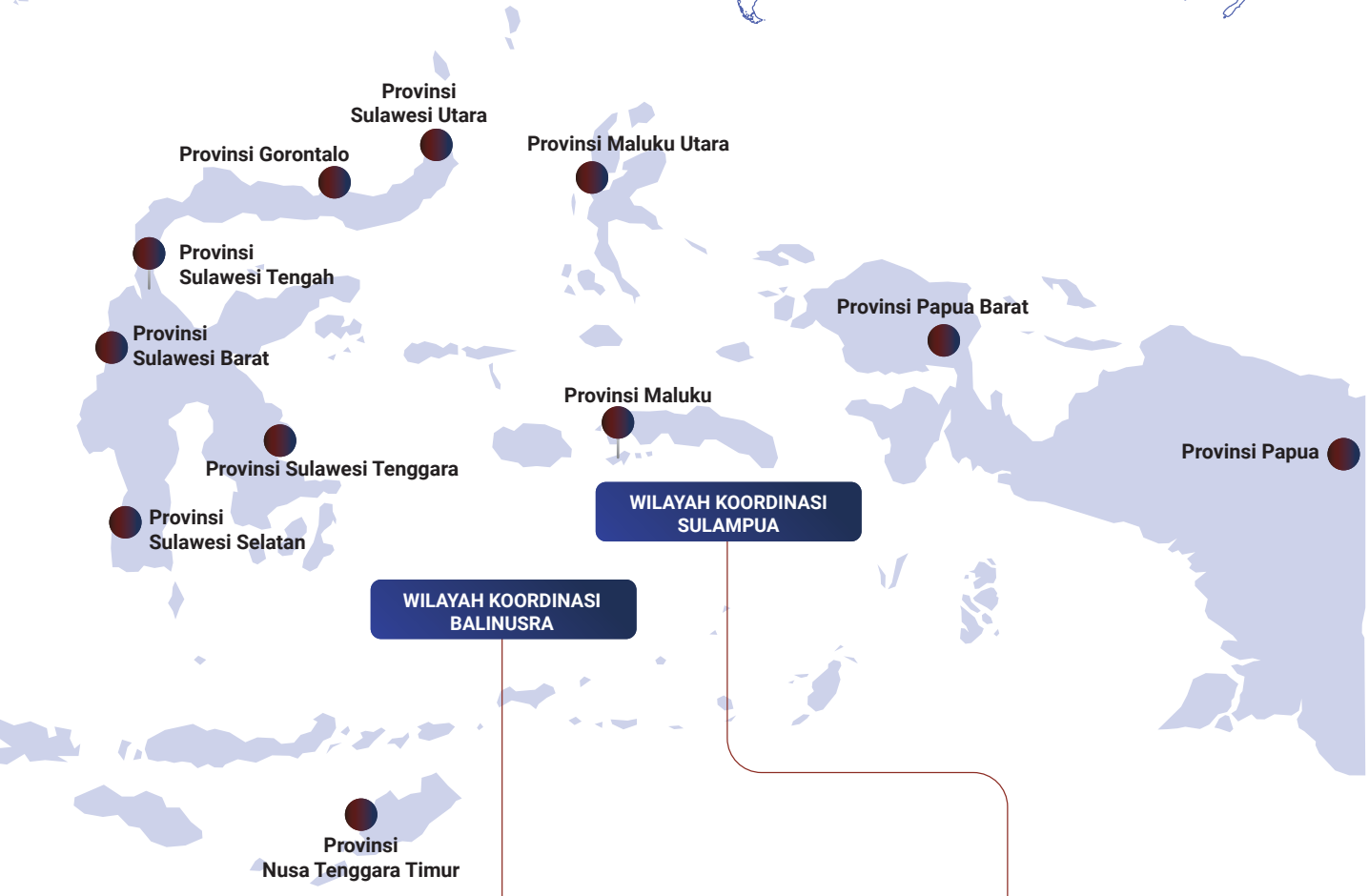

Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Bali

- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan

- KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
- KPw BI Provinsi Papua
- KPw BI Provinsi Maluku
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
- KPw BI Provinsi Gorontalo
- KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
- KPw BI Provinsi Maluku Utara
- KPw BI Provinsi Papua Barat

1.4. Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia

Per September 2026

KANTOR PUSAT BANK INDONESIA

MONETER

FIRMAN MOCHTAR	Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
ERWIN GUNAWAN HUTAPEA	Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas
RAHMATULLAH S.	Departemen Pengelolaan Devisa
ARIEF RACHMAN	Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
DADANG MULJAWAN	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

MAKROPRUDENSIAL

MAL ISNAINI SRI MEYYANTI	Departemen Kebijakan Makroprudensial
IRMAN ROBINSON	Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market
SALLY M. HUTAPEA	Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen
ELSYA M.S. CHANI	Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

RYAN RIZALDY	Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
DWI SUSLAMANTO	Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
M. ANWAR BASHORI	Departemen Pengelolaan Uang
M. AGUNG HASTOWO	Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, *Data Center*, dan *Business Resumption Site*

PENDUKUNG KEBIJAKAN

YOGA AFFANDI	Departemen Internasional
RIZA TYAS U. H.	Departemen Statistik
SUSSY WANDAYANI S.	Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
ISS SAVITRI HAFID	Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
ARIEF HARTAWAN	Departemen Manajemen Risiko
RAMDAN DENNY PRAKOSO	Departemen Komunikasi

PENDUKUNG ORGANISASI

MARDIANTO JATNA	Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola
RIKA S. DEWI	Departemen Hukum
IDAH ROSIDAH A.	Departemen Sumber Daya Manusia
ENDANG TRIANTI	Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital
RICKY SATRIA	Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data

ROHADI TRIATMONO	Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber
GIRI KOORNIAHARTA P.	Departemen Keuangan
HARUM SETIAWATI	Departemen Manajemen dan Advisory Pengadaan
HARI WIDODO	Departemen Audit Intern
ARLYANA ABUBAKAR	Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran
ERWINDO KOLOPAKING	Departemen Pengelolaan Aset Perumahan dan Non Perkantoran
EVA ADERIA S.	Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas
CLARITA LIGAYA ISKANDAR	Institut Bank Indonesia

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) DALAM NEGERI

RUDY BRANDO HUTABARAT	Departemen Regional
AMERIZA MA'RUF MOESA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sumatera Utara
IBRAHIM	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Jawa Timur
ACHRIS SARWANI	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Bali
HARIS MUNANDAR	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan
RIZKI ERNADI WIMANDA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan
AGUS CHUSAINI	KPw BI Provinsi Aceh
MOHAMAD ABDUL MAJID IKRAM	KPw BI Provinsi Sumatera Barat
PANJI ACHMAD	KPw BI Provinsi Riau
TEDY ARIEF BUDIMAN	KPw BI Provinsi Jambi
BAMBANG PRAMONO	KPw BI Provinsi Sumatera Selatan
WAHYU YUWANA HIDAYAT	KPw BI Provinsi Bengkulu
BIMO EPYANTO	KPw BI Provinsi Lampung
ROMMY SARIU TAMAWIWY	KPw BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
RONY WIDIJARTO P.	KPw BI Provinsi Kepulauan Riau
IWAN SETIAWAN	KPw BI Provinsi DKI Jakarta
JUNANTO HERDIAWAN	KPw BI Provinsi Jawa Barat
MOHAMAD NOOR NUGROHO	KPw BI Provinsi Jawa Tengah
SRI DARMADI SUDIBYO	KPw BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
SOFWAN KURNIA	KPw BI Provinsi Banten

HARIO KARTIKO PAMUNGKAS	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
ADIDOYO PRAKOSO	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur
DONI SEPTADIJAYA	KPw BI Provinsi Kalimantan Barat
YULIANSAH ANDRIAS	KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah
JAJANG HERMAWAN	KPw BI Provinsi Kalimantan Timur
AGUS TAUFIK	KPw BI Provinsi Kalimantan Utara
JOKO SUPRATIKTO	KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
MUHAMAD IRFAN SUKARNA	KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
EDWIN PERMADI	KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
BAMBANG SATYA PERMANA	KPw BI Provinsi Gorontalo
EKA PUTRA BUDI NUGROHO	KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
SURYA ALAMSYAH	KPw BI Provinsi Maluku
HANDI SUSILA	KPw BI Provinsi Maluku Utara
WARSONO	KPw BI Provinsi Papua
SETIAN	KPw BI Provinsi Papua Barat
YUDO HERLAMBANG	KPw BI Lhokseumawe
AHMADI RAHMAN	KPw BI Pematangsiantar
RIZA PUTERA	KPw BI Sibolga
WIHUJENG AYU RENGGANIS	KPw BI Cirebon
LAURA RULIDA EKA SARI P.	KPw BI Tasikmalaya
BIMALA	KPw BI Tegal
ASWIN GANTINA	KPw BI Purwokerto
DWIYANTO CAHYO SUMIRAT	KPw BI Solo
YAYAT CADARAJAT	KPw BI Kediri
IQBAL REZA NUGRAHA	KPw BI Jember
INDRA KUSPRIYADI	KPw BI Malang
ROBI ARIADI	KPw BI Balikpapan

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) LUAR NEGERI

WAHYU AGUNG NUGROHO	KPw BI New York
I GEDE PUTU WIRA K.	KPw BI London
IMADUDDIN SAHABAT	KPw BI Tokyo
WIDI AGUSTIN S.	KPw BI Singapura
YULIAN WIHANTORO	KPw BI Beijing

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

BAB 2

LINGKUNGAN STRATEGIS KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

Konfrensi Pers Rapat Dewan Gubernur Bulanan (RDGB) di Jakarta.

2.1. Lingkungan Strategis Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi dan prospek perekonomian global semakin memburuk akibat perang di Timur Tengah. Ketidakpastian global yang sempat mereda setelah dilakukannya *interim deal* antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada 14 Juni 2026 kembali meningkat pasca-reeskalasi intensitas perang antara AS dan Iran pada awal Juli 2026. Perang yang telah berlangsung sejak akhir Februari 2026 ini mengakibatkan lalu lintas di Selat Hormuz kembali terhambat sehingga mengganggu produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara, serta mendorong harga minyak dan berbagai komoditas dunia kembali meningkat setelah sempat menurun pada Juni 2026. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diprakirakan tetap lemah sebesar 3,0% dan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,5%. Sejumlah bank sentral mulai menaikkan suku bunga kebijakan untuk merespons kenaikan inflasi tersebut. Suku bunga kebijakan moneter AS, *Fed Funds Rate* (FFR), selama Januari hingga Juli 2026 dipertahankan pada level 3,50-3,75% dan ke depan terdapat kemungkinan kenaikan FFR seiring prospek inflasi AS yang tinggi. Imbal hasil (*yield*) US Treasury tetap tinggi, mencapai 4,73% (tenor 10 tahun) dan 4,29% (tenor 2 tahun) pada tanggal 31 Juli 2026 dan diprakirakan meningkat lagi didorong oleh melebarnya defisit fiskal AS.

Di pasar keuangan global, aliran modal keluar dari negara *Emerging Markets* beralih ke pasar keuangan AS dan aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (*safe-haven assets*) sehingga mendorong penguatan mata uang dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY). Pandangan berbagai lembaga internasional dan otoritas global seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, Bank of England (BOE), European Central Bank (ECB), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta JP Morgan mengonfirmasi bahwa kondisi perekonomian global pada triwulan II 2026 semakin berat akibat meningkatnya ketidakpastian yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tekanan inflasi, serta memperbesar volatilitas pasar keuangan dan risiko stabilitas keuangan.

Di tengah kondisi global yang semakin berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tetap baik meski turut menghadapi tekanan eksternal yang meningkat. Kondisi tersebut menuntut penguatan respons bauran kebijakan dan sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Lembaga nasional dan internasional turut mengakui ketahanan perekonomian Indonesia, meskipun tekanan terhadap prospek pertumbuhan, nilai tukar, inflasi, serta ruang kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi diperkirakan tetap tinggi seiring pelemahan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Di tengah beratnya tantangan perekonomian tersebut, perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 tetap tumbuh dengan baik. Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,29% (yoy), melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,61% (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh seiring momentum libur sekolah dan berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta dukungan

kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia. Konsumsi Pemerintah tumbuh dan bersumber dari peningkatan realisasi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji ke-13, serta belanja barang dan jasa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Investasi juga tumbuh, didorong oleh pertumbuhan subkomponen kendaraan serta investasi pemerintah dan swasta sejalan dengan meningkatnya realisasi penanaman modal. Dari sisi eksternal, ekspor tetap tumbuh, ditopang oleh permintaan mitra dagang utama. Ke depan, berbagai program stimulus Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta implementasi program prioritas terus dioptimalkan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kebijakan makroprudensial longgar dan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat untuk mendukung ketahanan eksternal. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari hingga Juni 2026 secara kumulatif mencatat surplus sebesar 3,58 miliar dolar AS, dengan perkembangan pada Mei dan Juni 2026 mencatat defisit masing-masing sebesar 1,61 miliar dolar AS dan 0,45 miliar dolar AS, terutama dipengaruhi oleh lebih besarnya defisit neraca perdagangan migas di tengah neraca perdagangan nonmigas yang tetap mencatat surplus. Dari transaksi modal dan finansial, aliran investasi portofolio pada triwulan II 2026 mencatat *net inflows* sebesar 8,5 miliar dolar AS, terutama ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) seiring meningkatnya imbal hasil. Perkembangan positif tersebut didukung oleh berbagai penguatan respons kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia yang bersinergi dengan kebijakan fiskal untuk meningkatkan imbal hasil instrumen keuangan domestik. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2026 tetap terjaga sebesar USD145,3 miliar, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan kinerja transaksi berjalan 2026 tetap sehat dalam kisaran defisit 1,3% sampai dengan 0,5% dari PDB. Penguatan sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus ditempuh untuk memperkuat neraca modal dan finansial guna mendukung ketahanan eksternal perekonomian nasional dan sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dalam menghadapi gejolak global.

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Sebagaimana disebutkan di atas, tingginya ketidakpastian pasar keuangan global mengakibatkan pelarian modal keluar dari *emerging markets* dan kuatnya dolar AS sehingga memberi tekanan yang besar pada pelemahan nilai tukar hampir semua negara, termasuk Rupiah. Di dalam negeri, permintaan valas pada triwulan II 2026 juga meningkat cukup tinggi dipengaruhi oleh faktor musiman, antara lain untuk pembayaran dividen dan kewajiban luar negeri. Sebagai respons atas perkembangan tersebut, Bank Indonesia menempuh langkah-langkah penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui peningkatan intensitas intervensi valas, baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri (*offshore*) maupun transaksi *spot* dan DNDF di pasar dalam negeri. Suku bunga SRBI dinaikkan menjadi 7,70% per 30 Juni 2026 untuk tenor 12 bulan guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah. Posisi SRBI pada 31 Juli 2026 tercatat sebesar Rp1.059,30 triliun, dengan kepemilikan nonresiden yang meningkat menjadi Rp287,06 triliun (27,10% dari total *outstanding*), sehingga turut mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan transaksi pasar valas melalui penyesuaian *threshold* tunai beli valas terhadap Rupiah, peningkatan *threshold* jual DNDF/*Forward*, peningkatan *threshold* beli dan jual *swap*, yang berlaku mulai April 2026. Bank Indonesia juga memberikan insentif penurunan tingkat *swap* lindung nilai *(hedging swap)* bagi investor asing sebesar 10% guna semakin meningkatkan daya tarik masuknya investor asing serta mengompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor. Selain itu, Bank Indonesia memperluas instrumen operasi moneter valas dengan instrumen *spot* dan *swap* dalam valuta *offshore* Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal (*Local Currency Transaction*, LCT). Dengan langkah-langkah tersebut, nilai tukar Rupiah pada akhir Juli 2026 tercatat sebesar Rp17.994 per dolar AS atau melemah terbatas sebesar 0,63% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Juni 2026. Ke depan, Bank Indonesia meyakini nilai tukar Rupiah akan stabil, didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga dalam sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam kisaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027. Inflasi IHK pada Juni 2026 tercatat 3,34% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,76% (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga pencapaian sasaran inflasi. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) naik menjadi sebesar 3,42% (yoy) seiring penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi global. Inflasi kelompok *volatile food* (VF) tercatat sebesar 5,58% (yoy) disumbang terutama oleh inflasi komoditas

pangan bawang dan beras seiring dengan penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter dan meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah agar inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027. Sinergi dengan Pemerintah ditempuh melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dengan memperkuat implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), termasuk untuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca (*El Niño*) terhadap harga pangan.

Kecukupan likuiditas pasar uang, perbankan, dan perekonomian tetap terjaga, didukung oleh penguatan kebijakan Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia membuka kembali *window* lelang instrumen *repurchase agreement* (repo) bagi perbankan untuk tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan, serta melakukan pembelian SBN yang sejalan dengan arah dan program kebijakan moneter, termasuk di pasar sekunder. Langkah tersebut menjaga uang primer (M0) pada Juli 2026 tetap tumbuh tinggi (*double digit*) sebesar 18,3% (yoy). pada Juni 2026. Ke depan, berbagai upaya penguatan untuk menjaga kecukupan likuiditas pasar uang, perbankan, dan perekonomian akan terus ditempuh sehingga dapat menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas. Hingga minggu pertama Juli 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp431,9 triliun dengan alokasi pada *lending channel* sebesar Rp369,0 triliun, dan *interest rate channel* sebesar Rp62,9 triliun. Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank BUMN sebesar Rp219,6 triliun, BUSN sebesar Rp172,5 triliun, BPD sebesar Rp31,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp8,1 triliun. Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan. Ke depan, KLM akan terus diperkuat dengan memberikan insentif bagi bank yang meningkatkan pembiayaan (*financing*) nonkredit dan pendanaan (*funding*) non-DPK, serta bagi bank yang menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif lainnya, antara lain melalui penguatan kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk terus mendukung penyaluran kredit/pembiayaan perbankan.

Pertumbuhan kredit perbankan tetap kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2026 tercatat sebesar 12,67% (yoy), meningkat dari pertumbuhan Mei 2026 sebesar 11,51% (yoy). Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 24,90% (yoy), 8,94% (yoy), dan 5,75% (yoy) pada Juni 2026. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%. Prospek ini didukung oleh potensi dari sisi permintaan sejalan dengan masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (*undisbursed loan*) yang mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52% dari plafon kredit yang tersedia, sehingga perlu terus didorong realisasinya untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit *(lending appetite)* juga masih longgar serta didukung pertumbuhan DPK yang tetap tinggi, yaitu sebesar 10,21% (yoy). Selain itu, perkembangan suku bunga perbankan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit, termasuk didukung oleh publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Perkembangan suku bunga deposito 1 bulan pada Juni 2026 tercatat 4,76%, sementara suku bunga kredit per Juni 2026 tercatat sebesar 8,81%. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat strategi dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan.

Ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi ketidakpastian global terhadap sistem keuangan. Kondisi ini ditandai dengan kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, risiko kredit yang terjaga rendah, dan likuiditas perbankan secara industri juga tetap memadai. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*–CAR) perbankan pada Mei 2026 tercatat tinggi sebesar 23,74% yang tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*–NPL) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,17% (bruto) dan 0,84% (neto) pada Mei 2026. Sementara itu, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) industri perbankan tercatat sebesar 23,08% pada Juni 2026 atau turun dari 24,74% pada Mei 2026. Hasil *stress test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan berlanjutnya perang di Timur Tengah yang ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga dengan baik. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial dan sinergi kebijakan bersama KSSK dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk menjaga kecukupan likuiditas dan memitigasi segmentasi likuiditas antarbank.

Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan II 2026 tetap tumbuh, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal untuk menopang kegiatan ekonomi. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 16,07 miliar transaksi atau tumbuh 36,88% (yoy), didukung

oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui internet dan aplikasi *mobile* masing-masing tumbuh sebesar 16,88% (yoy) dan 31,39% (yoy), termasuk transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang terus tumbuh tinggi mencapai 100,12% (yoy). Kinerja QRIS yang positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan *merchant*. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1.529 juta transaksi atau tumbuh 38,09% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp3.777 triliun. Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 2,63 juta transaksi atau tumbuh 13,03% (yoy), dengan nominal transaksi BI-RTGS tumbuh 12,66% (yoy) mencapai Rp53.492 triliun. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 14,03% (yoy) menjadi Rp1.315 triliun pada triwulan II 2026.

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat struktur industri sistem pembayaran, antara lain melalui upaya untuk memastikan pemenuhan aspek manajemen risiko dan keselarasan dengan arah kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan aktivitas, produk dan/atau kerja sama sistem pembayaran. Bank Indonesia juga akan terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun *wholesale*, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Selain itu, Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

2.2. Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan

Selain dinamika perekonomian global dan domestik, pada triwulan II 2026 Bank Indonesia juga mencermati perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan. Perubahan tersebut terutama bersumber dari amandemen UU P2SK, pergeseran lanskap ekonomi dan keuangan global, akselerasi inovasi keuangan digital, serta pesatnya perkembangan teknologi. Pada saat yang sama, kebutuhan sumber daya manusia dengan keahlian yang semakin spesifik dan tuntutan efisiensi anggaran juga meningkat. Berbagai perkembangan tersebut menghadirkan peluang untuk memperkuat peran Bank Indonesia, sekaligus menuntut respons kebijakan dan transformasi kelembagaan yang semakin terintegrasi, adaptif, dan akuntabel. Berbagai lembaga, termasuk pengamat ekonomi, mengonfirmasi bahwa meningkatnya ketidakpastian global tidak hanya memperberat tantangan perekonomian, tetapi juga meningkatkan kompleksitas kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia, terutama dalam implementasi amandemen UU P2SK, penguatan efektivitas transmisi kebijakan, serta respons terhadap perkembangan teknologi.

Amandemen UU P2SK menuntut penguatan peran Bank Indonesia, baik dari sisi kebijakan maupun kelembagaan. Dari sisi kebijakan, bauran kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran serta kebijakan pendukung perlu terus diperkuat agar semakin efektif dalam menjaga stabilitas sekaligus mengoptimalkan dukungan terhadap penciptaan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Penguatan tersebut perlu ditopang sinergi kebijakan yang semakin erat dengan Pemerintah, KSSK, dan lembaga terkait agar respons terhadap berbagai tantangan perekonomian tetap konsisten dan terkoordinasi.

Dari sisi kelembagaan, amandemen UU P2SK menuntut penguatan pengelolaan organisasi dan sumber daya, serta peningkatan efektivitas tata kelola Bank Indonesia. Penguatan pengelolaan organisasi mencakup penyempurnaan perencanaan strategis dan penilaian kinerja agar semakin selaras dengan mandat dan prioritas kelembagaan. Penguatan tata kelola dilakukan melalui penguatan desain fungsi dan tanggung jawab, proses pengambilan keputusan yang akuntabel, serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Dengan demikian, perluasan peran dan kewenangan Bank Indonesia dapat diimbangi dengan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme kelembagaan yang semakin kuat.

Lebih lanjut, fragmentasi ekonomi dan keuangan global, perubahan pola perdagangan dan investasi, serta meningkatnya volatilitas aliran modal dapat memengaruhi efektivitas transmisi kebijakan dan stabilitas perekonomian domestik. Tantangan tersebut semakin kompleks seiring akselerasi inovasi keuangan digital yang membuka peluang efisiensi, inklusi keuangan dan konektivitas transaksi, namun juga membawa risiko baru terhadap stabilitas sistem keuangan, pelindungan konsumen, integritas transaksi, keamanan siber dan kedaulatan data. Kondisi tersebut menuntut Bank Indonesia untuk terus memperkuat dan meninjau kembali kerangka kebijakan, framework, blueprint, dan Rencana Strategis Lima Tahun (RSLT) secara terintegrasi, agar tetap adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis, serta kebutuhan kebijakan ke

depan guna menjaga konsistensi antara pencapaian stabilitas dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pesatnya perkembangan teknologi menciptakan peluang bagi Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas analisis, efektivitas proses kerja, dan kecepatan pengambilan keputusan. Pemanfaatan AI, penguatan kapabilitas teknologi yang telah tersedia, serta pengembangan infrastruktur digital mendukung perumusan kebijakan yang semakin berbasis data, terintegrasi, dan responsif. Pemanfaatan teknologi tersebut juga perlu mempertimbangkan aspek *cloud sovereignty*, keamanan dan kerahasiaan data, ketahanan siber, serta kesinambungan sistem dan layanan Bank Indonesia.

Transformasi teknologi tersebut juga perlu diimbangi dengan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran. Meningkatnya kebutuhan SDM dengan *expertise* spesifik di bidang AI, pengelolaan data, keamanan siber, dan infrastruktur digital menuntut strategi perencanaan, pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM yang selaras dengan arah transformasi kebijakan dan kelembagaan, didukung penguatan kompetensi berkelanjutan. Pada saat yang sama, penetapan prioritas investasi teknologi, optimalisasi kapabilitas yang telah dimiliki, serta penguatan tata kelola program dan anggaran menjadi penting agar setiap inisiatif memberikan manfaat yang terukur. Dengan pendekatan tersebut, transformasi kebijakan dan kelembagaan diharapkan dapat memperkuat kapasitas Bank Indonesia dalam merespons perubahan lingkungan strategis, sekaligus menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelaksanaan tugas sebagai bank sentral dan lembaga publik.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu

BAB 3

RESPONS KEBIJAKAN BANK INDONESIA

3.1. *Stance* Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk memperkuat ketahanan eksternal dan stabilitas dari dampak gejolak global dengan tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas dan ketahanan eksternal ("*pro-stability*") dari dampak gejolak global. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ("*pro-growth*"). Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Ketiga bauran kebijakan utama Bank Indonesia tersebut didukung oleh penguatan kebijakan untuk pendalaman pasar uang dan pasar valas, pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, serta kebijakan internasional.

Pada area kebijakan moneter, Bank Indonesia memaksimalkan seluruh instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global. Di samping meningkatkan intensitas intervensi valas untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia juga menaikkan tingkat struktur suku bunga instrumen moneter untuk menarik masuknya investasi portofolio asing. Kebijakan ini disertai dengan pembelian SBN dari pasar sekunder, menjaga kecukupan likuiditas, serta akselerasi pendalaman pasar valas. Secara rinci, pada triwulan II 2026, Bank Indonesia menempuh 7 (tujuh) langkah untuk menjaga ketahanan eksternal dan stabilitas dari dampak memburuknya gejolak global. *Pertama*, memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan intervensi di pasar valas domestik dan luar negeri. *Kedua*, menaikkan tingkat dan struktur suku bunga instrumen moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi dalam kisaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027. *Ketiga*, meningkatkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik kembali aliran masuk portofolio asing yang sempat keluar akibat tingginya gejolak global, sekaligus memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. *Keempat*, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan sejalan dengan arah kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan. *Kelima*, memperkuat kebijakan transaksi pasar valas guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. *Keenam*, mempercepat implementasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai dengan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030. *Ketujuh*, memperkuat pengawasan terhadap bank dan korporasi.

Kebijakan makroprudensial akomodatif terus ditempuh untuk memperkuat fungsi intermediasi perbankan, meningkatkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan kapasitas sistem keuangan dalam mendukung transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan penyaluran kredit kepada sektor-sektor prioritas, termasuk sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas ekonomi. Sejalan dengan arah tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan perbankan. Penyempurnaan KLM dilakukan melalui peningkatan besaran insentif likuiditas, perluasan sektor prioritas, serta penguatan desain kebijakan agar semakin efektif dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan. Penguatan kebijakan makroprudensial juga dilakukan melalui penyempurnaan berbagai instrumen pendukung, termasuk Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN), serta berbagai kebijakan yang mendukung pembiayaan sektor perumahan dan sektor prioritas lainnya. Keseluruhan bauran kebijakan makroprudensial tersebut diarahkan untuk memastikan kecukupan likuiditas dan kapasitas pembiayaan perbankan tetap terjaga, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui percepatan digitalisasi sistem pembayaran, peningkatan efisiensi transaksi ekonomi dan keuangan, serta penguatan integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan interoperabilitas sistem pembayaran, serta peningkatan konektivitas pembayaran lintas negara guna mendukung perdagangan, investasi, dan aktivitas ekonomi yang semakin terintegrasi. Bank Indonesia juga terus memperkuat struktur industri sistem pembayaran melalui pengembangan inovasi pembayaran digital, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, peningkatan keamanan siber, serta penguatan keandalan, efisiensi, dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 terus dipercepat sebagai kerangka transformasi sistem pembayaran nasional agar semakin modern, inklusif, aman, efisien, dan mampu mengakomodasi perkembangan inovasi digital serta dinamika ekonomi

nasional maupun global. Di samping itu, Bank Indonesia terus memperluas implementasi QRIS, BI-FAST, serta konektivitas pembayaran lintas negara melalui QRIS *Cross-Border* dan berbagai inisiatif kerja sama regional lainnya. Penguatan sistem pembayaran tersebut juga disinergikan dengan perluasan implementasi *Local Currency Transaction* (LCT) sebagai bagian dari upaya memperdalam pasar keuangan domestik, meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan dan investasi, serta memperkuat ketahanan sektor eksternal. Dengan demikian, kebijakan sistem pembayaran tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi transaksi ekonomi, tetapi juga mendukung inklusi keuangan, penguatan daya saing UMKM, dan akselerasi transformasi digital ekonomi Indonesia.

3.2. Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Konsisten dengan arah bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut, pada triwulan II 2026 Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pencapaian sasaran inflasi. Penguatan dilakukan melalui penetapan kebijakan suku bunga BI-Rate yang *pre-emptive* dan *forward-looking* untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah serta menjaga inflasi 2026-2027 sesuai sasaran yang ditetapkan Pemerintah. Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 50 *bps* menjadi 5,25% pada RDG Mei 2026, sebesar 25 *bps* menjadi 5,50% pada RDG Mingguan 9 Juni 2026, dan sebesar 25 *bps* menjadi 5,75% pada RDG Juni 2026. Selain itu, suku bunga SRBI juga dinaikkan menjadi 7,70% per 30 Juni 2026 untuk tenor 12 bulan guna menarik aliran masuk portofolio asing dan memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. Kebijakan tersebut turut didukung melalui pemberian insentif dan sejumlah kebijakan lainnya guna meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA), serta memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Bank Indonesia juga memperkuat implementasi kebijakan yang diarahkan untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1%. Secara rinci, Bank Indonesia menempuh empat langkah untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi. Pertama, meningkatkan intensitas intervensi valas untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik. Kedua, menjaga struktur suku bunga SRBI pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan yang sejalan dengan kenaikan BI-Rate untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik. Ketiga, melanjutkan pemberian insentif penurunan tingkat *swap* lindung nilai (*hedging swap*) bagi investor asing sebesar 10% untuk meningkatkan efisiensi biaya lindung nilai dan semakin memperkuat daya tarik investasi di pasar keuangan domestik. Keempat, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer lebih dari 10% (*double digit*) sesuai dengan ekspansi moneter, termasuk melalui pembukaan kembali *window* lelang instrumen *repurchase agreement* (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan sebagai instrumen utama ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia bagi perbankan.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial akomodatif diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan serta turut meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia mempertahankan sejumlah kebijakan makroprudensial, yaitu: (i) Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CcyB) sebesar 0%; (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; (iii) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4%; dan (iv) Rasio PLM syariah sebesar 2,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5%.

Penguatan kebijakan juga dilakukan melalui perluasan sumber pendanaan perbankan, khususnya dari luar negeri, melalui peningkatan RPLN dari maksimum 35% menjadi 40% dari modal bank yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas kapasitas pendanaan perbankan dalam mendukung penyaluran kredit/pembiayaan kepada perekonomian, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Penguatan kebijakan makroprudensial juga dilakukan melalui penyempurnaan KLM untuk memperkuat ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas. Penyempurnaan yang berlaku efektif mulai 1 September 2026 tersebut tetap diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, melalui: (i) peningkatan total besaran insentif KLM yang dapat diterima oleh bank menjadi paling tinggi sebesar 6,0% dari sebelumnya sebesar 5,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK); (ii) penyesuaian alokasi KLM Pasar Uang (PPU) paling tinggi 2,0% dari DPK kepada bank yang menjaga rasio kepemilikan surat-surat berharga pada tingkat optimal yang ditetapkan Bank Indonesia. KLM PPU tersebut menggantikan KLM *interest rate channel* dan *financing to funding channel*, yang diarahkan untuk mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang

Sejalan dengan penguatan KLM, Bank Indonesia juga memperkuat Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan dimaksud ditujukan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penguatan RPIM dilakukan melalui 3 (tiga) modalitas. Pertama, perluasan cakupan penyaluran kredit/pembiayaan perbankan termasuk kepada pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha untuk mendukung sektor yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, perluasan cakupan mekanisme kerja sama penyaluran kredit UMKM antarbank umum melalui skema *channeling* dan *executing*. Ketiga, penguatan mekanisme transfer RPIM antarbank berbasis kontrak.

Dalam mendukung efektivitas transmisi kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia juga mempublikasikan asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM. Upaya tersebut diperkuat melalui sinergi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mendorong kredit/pembiayaan, antara lain melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI).

Sejalan dengan penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia, respons kebijakan di bidang sistem pembayaran juga terus diperkuat melalui implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional. Pada triwulan II 2026, respons kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia ditempuh melalui 5 langkah utama. Pertama, peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI): Hackathon dan Digdaya (Digital Talenta Berdaya dan Berkarya). Kedua, sinergi program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 dengan PIDI-Hackathon-Digdaya melalui perluasan inovasi sistem pembayaran terkini untuk meningkatkan efisiensi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda). Ketiga, peluncuran QRIS Antarnegara Indonesia–Korea Selatan pada 1 April 2026, serta Indonesia–Tiongkok pada 30 April 2026 untuk memperluas konektivitas pembayaran lintas negara yang lebih cepat, mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara. Keempat, dukungan fasilitasi sarana dan prasarana, termasuk pelaksanaan sosialisasi dan edukasi program kerja Bank Indonesia, khususnya terkait QRIS dan Pelindungan Konsumen, untuk mendukung perluasan sosialisasi *piloting* digitalisasi bantuan sosial (bansos) di 41 kabupaten/kota. Kelima, perpanjangan kebijakan Kartu Kredit (KK) dan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan 31 Desember 2026, meliputi: (i) kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000; dan (ii) tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah.

Pada area Kebijakan Pendukung, Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman PUVA yang modern, maju, efisien, dan pruden sejalan dengan BPPU 2030. Sepanjang triwulan II 2026, penguatan diarahkan pada peningkatan peran Dealer Utama PUVA untuk mendukung pembentukan harga yang wajar melalui transaksi pasar, meningkatkan likuiditas, dan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Peran tersebut diperluas melalui keikutsertaan Dealer Utama PUVA dalam transaksi NDF jual valuta asing terhadap Rupiah di luar negeri. Sejalan dengan upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik, Bank Indonesia juga menurunkan *threshold* pembelian tunai valas terhadap Rupiah tanpa *underlying* menjadi USD10.000 per pelaku per bulan. Penyesuaian juga dilakukan pada *threshold* kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri (*outgoing*) dalam valas dari nominal setara di atas USD50.000 menjadi setara di atas USD25.000. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tersebut ditempuh untuk memperkuat kehati-hatian dalam aktivitas PUVA dan mendukung stabilitas pasar keuangan. Di sisi lain, kebijakan pendukung terus diarahkan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembiayaan perekonomian dan mendukung program prioritas Pemerintah, antara lain melalui pengembangan pasar Surat Berharga Komersial (SBK) sebagai alternatif sumber pembiayaan nasional serta penyesuaian ketentuan untuk mendukung implementasi PP Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Pada area kebijakan internasional, Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama internasional untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sekaligus mendorong perdagangan dan investasi. Pada triwulan II 2026, penguatan kerja sama keuangan dilakukan melalui perluasan implementasi LCT Indonesia–Tiongkok yang didukung oleh *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bank Indonesia, HKMA, dan PBoC, serta MoU BI–PBoC mengenai RMB Clearing Bank. Upaya serupa juga dilakukan dengan mendorong percepatan implementasi LCT Indonesia–India dan menyetujui penyempurnaan tujuan *Local Currency Bilateral Swap Arrangement* (LCBSA) BI–MAS, sehingga tidak hanya mendukung stabilitas moneter dan keuangan, tetapi juga memfasilitasi perdagangan dan investasi. Selain itu, kerja sama bilateral dengan bank

Peluncuran Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera 2026 di Palembang.

sentral mitra terus diperkuat melalui kerangka *Structured Bilateral Cooperation* (SBC). Penguatan kerja sama internasional tersebut turut diiringi dengan upaya menjaga persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan engagement dengan lembaga pemeringkat. Upaya ini selanjutnya diperkuat melalui fasilitasi promosi perdagangan dan investasi dengan mengoptimalkan linkage IRU–RIRU–GIRU di Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura, guna mendorong peningkatan perdagangan dan investasi, sekaligus memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Bank Indonesia terus memperkuat pengembangan UMKM serta ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan daya saing, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat ekosistem produk halal. Sepanjang triwulan II 2026, pengembangan UMKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing agar mampu naik kelas dan menembus pasar ekspor, antara lain melalui peningkatan pemahaman mengenai pencatatan keuangan dan ketentuan perpajakan serta penguatan digitalisasi melalui program *Onboarding* UMKM. Akses pembiayaan juga diperluas melalui penguatan koordinasi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam pengembangan alternatif skema pembiayaan UMi Pro. Sejalan dengan itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diarahkan untuk memperkuat ekosistem melalui pendalaman pasar keuangan syariah, penguatan intermediasi, serta peningkatan literasi dan inklusi. Upaya tersebut ditempuh melalui pengembangan *Reference Rate Syariah* (RRS), penyempurnaan regulasi PUVA Syariah, serta peningkatan sinergi dengan industri, SRO PUVA, OJK, Kementerian Keuangan, DSN-MUI, dan DSAS-IAI. Bank Indonesia juga mendukung implementasi Produk Investasi Perbankan Syariah (PIPS) melalui penyesuaian kebijakan terkait Giro Wajib Minimum (GWM), RIM, ketentuan dan pelaporan perbankan syariah, serta terus memperkuat literasi, inklusi, dan *halal lifestyle* bersama pemangku kepentingan strategis sesuai Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI), termasuk melalui persiapan Festival Ekonomi Keuangan Syariah (FESyar) Sumatera dan FESyar KTI 2026.

Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal terus diperkuat untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik. Sinergi kebijakan dengan KSSK juga semakin ditingkatkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan perekonomian sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

BAB 4

TRANSFORMASI BANK INDONESIA

Bank Indonesia terus melanjutkan transformasi kebijakan dan kelembagaan yang telah ditempuh sejak tahun 2018 untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia di tengah lingkungan strategis yang semakin dinamis dan kompleks. Selain ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi, Bank Indonesia juga mencermati pesatnya perkembangan digitalisasi dan teknologi, serta perubahan demografi pegawai yang semakin didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Perkembangan tersebut menuntut Bank Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat sinergi bauran kebijakan, dan mempercepat transformasi digital proses bisnis kebijakan dan kelembagaan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik, profesionalisme, dan akuntabilitas. Penajaman implementasi agenda transformasi dilakukan secara bertahap guna memperkuat peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendukung transformasi ekonomi nasional sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.

Pada triwulan II 2026, inisiatif transformasi kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia, sedangkan transformasi kelembagaan difokuskan pada digitalisasi kelembagaan untuk penguatan proses kerja dan tata kelola, didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Transformasi kebijakan dilakukan melalui penguatan integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial, percepatan transmisi kebijakan, serta penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan. Bank Indonesia juga terus memperkuat pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta melanjutkan transformasi sistem pembayaran sesuai *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Pada area kelembagaan, transformasi difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital yang didukung integrasi data dalam proses kerja guna meningkatkan efektivitas organisasi dan tata kelola, serta pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM untuk memastikan Bank Indonesia tetap adaptif, tangguh, dan relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

4.1. Transformasi Kebijakan

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana amanat UU. Pada triwulan II 2026, transformasi bauran kebijakan diarahkan pada penyempurnaan kerangka kebijakan, penguatan efektivitas transmisi kebijakan, pendalaman pasar keuangan, serta pengembangan infrastruktur dan digitalisasi yang mendukung proses perumusan dan implementasi kebijakan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga melanjutkan penyempurnaan berbagai pengaturan pada area kebijakan utama dan pendukung guna memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya stabilitas nilai Rupiah, terpeliharanya stabilitas sistem pembayaran, serta terjaganya stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan penguatan kerangka kebijakan melalui pengembangan berbagai konsepsi dan infrastruktur pendukung di area moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Penguatan juga dilakukan melalui penyusunan dan penyempurnaan pengaturan, antara lain terkait Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA), Pengelolaan Cadangan Devisa, Resolusi Bank, serta Data Sistem Pembayaran. Bank Indonesia turut memperkuat infrastruktur data untuk meningkatkan integrasi data pada area kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, serta meningkatkan transparansi harga di pasar uang konvensional dan syariah. Penguatan kerangka kebijakan juga didukung oleh *business process re-engineering* (BPR) dan digitalisasi perumusan dan pelaksanaan bauran kebijakan melalui pemanfaatan data dan teknologi, termasuk AI, guna mewujudkan proses bisnis yang lebih sederhana, terintegrasi, *agile*, dan responsif terhadap kebutuhan di era digital.

4.1.1. Transformasi di Bidang Moneter

Bank Indonesia terus memperkuat kerangka kebijakan moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan dalam mendukung pencapaian sasaran Bank Indonesia di tengah dinamika perekonomian dan sistem keuangan yang semakin kompleks. Penguatan tersebut ditempuh melalui penyempurnaan konsepsi dan kerangka kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Langkah tersebut sekaligus memperkuat implementasi Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran secara sinergis, serta didukung oleh berbagai kebijakan pendukung untuk mencapai tujuan Bank Indonesia.

1) **Pengembangan Kerangka Kerja *Macrofinancial Linkage***

   Sebagai bagian dari penguatan implementasi BKBI, pada triwulan II 2026 Bank Indonesia melanjutkan pengembangan kerangka kerja *macrofinancial linkage* untuk memperkuat integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial dalam pengelolaan likuiditas. Kerangka tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan sinergi antara instrumen moneter dan makroprudensial, sehingga pengelolaan likuiditas dapat dilakukan secara lebih optimal dengan mempertimbangkan tidak hanya

dinamika siklus ekonomi secara agregat, tetapi juga perkembangan intermediasi dan kondisi likuiditas perbankan. Dengan demikian, efektivitas transmisi kebijakan dapat diperkuat untuk mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan.

Implementasi kerangka tersebut juga diarahkan untuk memperkuat transmisi suku bunga dan kredit. Dari sisi suku bunga, pengelolaan likuiditas yang optimal dapat mendukung kecepatan dan besaran *pass-through* BI-Rate ke suku bunga pasar uang dan perbankan. Dari sisi kredit, integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial memungkinkan respons kebijakan yang lebih *countercyclical*, antara lain dengan memitigasi risiko pengetatan kredit yang berlebihan pada saat kebijakan moneter ketat, sekaligus menjaga ekspansi kredit yang berlebihan pada saat kebijakan yang lebih longgar. Dengan pendekatan ini, dinamika siklus keuangan dapat tetap terjaga selaras dengan siklus ekonomi dan mendukung efektivitas pencapaian sasaran kebijakan Bank Indonesia.

2) **Pengembangan Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (BI-ETP)**

Bank Indonesia terus memperkuat infrastruktur dan kerangka kerja pendukung pelaksanaan operasi moneter (OM) untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik. Efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter melalui OM memerlukan dukungan pasar keuangan yang dalam dan efisien. Salah satu upaya yang ditempuh adalah pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang semakin andal, efisien dan aman, memenuhi prinsip 3i (*integrated, interconnected, dan interoperable*), dan sejalan dengan standar internasional.

Pengembangan IPK diarahkan untuk mendukung pelaksanaan OM *Pro-Market* melalui pengembangan BI-ETP sebagai *platform* lelang penerbitan SVBI/SUVBI dan *reissuance* SVBI/SUVBI dalam pelaksanaan OM *Pro-Market*. BI-ETP dikembangkan untuk memperkuat mekanisme yang sebelumnya memanfaatkan *market operator* sebagai *trading platform*. Mengacu pada praktik umum berbagai bank sentral dalam membangun infrastruktur operasi moneter yang modern, *platform* elektronik tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga mendukung integrasi proses transaksi, setelmen, penatausahaan surat berharga, pelaporan, dan pengelolaan data secara terpusat. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia mengembangkan BI-ETP untuk mendukung penerbitan dan *reissuance* SVBI/SUVBI secara lebih terintegrasi. Pengembangan BI-ETP memungkinkan proses penerbitan instrumen terhubung dengan berbagai sistem terkait, seperti Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Bank Indonesia *Front Office-Middle Office-Back Office* (BI FOMOBO), *Historical and Real Time Information System* (HARTIS), dan *Service-Oriented Architecture* (SOA), dan *Enterprise Data Warehouse* (EDW). Integrasi ini memperkuat keterhubungan proses bisnis OM secara *end-to-end* serta meningkatkan efisiensi dan keandalan pelaksanaannya.

Penguatan infrastruktur diharapkan mendukung terbentuknya pasar uang yang semakin dalam, likuid, transparan, dan efisien, termasuk pasar uang syariah. Pada akhirnya, pengembangan BI-ETP akan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mendukung stabilitas sistem keuangan, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3) **Digitalisasi Proses Bisnis Statistik**

Kebutuhan terhadap data dan informasi yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan dinamika ekonomi dan keuangan serta pesatnya perkembangan teknologi digital. Data dan informasi yang berkualitas menjadi fondasi dalam mendukung perumusan dan pelaksanaan BKBI. Hal ini sekaligus mendukung komitmen Bank Indonesia dalam penyediaan data dan informasi ekonomi kepada publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia melanjutkan transformasi proses bisnis statistik secara *end-to-end* yang telah diinisiasi sejak 2024. Transformasi mencakup aspek teknologi dan nonteknologi pada seluruh tahapan, mulai dari perolehan, pemrosesan, hingga diseminasi data. Inisiatif tersebut didukung oleh *overarching activities* (aktivitas pendukung) untuk memperkuat tata kelola, kualitas, dan pemanfaatan data sebagai aset strategis.

Dari sisi perolehan data, pada triwulan II 2026 Bank Indonesia melanjutkan penguatan pada sejumlah aplikasi pelaporan dan sarana pertukaran data antarlembaga. Langkah ini ditujukan untuk merespons kebutuhan data dan informasi yang semakin kompleks, sekaligus mewujudkan proses perolehan data yang lebih aman, *seamless*, terstandar, efisien, dan bertata kelola. Inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia serta implementasi kebijakan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Penguatan antara lain dilakukan melalui pengaliran data antarlembaga serta penyempurnaan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD) Bank, Laporan Derivatif Pasar Uang dan

Pasar Valuta Asing (PUVA), Laporan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR), dan pelaporan lainnya, termasuk untuk mendukung implementasi *Straight-Through Processing* (STP).

Dari sisi pemrosesan dan diseminasi, integrasi input ke Pusat Data terus dikembangkan sebagai fondasi digitalisasi pengelolaan data yang andal, terintegrasi, dan terstandar. Peningkatan kapabilitas teknologi diarahkan untuk menyederhanakan alur kerja, mengurangi potensi kesalahan, serta meningkatkan pemanfaatan data dalam mendukung pengambilan kebijakan. Bank Indonesia juga menginisiasi *framework* kodifikasi dan metadata statistik yang mengacu pada *international best practices* untuk memperkuat standardisasi, interoperabilitas, dan konsistensi pengelolaan data.

Tata kelola dan kualitas data statistik turut diperkuat melalui pengembangan berbagai tools quality assurance. Pengembangan antara lain memanfaatkan Statistical Data and Metadata eXchange (SDMx) untuk menjaga kualitas dan integritas data serta memperluas pemanfaatannya. Bank Indonesia juga melanjutkan penguatan metodologi statistik dan pengembangan indikator, antara lain melalui pemanfaatan data sintetik, penguatan metodologi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan survei, serta penguatan statistik sektor domestik dan eksternal. Keseluruhan inisiatif tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem statistik yang modern, terintegrasi, dan bertata kelola, sehingga mampu menyediakan data berkualitas secara lebih efektif dan efisien untuk mendukung perumusan kebijakan serta memenuhi kebutuhan pengguna data.

4) **Penguatan Ketentuan Pengelolaan Cadangan Devisa Negara**

Bank Indonesia terus memperkuat kerangka kerja kebijakan moneter melalui upaya penyempurnaan peraturan dalam rangka menjaga keselarasan antarperaturan dengan BKBI. Penyempurnaan ini diharapkan mampu memperkuat landasan hukum dan efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter yang sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia telah melakukan penguatan ketentuan internal mengenai pengelolaan cadangan devisa negara untuk mendukung tata kelola yang lebih baik. Penguatan tersebut selaras dengan pengelolaan cadangan devisa yang lebih *agile* dengan tetap mengedepankan *preserved value*, di tengah perkembangan lingkungan strategis global yang volatil dan penuh ketidakpastian. Dengan kerangka yang semakin adaptif, pengelolaan cadangan devisa dapat merespons secara lebih dinamis dengan tetap menjaga aspek tata kelola dan kecukupan cadangan devisa dalam jangka menengah, sekaligus memenuhi kebutuhan jangka pendek untuk pelaksanaan kebijakan moneter dan pemenuhan kewajiban internasional.

5) **Pengembangan Data/AI Area Moneter**

a) **Pengembangan Analisis Berbasis Data dan AI untuk Mendukung Perumusan Kebijakan**

Dinamika perekonomian yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian mendorong Bank Indonesia untuk semakin memperkuat proses asesmen dan perumusan kebijakan yang cepat, akurat, dan *forward-looking*. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan data, Bank Indonesia melanjutkan transformasi analisis berbasis data melalui digitalisasi dan integrasi data serta pemanfaatan AI dan *machine learning*. Penerapan tersebut antara lain mencakup pengembangan *Report Generator* untuk meningkatkan efisiensi penyusunan laporan dan *Sentiment Analysis* untuk menangkap perkembangan sentimen berita yang relevan bagi asesmen kebijakan. Upaya ini diarahkan untuk menghasilkan informasi dan *insight* yang lebih komprehensif dan tepat waktu guna mendukung perumusan kebijakan.

Pada triwulan II 2026, transformasi tersebut antara lain diwujudkan melalui pengembangan *nowcasting* inflasi *volatile food* (VF) berbasis indeks sentimen berita. Inflasi VF memiliki karakteristik yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat berubah dengan cepat, antara lain gangguan pasokan, cuaca ekstrem, dan faktor musiman, sehingga memberikan tantangan dalam proses asesmen dan proyeksi. Informasi mengenai potensi tekanan harga pangan juga sering kali muncul lebih awal dalam pemberitaan media sebelum tecermin pada perkembangan harga di tingkat ritel, antara lain berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) maupun data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Selain itu, sentimen pemberitaan dapat memengaruhi persepsi dan ekspektasi harga pelaku ekonomi sehingga memberikan informasi tambahan dalam menangkap dinamika inflasi. Dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut, indeks sentimen berita dimanfaatkan untuk menangkap sinyal dini tekanan harga secara *real-time* guna memperkuat *nowcasting* dan meningkatkan akurasi asesmen inflasi VF.

Pemanfaatan indeks sentimen berita tersebut menjadi salah satu *use case* dalam perluasan

penerapan AI dan *machine learning* pada proses analisis kebijakan moneter. Pengembangan lainnya mencakup asesmen dan proyeksi berbagai indikator ekonomi, analisis pasar keuangan dengan *Generative AI*, serta digitalisasi dan integrasi berbagai sumber data. Berbagai inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses analisis serta memperkuat kecepatan, kedalaman, dan akurasi asesmen dalam mendukung perumusan kebijakan moneter Bank Indonesia yang lebih responsif dan adaptif.

b) **Pengembangan Analisis *Nowcasting* untuk Memperkuat Asesmen Ekonomi**

Bank Indonesia juga melakukan eksplorasi dan pengembangan eksperimental pemanfaatan AI dan *machine learning* untuk menangkap dinamika perekonomian secara lebih dini dan granular. Pengembangan memanfaatkan beragam sumber data, termasuk data berfrekuensi tinggi dan data alternatif, sebagai pelengkap indikator dan metode analisis yang telah digunakan.

Pada triwulan II 2026, pengembangan tersebut mencakup analisis dinamika *supply-demand* valas untuk memperkaya asesmen kondisi pasar valas, serta perluasan pemanfaatan data transaksi pembayaran dan perkembangan investasi, termasuk proyek infrastruktur strategis. Berbagai inisiatif tersebut diarahkan untuk memperkuat kapabilitas analisis dalam mendukung asesmen dan perumusan kebijakan Bank Indonesia yang semakin antisipatif, responsif, dan berorientasi ke depan.

4.1.2. Transformasi di Bidang Makroprudensial

Bank Indonesia terus mempertajam transformasi kebijakan makroprudensial dan mengimplementasikannya secara bertahap untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika perekonomian dan sistem keuangan yang semakin kompleks. Transformasi di bidang makroprudensial ditempuh melalui penyempurnaan konsepsi dan kerangka kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sesuai amanat UU P2SK. Penguatan antara lain mencakup penyempurnaan pengaturan pengelolaan likuiditas perbankan dan perekonomian agar semakin responsif terhadap dinamika dan risiko sistem keuangan, serta penguatan kerangka perumusan kebijakan makroprudensial. Langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan kebijakan makroprudensial yang semakin terintegrasi, efektif, dan adaptif dalam memitigasi risiko sistemik, memperkuat ketahanan sistem keuangan, serta mendorong intermediasi yang optimal dan berkelanjutan.

1) **Pengembangan Kerangka Kerja dan Konsepsi Area Makroprudensial**

a) **Penguatan Kerangka Kerja Transmisi Kebijakan pada Sektor Perbankan dan IKNB**

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia mengembangkan kerangka *macrofinancial linkage* yang mengintegrasikan transmisi dan *interlink* kebijakan moneter dan makroprudensial dalam pengelolaan likuiditas perbankan. Dari sisi makroprudensial, pengelolaan likuiditas diarahkan untuk mendorong ekspansi intermediasi, mengurangi segmentasi likuiditas antarbank, serta mempercepat pendalaman pasar uang, dengan tetap mendukung penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas. Arah kebijakan tersebut antara lain diwujudkan melalui penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Sebagai bagian dari penyempurnaan KLM, Bank Indonesia menetapkan KLM Pendalaman Pasar Uang (KLM PPU) untuk memperkuat pengelolaan likuiditas sekaligus mendorong pendalaman pasar uang. KLM PPU menggantikan KLM *interest rate channel* dan *financing-to-funding channel*, dengan alokasi paling tinggi sebesar 2,0% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Insentif diberikan kepada bank yang menjaga rasio kepemilikan surat berharga pada tingkat optimal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Implementasi KLM PPU menjadi bagian dari penguatan sinergi kebijakan moneter dan makroprudensial yang semakin terintegrasi dan *forward-looking*. Integrasi diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara pengelolaan likuiditas, intermediasi perbankan, pendalaman pasar uang, dan transmisi kebijakan ke sektor riil. Kerangka *macrofinancial linkage* yang semakin terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan likuiditas perbankan dan transmisi kebijakan, sekaligus memperkuat resiliensi sistem keuangan dalam menghadapi dinamika perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global maupun domestik.

b) **Penguatan Kerangka Kerja Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan Makroprudensial**

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan penguatan kerangka koordinasi dan komunikasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan dan mendukung

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan dilakukan melalui harmonisasi perumusan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta komunikasi kebijakan yang efektif dan kredibel. Upaya tersebut diarahkan untuk membangun ekspektasi dan persepsi pelaku ekonomi yang selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

Implementasi kerangka koordinasi tersebut antara lain diwujudkan melalui program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) untuk mengakselerasi intermediasi dan pembiayaan kepada sektor riil. Program PINISI mencakup tiga bagian, yaitu *building confidence and information* untuk mengurangi kesenjangan informasi dan memperkuat keyakinan pelaku ekonomi, *program alignment and debottlenecking* untuk menyelaraskan program lintas lembaga, mengidentifikasi, dan memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan, serta *financing facilitation and project matching* untuk mengurangi *matching friction* antara kebutuhan pembiayaan sektor riil dan kapasitas pendanaan. Keseluruhan program tersebut membentuk rangkaian penguatan intermediasi secara terintegrasi, mulai dari peningkatan keyakinan pelaku ekonomi, penguatan *bankability* proyek, hingga terciptanya peluang pembiayaan yang dapat ditindaklanjuti. Melalui PINISI, Bank Indonesia diharapkan dapat mengakselerasi intermediasi yang optimal, seimbang, dan inklusif guna mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Boks.1: Penguatan Sinergi *Supply* dan *Demand* kredit melalui PINISI

Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026 di Jakarta.

Upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan investasi dan kapasitas pembiayaan yang memadai, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Dalam kondisi tersebut, penguatan sumber pertumbuhan domestik perlu didukung oleh intermediasi yang optimal, seimbang, dan inklusif serta penyaluran pembiayaan yang semakin efektif kepada sektor produktif. Untuk itu, Bank Indonesia bersama Pemerintah, otoritas terkait, perbankan, investor, dan pelaku usaha terus memperkuat sinergi guna membangun optimisme pelaku ekonomi, mengakselerasi pembiayaan sektor riil, serta mengatasi berbagai hambatan intermediasi.

Sinergi tersebut antara lain diwujudkan melalui program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026 yang diluncurkan pada 27 April 2026 di Bank Indonesia, Jakarta. *Kick-off* PINISI dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), Danantara, perbankan serta pelaku usaha. PINISI diarahkan untuk memperkuat sisi permintaan (*demand side*) intermediasi melalui peningkatan keyakinan pelaku usaha, fasilitasi pembiayaan proyek prioritas, serta penyelesaian berbagai hambatan yang membatasi penyaluran pembiayaan ke sektor produktif.

Penguatan intermediasi menjadi semakin penting mengingat masih terdapat ruang yang luas untuk mengoptimalkan kapasitas pembiayaan perbankan. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan, termasuk melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial

(KLM) untuk mendorong penyaluran kredit kepada sektor prioritas dan mempercepat penurunan suku bunga kredit. Upaya tersebut diperkuat melalui sinergi dengan kebijakan Pemerintah dalam mendorong pembiayaan sektor produktif. Sinergi kebijakan diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antara kapasitas pendanaan sektor keuangan dan kebutuhan pembiayaan sektor riil, termasuk UMKM dan sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja.

Implementasi PINISI dilakukan melalui pendekatan kolaboratif untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan dengan sumber pendanaan sekaligus menyelesaikan berbagai hambatan intermediasi. Rangkaian *kick-off* PINISI dilakukan melalui seminar nasional, *policy dialogue*, dan *showcasing* proyek dan program prioritas Pemerintah. Implementasi PINISI selanjutnya terus diperluas di tingkat pusat dan daerah, antara lain melalui penyelesaian hambatan pembiayaan proyek strategis bersama Danantara, fasilitasi kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional bersama Bappenas, serta penguatan keterhubungan korporasi dan UMKM bersama KADIN.

Hingga triwulan II 2026, berbagai implementasi PINISI telah menunjukkan perkembangan positif, antara lain melalui terbentuknya komitmen pembiayaan, penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta fasilitasi penyelesaian hambatan intermediasi pada sektor-sektor prioritas. Sebagai program yang baru diluncurkan pada 2026, perkembangan tersebut memberikan indikasi awal bahwa pendekatan *debottlenecking*, penguatan koordinasi, serta *matching* lintas pemangku kepentingan dapat membantu menjembatani kebutuhan pembiayaan sektor riil dengan kapasitas pendanaan lembaga keuangan.

Ke depan, implementasi PINISI akan terus diperluas dan diperkuat dengan mengoptimalkan sinergi Bank Indonesia, Pemerintah, otoritas terkait, industri keuangan, pelaku usaha, dan investor. Tindak lanjut berbagai inisiatif juga akan terus dipantau secara terukur untuk memastikan efektivitasnya dalam mendorong penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif. Melalui penguatan bauran kebijakan dan sinergi PINISI, Bank Indonesia berkomitmen untuk mengakselerasi intermediasi yang optimal, seimbang, dan inklusif guna memperkuat sumber pertumbuhan domestik dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

c) **Penyusunan Kajian terkait Sinergi Kebijakan OM *Pro Market* dan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) untuk Memperkuat Resiliensi Sistem Keuangan**

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia menyusun kajian kebijakan makroprudensial yang selaras dengan penguatan strategi OM *Pro-Market* dan pendalaman PUVA. Sebagai bagian dari pengembangan konsepsi di area makroprudensial, kajian tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas transmisi, khususnya melalui pengelolaan likuiditas yang lebih efisien dan optimalisasi pemanfaatan instrumen pasar keuangan domestik. Sejalan dengan itu, pendalaman PUVA terus didorong melalui pengembangan instrumen, perluasan basis investor dan pelaku pasar, serta peningkatan volume dan frekuensi transaksi.

Sinergi kebijakan makroprudensial, OM *Pro-Market*, dan pendalaman PUVA juga diarahkan untuk memperkuat resiliensi sistem keuangan. Pasar keuangan yang semakin dalam dan likuid dapat menyediakan alternatif pengelolaan likuiditas dan risiko bagi pelaku pasar, sekaligus memperkuat kapasitas sistem keuangan dalam menyerap tekanan yang bersumber dari dinamika global maupun domestik. Penguatan tersebut akan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan dan efisiensi pasar keuangan, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2) **Penguatan Ketentuan Area Makroprudensial**

Bank Indonesia memperkuat kerangka kerja kebijakan makroprudensial melalui penyempurnaan pengaturan yang selaras dengan BKBI. Penyempurnaan ini menjadi landasan hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang makroprudensial sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Amandemen Undang-Undang P2SK. Sebagai bagian dari pelaksanaan BKBI, Bank Indonesia juga terus memperkuat pengaturan terkait pengelolaan likuiditas perbankan dan perekonomian sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. Reformasi regulasi makroprudensial dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam UU P2SK. Penguatan ini mencakup penyempurnaan kerangka kebijakan, penguatan instrumen, serta pengembangan mekanisme implementasi yang lebih efektif dan *forward-looking*.

a) **Penguatan Ketentuan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank**

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan melalui penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank. Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan makroprudensial melalui peningkatan parameter kontrasiklikal sebagai penambah rasio pendanaan luar negeri bank guna mendorong sumber pendanaan luar negeri jangka pendek bank sesuai kebutuhan perekonomian dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.

b) **Penguatan Ketentuan Resolusi Bank**

Bank Indonesia tengah menyusun Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait hubungan operasional bank dalam Resolusi (BDR) dengan Bank Indonesia dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. PBI tersebut mengatur perumusan dan pelaksanaan penanganan BDR di Bank Indonesia agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang untuk mendukung resolusi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penyusunan kebijakan resolusi bank juga bertujuan memperkuat mitigasi risiko sistemik serta mendukung stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan yang selaras dengan perkembangan dinamika sektor keuangan dan kebutuhan pengelolaan krisis.

3) **Pengembangan Data/AI Area Makroprudensial**

a) **Pengembangan Integrasi dan Standardisasi Data untuk Mendukung Perumusan Kebijakan**

Bank Indonesia melanjutkan penguatan integrasi data untuk meningkatkan kapabilitas asesmen dan surveilans makroprudensial yang lebih granular dan *forward-looking*. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan berbagai analisis dengan memanfaatkan AI, antara lain untuk menguji ketahanan perbankan terhadap berbagai skenario tekanan secara lebih granular (*granular stress test* dan *cash flow projection*) dan mendukung identifikasi dini terhadap prospek arus kas dan kondisi likuiditas perbankan (*granular stress test*).

Pengembangan analisis *use case* tersebut didukung oleh penyeragaman kode dan informasi mengenai karakteristik data, sehingga data dari berbagai sumber dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan secara konsisten dalam proses perumusan kebijakan. Penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan surveilans dalam mengidentifikasi secara dini sumber kerentanan, keterkaitan risiko, serta potensi tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan. Hasil asesmen selanjutnya menjadi masukan dalam mendukung perumusan kebijakan makroprudensial yang lebih responsif dan *forward-looking*.

b) **Pengembangan Analisis untuk Memperkirakan Perkembangan Pendanaan Perbankan**

Bank Indonesia memperluas pemanfaatan AI dan *machine learning* dalam perumusan kebijakan melalui pengembangan model untuk memperkirakan perkembangan pendanaan perbankan. Pada triwulan II 2026, pengembangan difokuskan pada pemanfaatan pola historis Dana Pihak Ketiga (DPK), pinjaman yang diterima, dan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank untuk memperkirakan arah sumber pendanaan hingga enam bulan ke depan. Hasilnya diharapkan dapat mendukung asesmen terhadap dinamika pendanaan dan likuiditas perbankan, termasuk mendeteksi perubahan yang berpotensi memengaruhi kemampuan intermediasi dan ketahanan sistem keuangan.

c) **Pemanfaatan AI untuk Menganalisis Sentimen terhadap Sektor Perbankan**

Bank Indonesia mengeksplorasi pemanfaatan AI untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap sektor perbankan. Pada tahap ini, Bank Indonesia mengidentifikasi kebutuhan analisis dan sumber data yang relevan sebagai landasan pengembangan model. Hasil analisis diharapkan dapat melengkapi indikator kuantitatif yang telah tersedia dan memperkaya asesmen ketahanan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung perumusan kebijakan makroprudensial yang lebih responsif dan berorientasi ke depan.

4.1.3. Transformasi di Bidang Sistem Pembayaran

Bank Indonesia terus mendorong transformasi sistem pembayaran untuk mewujudkan ekosistem pembayaran nasional yang semakin terintegrasi, inovatif, aman, efisien, dan berdaya tahan, seiring dengan akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Transformasi tersebut dilaksanakan sejalan dengan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025–2030 melalui reformasi regulasi dan penguatan kerangka kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, inovasi, dan kebutuhan ekosistem. Agenda transformasi mencakup pengembangan dan modernisasi

infrastruktur sistem pembayaran, termasuk infrastruktur data, penguatan struktur dan daya saing industri, pengembangan inovasi dan perluasan akseptasi pembayaran digital, peningkatan konektivitas sistem pembayaran lintas negara, serta pengembangan Rupiah Digital. Keseluruhan langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1) **Pengembangan Infrastruktur dan Digitalisasi Sistem Pembayaran**

Pada triwulan II 2026, transformasi digital sistem pembayaran terus dilakukan melalui pengembangan infrastruktur ritel dan *wholesale*, Rupiah Digital, dan Sistem Informasi Pengelolaan Uang Rupiah (SI-PUR) Terintegrasi, serta penguatan inovasi dan pengembangan talenta digital. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi, baik di dalam maupun di luar negeri, secara lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal melalui penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur sistem pembayaran ritel dan *wholesale*. Pada sisi ritel, penguatan dilakukan melalui pengembangan BI-FAST serta sinergi dengan industri dalam pengembangan *fast payment*. Pada sisi *wholesale*, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan BI-RTGS untuk mendukung transaksi bernilai besar yang semakin efisien, aman, dan terintegrasi. Berbagai pengembangan tersebut merupakan bagian dari penguatan *Integrated Digital Payment System* (IDPS) untuk mewujudkan ekosistem sistem pembayaran dan pasar keuangan yang semakin terintegrasi, andal, dan adaptif. Sejalan dengan itu, pengembangan Rupiah Digital terus dilanjutkan melalui pendalaman *Wholesale Securities Ledger*, disertai penguatan peran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) dalam mendorong inovasi dan pengembangan talenta digital, serta transformasi digital pengelolaan uang Rupiah melalui pengembangan SI-PUR Terintegrasi.

a) **Pengembangan *New* BI-FAST dan Standar Layanan IN-FAST**

Bank Indonesia terus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran ritel melalui pengembangan *New* BI-FAST dan sinergi dengan infrastruktur *fast payment* yang diselenggarakan oleh industri (IN-FAST). Penguatan tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem *fast payment* nasional yang semakin terintegrasi, interoperabel, aman, dan berdaya tahan. Dalam kerangka tersebut, New BI-FAST dikembangkan untuk memperkuat infrastruktur yang diselenggarakan Bank Indonesia, sementara standardisasi IN-FAST dilakukan untuk memastikan kesetaraan kualitas layanan yang diselenggarakan oleh industri.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan *New* BI-FAST dengan fokus pada peningkatan kapasitas, kapabilitas, serta ketahanan infrastruktur. Pengembangan mencakup peningkatan kapasitas pemrosesan transaksi, penguatan keandalan dan ketahanan operasional, serta peningkatan kapabilitas pengelolaan risiko, *fraud detection*, dan keamanan siber. Penguatan tersebut ditujukan untuk memastikan *New* BI-FAST mampu memenuhi kebutuhan transaksi ritel yang terus berkembang dengan tetap menjaga keamanan dan keandalan layanan.

Secara paralel, Bank Indonesia bersinergi dengan industri dalam menyusun standar layanan IN-FAST sebagai acuan penyelenggaraan *fast payment* oleh industri. Standardisasi mencakup antara lain aspek ketersediaan layanan, kecepatan pemrosesan transaksi, keamanan, manajemen risiko, pelindungan konsumen, serta mekanisme penanganan gangguan dan pengaduan. Sinergi pengembangan *New* BI-FAST dan standardisasi IN-FAST diharapkan dapat memperkuat interkoneksi dan interoperabilitas infrastruktur, menjamin kesetaraan kualitas layanan, serta mewujudkan ekosistem pembayaran ritel yang semakin konsolidatif dan berdaya tahan. Ke depan, penguatan tersebut diharapkan dapat mendukung penyediaan layanan pembayaran yang semakin cepat, mudah, murah, aman, dan andal bagi masyarakat.

b) **Pengembangan Infrastruktur BI-RTGS Gen III Fase 1**

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur sistem pembayaran guna mendukung perkembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang semakin dinamis. Langkah yang diambil antara lain melalui diskusi dengan industri sistem pembayaran dan internal Bank Indonesia dalam pengembangan fitur dan layanan BI-RTGS ke depan, serta integrasi pengembangan dengan infrastruktur BI-SSSS. Pengembangan BI-RTGS terus dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas sistem pembayaran nilai besar yang lebih modern, resilien, dan mampu mendukung kebutuhan transaksi yang semakin kompleks. Pengembangan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat efisiensi, interoperabilitas,

dan kesiapan infrastruktur dalam mendukung transformasi Sistem Pembayaran nasional secara berkelanjutan.

c) **Pengembangan Rupiah Digital**

Penguatan infrastruktur pasar keuangan terus dilanjutkan melalui eksperimentasi Rupiah Digital dengan pendalaman *Wholesale Securities Ledger*. Inisiatif tersebut merupakan perluasan *use case* Rupiah Digital (*cash ledger*) yang telah selesai diuji coba. Pendalaman dilakukan dengan mengembangkan *use case* yang melibatkan penyelesaian dana dan transaksi surat berharga, dan diarahkan untuk mendukung infrastruktur transaksi keuangan yang semakin efisien, transparan, aman, dan terintegrasi, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan instrumen dan mekanisme transaksi keuangan yang lebih modern.

Pada triwulan II 2026, pendalaman *Wholesale Securities Ledger* dilanjutkan melalui eksplorasi dan *benchmarking* terhadap pengembangan serta *use case Wholesale Cash Ledger* di berbagai negara. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh referensi mengenai desain, model implementasi, dan praktik yang relevan sebagai masukan bagi pengembangan Rupiah Digital di Indonesia. Bank Indonesia juga mulai menyusun konsep kepesertaan sebagai bagian dari penyiapan kerangka implementasi ke depan. Penyusunan tersebut mempertimbangkan kebutuhan ekosistem, peran para pihak, serta aspek tata kelola dan operasional yang diperlukan untuk mendukung implementasi ke depan.

d) **Pengembangan *Integrated Digital Payment System* (IDPS)**

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan dan modernisasi infrastruktur sistem pembayaran dan pasar keuangan untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi, keamanan, dan keandalan layanan. Pada pembayaran ritel, pengembangan BI-FAST dilanjutkan melalui penyempurnaan kapabilitas dan penyiapan implementasi layanan ke depan. Sementara itu, modernisasi BI-RTGS dan BI-SSSS memasuki tahap penguatan desain dan kebutuhan fungsional sebagai bagian dari penyiapan infrastruktur generasi berikutnya. Modernisasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi bernilai besar serta penyelesaian transaksi surat berharga, sekaligus mengakomodasi perkembangan kebutuhan industri keuangan.

Penguatan IDPS juga mencakup digitalisasi pelaksanaan Operasi Moneter melalui pengembangan transaksi repo Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Pada triwulan II 2026, pengembangan difokuskan pada penyiapan mekanisme transaksi repo valas yang terintegrasi dengan proses perdagangan, setelmen surat berharga, dan setelmen dana. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan daya tarik SVBI/SUVBI di pasar sekunder, mendukung pendalaman pasar keuangan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan likuiditas dan transmisi kebijakan moneter.

e) **Pengembangan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI)**

Sejalan dengan akselerasi transformasi digital sistem pembayaran, Bank Indonesia terus memperkuat peran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) sebagai wadah kolaborasi dalam mendorong inovasi dan pengembangan talenta digital. Peran ini diwujudkan melalui eksplorasi inovasi, penyelenggaraan *hackathon*, pengembangan kapabilitas talenta, serta pemanfaatan pendekatan *design thinking* dan *market intelligence*. Berbagai inisiatif tersebut diarahkan untuk mendorong lahirnya solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri serta mendukung terbentuknya ekosistem digital yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan talenta digital melalui rangkaian PIDI DIGDAYA x HACKATHON.[1] Program dilaksanakan melalui rangkaian webinar dan *instructor-led training* secara luring di Jakarta, Makassar, Medan, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung, serta diikuti oleh peserta dari berbagai daerah lainnya, termasuk Palu dan Kupang. Pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi talenta digital sekaligus memperluas jangkauan ekosistem inovasi di berbagai daerah.

1 PIDI DIGDAYA x HACKATHON merupakan inisiatif nasional yang dirancang sebagai kompetisi sekaligus upaya untuk memperkuat kualitas inovasi, serta menghasilkan talenta dan solusi digital yang siap diimplementasikan dan berdampak bagi perekonomian Indonesia https://www.bi.go.id/id/pidi/default.aspx.

Peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) DIgdaya x Hackathon di Jakarta.

Kolaborasi PIDI juga diperluas melalui Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD dan Digital Talenta Berdaya dan Berkarya (KATALIS P2DD x DIGDAYA) untuk mendukung percepatan transformasi digital Pemerintah Daerah. Kolaborasi tersebut merupakan inisiatif strategis pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat integrasi layanan digital pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas pendampingan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial. Melalui penguatan kapabilitas talenta dan perluasan kolaborasi tersebut, PIDI diharapkan dapat menjadi katalis pengembangan inovasi digital yang mendukung transformasi sistem pembayaran dan digitalisasi ekonomi secara berkelanjutan.

f) **Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Uang Rupiah Terintegrasi**

Bank Indonesia terus memperkuat transformasi digital pengelolaan uang Rupiah melalui pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Uang Rupiah (SI-PUR) terintegrasi. Pengembangan tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan data dan sistem secara *end-to-end*, sekaligus meningkatkan kualitas, konsistensi, dan ketersediaan data. Penguatan ini diharapkan dapat mendukung proses bisnis dan perumusan kebijakan PUR yang lebih efektif, akurat, dan tepat waktu dengan didukung tata kelola data yang semakin baik.

Pada triwulan II 2026, pengembangan SI-PUR Terintegrasi mencakup tiga area utama, yaitu pembangunan *Digital Collaborative Platform*, **integrasi data operasional, dan pengembangan kapabilitas analitik.** *Digital Collaborative Platform* dikembangkan untuk memperkuat kolaborasi dan pertukaran informasi dalam ekosistem PUR. Sementara itu, integrasi data operasional dilakukan melalui keterhubungan antara mesin perkasan dan pusat data PUR. Pengembangan juga dilengkapi dengan *analytical tools* sebagai *Executive Decision Support* untuk memperkuat pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Sejalan dengan luasnya ekosistem PUR, SI-PUR Terintegrasi dirancang untuk mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai pemangku kepentingan. Ekosistem tersebut mencakup antara lain penyedia bahan baku uang, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI), perbankan, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL), serta pihak terkait lainnya. Integrasi tersebut diarahkan untuk membentuk *single source of truth* sehingga data dapat dikelola secara konsisten, akurat, dan terpadu sebagai basis pelaksanaan operasional maupun perumusan kebijakan PUR.

Sebagai implementasi awal (*quick wins*), pengembangan SI-PUR Terintegrasi difokuskan pada otomasi pengaliran data layanan kas dan pengolahan uang. Implementasi dilakukan melalui mekanisme *streaming* data secara otomatis dari mesin perkasan menuju *Data Mart* Pengelolaan Uang Rupiah sehingga dapat mengurangi intervensi manual dalam proses pencatatan (*recording*). Otomasi tersebut diharapkan dapat

meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan data operasional, sekaligus menjadi fondasi bagi pengembangan kapabilitas analitik dan pemantauan operasional secara *real-time*.

Ke depan, pengembangan SI-PUR Terintegrasi juga diperkuat melalui pemanfaatan AI dan *machine learning*, antara lain untuk mendukung perencanaan dan estimasi kebutuhan uang Rupiah secara lebih presisi dan akurat. Secara keseluruhan, pengembangan SI-PUR Terintegrasi diharapkan membentuk ekosistem data PUR yang semakin terintegrasi, adaptif, dan berbasis analitik, sehingga memperkuat efektivitas pengelolaan uang Rupiah serta mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan andal.

2) **Penguatan Ketentuan Data Sistem Pembayaran**

Bank Indonesia terus menyempurnakan kerangka regulasi sistem pembayaran untuk mendukung stabilitas, efisiensi, dan integrasi sistem pembayaran nasional. Penguatan regulasi dilakukan secara responsif dan *forward-looking*, sejalan dengan Bauran Kebijakan Bank Indonesia dan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Langkah tersebut diarahkan untuk merespons perkembangan teknologi dan dinamika ekosistem digital, termasuk meningkatnya peran strategis data dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan penyusunan kerangka Peraturan Bank Indonesia mengenai Data Sistem Pembayaran (PBI Data SP) sebagai landasan penguatan tata kelola data yang terintegrasi. Kerangka pengaturan mencakup aspek pengumpulan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pertukaran data guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penyusunan PBI Data SP juga mempertimbangkan perkembangan ekosistem pembayaran yang semakin terdigitalisasi serta kebutuhan pemanfaatan data yang semakin luas dan kompleks. PBI Data SP diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi terwujudnya ekosistem data Sistem Pembayaran yang terintegrasi, andal, aman, dan berkualitas. Penguatan tata kelola dan pemanfaatan data tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendukung asesmen, perumusan kebijakan, dan pengawasan Sistem Pembayaran yang semakin efektif, tepat sasaran, dan berbasis data.

3) **Pengembangan Data Sistem Pembayaran**

Bank Indonesia melanjutkan pengembangan infrastruktur data sistem pembayaran untuk mewujudkan pengelolaan data yang semakin granular, terintegrasi, andal, dan berkualitas. Pengembangan dilakukan secara *end-to-end* melalui penyempurnaan arsitektur dan standardisasi data, peningkatan kualitas pengelolaan data, serta integrasi berbagai sumber data sistem pembayaran. Langkah tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam mendukung pemantauan, asesmen, perumusan kebijakan, pengawasan, serta pengembangan inovasi sistem pembayaran.

Pada triwulan II 2026, pengembangan dilakukan melalui koordinasi dengan industri yang mencakup aspek bisnis, teknis, dan operasional. Koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan dan kesiapan Bank Indonesia dengan industri, sekaligus memperoleh masukan dalam penyempurnaan desain dan penyiapan implementasi. Pengembangan tersebut juga didukung oleh penguatan arsitektur, standardisasi, dan tata kelola data untuk memastikan integrasi dan pemanfaatan data dapat dilakukan secara konsisten dan efektif.

Secara keseluruhan, penguatan infrastruktur dan tata kelola data menjadi fondasi bagi terwujudnya ekosistem data sistem pembayaran yang terintegrasi, aman, andal, dan berkualitas. Dengan fondasi tersebut, data sistem pembayaran diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk meningkatkan kualitas asesmen, efektivitas pengawasan, dan ketepatan perumusan kebijakan. Penguatan ini sekaligus meningkatkan kapabilitas Bank Indonesia dalam merespons dinamika digitalisasi dan inovasi sistem pembayaran secara lebih efektif, responsif, dan berbasis data.

4.1.4. Transformasi di Bidang Kebijakan Pendukung

Bank Indonesia terus memperkuat transformasi kebijakan pendukung sebagai bagian integral dari Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang. Transformasi diarahkan pada penguatan kerangka kebijakan dan kapabilitas pendukung yang semakin terintegrasi, adaptif, dan berbasis data. Pada triwulan II 2026, transformasi di bidang kebijakan pendukung dilakukan dengan penguatan kebijakan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), kebijakan ekonomi dan keuangan daerah (KEKDA), serta pelindungan konsumen.

1) **Pengembangan Infrastruktur Kebijakan Pendukung**

Bank Indonesia terus memperkuat infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus mendorong pengembangan pasar keuangan domestik. Penguatan dilakukan melalui pengembangan

infrastruktur data untuk meningkatkan transparansi harga, serta pengembangan interkoneksi *Central Counterparty* (CCP) dengan *Electronic Trading Platform* (ETP) untuk memperkuat pelaksanaan transaksi dan penerbitan instrumen OM

a) **Pengembangan Infrastruktur Data dalam rangka Mendukung Transparansi Harga di Pasar Uang dan Pasar Uang Syariah**

Dari sisi infrastruktur data, pengembangan diarahkan untuk meningkatkan transparansi harga di pasar uang, termasuk pasar uang syariah. Ketersediaan informasi harga yang semakin transparan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembentukan harga (*price discovery*), memperkuat kepercayaan pelaku pasar, serta mendorong peningkatan aktivitas transaksi dan pendalaman pasar keuangan domestik.

b) **Pengembangan Repo Valas menggunakan *Underlying* SVBI/SUVBI**

Dari sisi infrastruktur transaksi, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan BI-ETP untuk mendukung transaksi repo valas dengan menggunakan SVBI/SUVBI serta penerbitan SVBI/SUVBI melalui BI-ETP. Pengembangan transaksi repo valas menggunakan SVBI/SUVBI merupakan bagian dari penguatan strategi Operasi Moneter dengan memperluas alternatif instrumen pengelolaan likuiditas valas. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pelaku pasar dalam mengelola kebutuhan likuiditas sekaligus mendukung efektivitas Operasi Moneter dan pendalaman pasar keuangan.

c) **Pengembangan Interkoneksi *Central Counterparty* (CCP) dengan *Electronic Trading Platform* (ETP)**

Bank Indonesia terus mendukung pengembangan dan penguatan *Central Counterparty* (CCP) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pasar keuangan. CCP berperan dalam menyediakan layanan kliring, penjaminan, dan manajemen risiko atas transaksi antarbank di PUVA. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memastikan pengembangan CCP yang diselenggarakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia serta mengacu pada standar internasional *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) yang diterbitkan oleh *Committee on Payments and Market Infrastructures–International Organization of Securities Commissions* (CPMI-IOSCO).

Sejalan dengan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030, penguatan CCP diarahkan untuk mewujudkan infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip 3i dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya. Salah satu implementasinya dilakukan melalui penguatan konektivitas CCP dengan *Electronic Trading Platform* (ETP) berbasis *straight-through processing*. Konektivitas tersebut memungkinkan proses transaksi berlangsung secara *end-to-end*, mulai dari eksekusi di ETP hingga proses kliring di CCP. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi risiko operasional, serta memperkuat kepastian penyelesaian transaksi di PUVA.

Sebagai bagian dari implementasi prinsip 3i tersebut, Bank Indonesia telah memberikan persetujuan interkoneksi antara CCP dan ETP. Selanjutnya, CCP dan ETP tengah mempersiapkan implementasi interkoneksi, antara lain melalui proses *onboarding* pengguna jasa serta *hands-on training* bagi anggota CCP. Implementasi tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Bank Indonesia dalam pengembangan infrastruktur PUVA yang semakin efisien, aman, andal, dan terintegrasi.

2) **Penguatan Ketentuan Area Kebijakan Pendukung**

a) **Penguatan Ketentuan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Bank Indonesia terus memperkuat kerangka regulasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) sebagai kebijakan pendukung dalam Bauran Kebijakan Bank Indonesia guna meningkatkan efektivitas perumusan dan implementasi kebijakan di daerah dengan tetap berlandaskan prinsip tata kelola yang baik. Penguatan KEKDA dilakukan melalui penajaman sasaran dan strategi yang selaras dengan implementasi kebijakan utama Bank Indonesia di daerah. Sasaran KEKDA diarahkan untuk mendukung pencapaian inflasi daerah yang rendah dan stabil, sistem pembayaran yang cepat, mudah, dan murah dengan struktur industri yang sehat, ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia menyempurnakan kerangka regulasi KEKDA untuk memperkuat perumusan dan implementasi kebijakan di daerah serta mendukung sinergi kebijakan nasional. Penyempurnaan tersebut dilakukan melalui penerbitan ketentuan internal

tentang Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Penguatan kerangka regulasi tersebut menjadi landasan bagi implementasi KEKDA dan kebijakan SP-PUR-MI di daerah yang konsisten dengan arah kebijakan utama Bank Indonesia sekaligus memperkuat sinergi kebijakan nasional.

Penyempurnaan kerangka regulasi KEKDA juga memperkuat penerapan tata kelola dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia di daerah. Pelaksanaannya mengacu pada prinsip sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi. Sejalan dengan prinsip tersebut, pelaksanaan KEKDA didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu: (i) bebas dari benturan kepentingan serta pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun; (ii) selaras dengan mandat dan norma dalam peraturan perundang-undangan dan/atau prosedur yang berlaku; (iii) menjadi bagian yang terintegrasi dengan bauran kebijakan nasional; serta (iv) menerapkan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan.

b) **Penguatan Ketentuan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia**

Bank Indonesia terus memperkuat kerangka pengaturan mengenai pelindungan konsumen Bank Indonesia untuk memastikan pelindungan konsumen yang semakin efektif dan sesuai dengan perkembangan sektor keuangan. Reformasi regulasi diarahkan untuk memperkuat landasan perumusan dan pelaksanaan dalam pelindungan konsumen sekaligus menjadi acuan bagi Penyelenggara dalam memenuhi kewajiban pelindungan konsumen. Penguatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK.

Penguatan PKBI mencakup tiga strategi utama, yaitu penguatan kerangka pengaturan, peningkatan perilaku penyelenggara (*market conduct*) yang bertanggung jawab, serta peningkatan keberdayaan konsumen. Ketiga strategi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan pelindungan konsumen sekaligus mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang semakin transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan konsumen.

Pada triwulan II 2026, penguatan kerangka regulasi diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia (PKBI) serta ketentuan internal sebagai pengaturan pelaksanaannya. Penerbitan ketentuan tersebut menjadi landasan bagi penguatan implementasi pelindungan konsumen dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia.

3) **Pengembangan Data Area Kebijakan Pendukung**

Bank Indonesia terus memperkuat pengelolaan dan infrastruktur data Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) untuk mendukung efektivitas kebijakan, pengawasan pasar, dan pendalaman pasar keuangan domestik. Penguatan dilakukan melalui pengembangan *capturing pricing* PUVA, metadata, serta infrastruktur *capturing* data PUVA melalui *Data Exchange Platform* (DEP). Inisiatif tersebut diarahkan untuk mengatasi fragmentasi sumber dan mekanisme perolehan data, sekaligus memperkuat tata kelola data PUVA secara *end-to-end*. Pengembangan ini diharapkan dapat menyediakan data harga dan transaksi yang lebih berkualitas, terintegrasi, *timely*, dan granular sebagai basis penguatan analisis, pengawasan pasar, serta perumusan kebijakan.

a) **Pengembangan Pusat Data *Capturing Pricing* PUVA**

Bank Indonesia mengembangkan inisiatif *capturing pricing* PUVA sebagai sarana pengumpulan dan pengolahan data harga transaksi secara *real time* atau mendekati *real time*. Infrastruktur ini memungkinkan tersedianya data harga yang lebih representatif, akurat, dan *real-time*, sehingga meningkatkan transparansi pasar dan mendukung proses *price discovery* yang lebih efisien.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan tahapan pengembangan *capturing pricing* dari sumber data *pricing* repo dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder untuk selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk kurva imbal hasil (*yield curve*) transaksi pasar uang. Inisiatif publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang sejalan dengan komitmen Bank Indonesia untuk melanjutkan reformasi suku bunga acuan domestik serta mendorong pengembangan menuju pasar keuangan yang modern, transparan, dan berbasis transaksi.

b) **Pengembangan Metadata PUVA**

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan identifikasi kebutuhan data transaksi PUVA sebagai bagian dari pengembangan DEP. Pada tahap awal, identifikasi antara lain mencakup transaksi *Domestic Non-Deliverable*

Forward (DNDF), *Overnight Index Swap* (OIS), dan *Repurchase Agreement* (Repo). Pengembangan DEP ditujukan untuk memperkuat mekanisme perolehan dan integrasi data transaksi sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam pemantauan aktivitas dan dinamika pasar.

Sejalan dengan hal pengembangan DEP, Bank Indonesia menyusun metadata pelaporan *online* sebagai landasan standardisasi dan harmonisasi data PUVA. Penyusunan metadata dilakukan untuk membangun keseragaman elemen dan struktur data, sekaligus meningkatkan konsistensi dan kualitas pelaporan transaksi. Sinergi pengembangan DEP dan standardisasi metadata tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya infrastruktur data PUVA yang semakin modern, transparan, dan terintegrasi. Penguatan ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan analisis pasar, mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, serta memperkuat pendalaman pasar keuangan domestik.

4.2 Transformasi Kelembagaan

Bank Indonesia terus memperkuat implementasi Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK) sebagai wujud penerapan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sesuai amanat UU P2SK. Penguatan tersebut dilakukan melalui strategi 3P, yaitu perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian yang terintegrasi pada seluruh area kelembagaan. Langkah ini ditempuh untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia tetap efektif, kredibel, dan adaptif di tengah dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks. Transformasi kelembagaan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi organisasi, tetapi juga untuk membangun institusi yang tangguh, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan.

Pada area organisasi dan proses kerja, transformasi difokuskan pada penguatan tata kelola yang terintegrasi, penyempurnaan kerangka perencanaan strategis, serta reformasi regulasi kelembagaan. Upaya tersebut didukung melalui penyederhanaan, standardisasi, dan digitalisasi proses bisnis guna mewujudkan proses kerja yang lebih ringkas, selaras, dan lincah. Sejalan dengan itu, penguatan landasan hukum dan pengelolaan informasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis didukung oleh ketentuan yang komprehensif, adaptif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Transformasi kelembagaan juga diperkuat melalui pengelolaan sumber daya manusia dan penguatan budaya kerja yang adaptif dan berkelanjutan. Pengelolaan SDM diarahkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara terencana dan berbasis data melalui peningkatan kualitas talenta, penguatan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan jabatan, serta pengembangan kapasitas kepemimpinan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat kapabilitas pegawai, digitalisasi layanan SDM, serta pengembangan Komunitas Inovasi Kecerdasan Artifisial (KIKA) guna mendorong produktivitas dan inovasi, sekaligus membangun lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

Seluruh penguatan tersebut didukung oleh transformasi digital yang terintegrasi melalui pengembangan ekosistem digital Bank Indonesia. Digitalisasi proses kerja, pemanfaatan AI, serta pengembangan *Integrated Digital Central Bank* (IDCB) dan *Integrated Digital Technology* (IDT) diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Dalam implementasinya, inovasi teknologi digital senantiasa diimbangi dengan penguatan tata kelola, keamanan informasi, serta manajemen risiko guna memastikan transformasi digital memberikan manfaat yang optimal sekaligus menjaga keandalan dan resiliensi organisasi.

4.2.1. Transformasi Organisasi dan Proses Kerja

Pada area organisasi dan proses kerja, Bank Indonesia terus memperkuat transformasi organisasi, proses kerja, dan tata kelola kelembagaan untuk mewujudkan organisasi yang semakin terintegrasi, efektif, adaptif, dan *agile* dalam mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia. Transformasi tersebut dilakukan melalui penyempurnaan fungsi dan desain organisasi, kerangka kerja, serta ketentuan internal sebagai tindak lanjut implementasi UU P2SK, yang didukung oleh penyederhanaan dan digitalisasi proses bisnis dan proses kerja secara *end-to-end*. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan proses kerja yang semakin sederhana, efisien, terstandar, kolaboratif, dan berbasis digital, sekaligus memperkuat kualitas tata kelola dan efektivitas pengambilan keputusan kelembagaan.

1) **Pengembangan *Business Process Re-Engineering* (BPR)**

   Bank Indonesia terus memperkuat digitalisasi perumusan Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK) melalui pengembangan *platform* kolaborasi digital yang terintegrasi dan *end-to-end*. Pengembangan dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis (BPR) sekaligus penguatan proses kerja dalam pengambilan keputusan berbasis digital (*Digital Decision Making*) yang mencakup seluruh tahapan evaluasi dan pengendalian kinerja kelembagaan, mulai dari penyiapan bahan, pembahasan dan perumusan rekomendasi, hingga pengambilan keputusan. Pengembangan tersebut

diarahkan untuk meningkatkan efektivitas proses, tata kelola, dan kolaborasi antarsatuan kerja atau unit kerja. Penyempurnaan dilakukan dengan mengurangi redundansi proses serta mengintegrasikan informasi, dokumen, dan analisis dalam satu ekosistem digital sejalan dengan prinsip *one input*, *one process*, dan *multipurpose*. Pengembangan ini mengacu pada *Integrated Digital Central Bank* (IDCB) dan mempertimbangkan *lessons learned* dari penerapan pengambilan keputusan berbasis digital pada area Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI).

Pengembangan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan proses bisnis, teknologi, dan tata kelola dalam mendukung implementasinya. Tahapan pengembangan mencakup penajaman proses bisnis dan evaluasi kebutuhan, penyempurnaan desain model bisnis dan strategi implementasi, asesmen risiko, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan *platform*, hingga pengujian, uji coba, dan sosialisasi internal. Melalui pengembangan ini, proses pengambilan keputusan di area kelembagaan diharapkan semakin terintegrasi, efektif, efisien, dan berbasis digital.

2) **Penguatan Ketentuan Area Organisasi dan Proses Kerja**

   a) **Penguatan Ketentuan Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan**

   Sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjalankan amanat undang-undang, Bank Indonesia akan memperkuat pengaturan mengenai Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan (EPML) dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI). Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kokoh untuk mengoptimalkan kewenangan baru Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 57A UU P2SK. Penyusunan regulasi ini merupakan bagian dari penyesuaian kerangka kelembagaan Bank Indonesia pasca berlakunya UU P2SK, termasuk penyesuaian ketentuan internal pada fungsi komunikasi Bank Indonesia agar pelaksanaan EPML dapat terintegrasi dengan strategi komunikasi lembaga. Integrasi tersebut diharapkan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia.

   Pada triwulan II 2026, penyusunan ketentuan EPML difokuskan pada penyelarasan substansi dengan mandat pasca-UU P2SK serta harmonisasi dengan pengaturan antarkebijakan yang berlaku. Penyusunan juga mencakup penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan mitigasi risiko reputasi, serta petunjuk teknis sebagai acuan implementasi pada tingkat operasional. Dengan kerangka pengaturan yang lebih terintegrasi, pelaksanaan EPML diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan mendukung pelaksanaan strategi komunikasi Bank Indonesia.

   b) **Penguatan Ketentuan Dokumen Hukum Non Peraturan**

   Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia menyusun ketentuan internal mengenai Dokumen Hukum Non-Peraturan (DHNP) sebagai acuan dalam pembentukan dan pengelolaan DHNP di Bank Indonesia. Penyusunan ketentuan dilakukan secara normatif, konseptual, dan sistematis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta ketentuan internal yang relevan. Ketentuan ini disusun untuk membangun standar dalam seluruh siklus DHNP, mulai dari penyusunan, penandatanganan, penggunaan, pengelolaan, hingga pendokumentasian, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Standardisasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, keabsahan, keandalan, dan keterlacakan dokumen, sekaligus meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan dan pengelolaannya. Dengan kerangka yang lebih terstruktur, DHNP dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia, serta memberikan kepastian dan pelindungan terhadap kepentingan hukum Bank Indonesia.

4.2.2. Transformasi SDM dan Budaya Kerja

Pelaksanaan digital *Business Process Re-engineering* (BPR) didukung penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui penyempurnaan ketentuan terkait SDM, penguatan kepemimpinan, pengembangan *new capabilities*, serta penguatan *employee value proposition* (EVP). Transformasi SDM dilakukan melalui pendekatan yang lebih terencana dan berbasis data, dengan menempatkan analisis kebutuhan SDM sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data terkait profil pegawai, kompetensi, kinerja, serta proyeksi kebutuhan organisasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan SDM yang diambil bersifat tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh, memastikan keberlanjutan kinerja, serta memperkuat kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan di tengah dinamika lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis.

1) **Pengembangan Konsepsi Area SDM dan Budaya Kerja**

a) **Penguatan Kurikulum Pengembangan Pegawai *Non-Officer***

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan transformasi desain pembelajaran melalui penguatan kurikulum pengembangan pegawai *Non-Officer*. Transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai berdasarkan rumpun tugas secara lebih terstruktur dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Kurikulum mencakup tujuh bidang kompetensi, yaitu (i) Fondasional dan Kelembagaan; (ii) Ekonomi dan Moneter Dasar; (iii) Makroprudensial dan Inklusi; (iv) Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen; (v) Pengelolaan Uang Rupiah; (vi) Digital dan Data; serta (vii) Sumber Daya dan Tata Kelola. Struktur tersebut memperjelas kompetensi yang perlu dikembangkan pada setiap rumpun tugas sekaligus mendukung pengembangan karier pegawai secara lebih terarah.

Penguatan kurikulum juga diselaraskan dengan tahapan pengembangan kompetensi dan karier pegawai. Desain modul dan *tools* pembelajaran mengintegrasikan pelatihan formal, pembelajaran berbasis pengalaman kerja, *mentoring* dan *coaching*, pembelajaran digital, serta penguatan praktik di Satuan Kerja. Pendekatan ini menghubungkan kompetensi dengan bidang pekerjaan (*job family*), level jabatan, dan tahapan pengembangan karier, sehingga pengembangan pegawai dapat berlangsung secara berkesinambungan dan mendukung kebutuhan organisasi yang terus berkembang.

b) **Penguatan Implementasi Program Pengembangan Kepemimpinan Kebanksentralan**

Bank Indonesia terus memperkuat implementasi program pengembangan kepemimpinan kebanksentralan sebagai program pengembangan bagi pegawai potensial. Penguatan dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi peserta untuk membangun kepemimpinan strategis serta memperdalam pemahaman mengenai perkembangan kebijakan dan praktik kebanksentralan dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis. Program ini ke depan juga akan diintegrasikan dengan skema sertifikasi karier *Certified Central Banking Officer* (CCBO) sebagai bagian dari pengembangan profesionalisme dan pengakuan kompetensi pegawai di bidang kebanksentralan, baik secara internal maupun eksternal.

Program dikembangkan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan karier pegawai yang berkesinambungan. Pembelajaran disusun secara berjenjang, mulai dari kompetensi umum hingga kompetensi yang lebih terspesialisasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan pada setiap bidang pekerjaan dan jenjang jabatan. Pendekatan ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi pengembangan karier sekaligus memastikan kompetensi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Penyusunan materi pembelajaran dilakukan dengan pendekatan *backward analysis* dan *forward linkages*. *Backward analysis* digunakan untuk menangkap pembelajaran dari kebutuhan dan pengalaman sebelumnya, sedangkan *forward linkages* mempertimbangkan perkembangan kompetensi serta potensi kebutuhan organisasi ke depan. Hasil pembelajaran dan pengalaman sebelumnya menjadi dasar penyempurnaan materi, sementara perkembangan kompetensi dan kebutuhan organisasi ke depan menjadi pertimbangan dalam pengembangan materi selanjutnya. Dengan pendekatan ini, pembelajaran antarjenjang dan bidang pekerjaan dapat tersusun secara lebih konsisten serta mendukung pengembangan kompetensi kebanksentralan yang adaptif terhadap kebutuhan Bank Indonesia.

2) **Penguatan Ketentuan Kewajiban Menjaga Informasi Rahasia**

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia menyusun ketentuan internal mengenai kewajiban menjaga informasi rahasia dalam rangka pengelolaan informasi di Bank Indonesia. Proses penyusunan tersebut telah memasuki tahap harmonisasi melalui rangkaian diskusi dan pendalaman dengan satuan kerja terkait. Harmonisasi terutama dilakukan dengan ketentuan internal mengenai Pengaturan Informasi Bank Indonesia (PIBI) dan ketentuan terkait lainnya guna memastikan keselarasan pengaturan dan implementasinya.

Penyempurnaan ketentuan diarahkan untuk meningkatkan standardisasi kepatuhan dan integritas kelembagaan sekaligus memperkuat pelindungan dan pengelolaan informasi rahasia. Pengaturan terhadap kewajiban menjaga informasi rahasia diharapkan dapat semakin memberikan kejelasan mengenai kewajiban, mekanisme pengelolaan, serta akuntabilitas dalam menjaga informasi rahasia di Bank Indonesia. Dengan

penguatan tersebut, pengelolaan informasi rahasia di Bank Indonesia diharapkan semakin aman, adaptif, akuntabel, dan terintegrasi.

3) **Pengembangan AI Area SDM dan Budaya Kerja**

a) **Pemanfaatan AI untuk Mendukung Layanan *digital library***

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk memperkuat layanan *digital library*. Pemanfaatan AI dilakukan melalui *Virtual Assistant for Personalized Reading* yang berfungsi sebagai *learning assistant* untuk membantu pegawai memperoleh rekomendasi dan mengakses sumber pembelajaran secara lebih personal sesuai dengan profil, kebutuhan, dan minat. Inisiatif ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan *digital library* sebagai sarana pembelajaran mandiri sekaligus mendukung pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan.

Pemanfaatan AI tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem kerja dan pembelajaran digital di Bank Indonesia. Layanan pembelajaran yang lebih personal diharapkan mempermudah akses terhadap sumber pembelajaran, meningkatkan pengalaman (*employee experience*) dan keterlibatan (*engagement*) pegawai, serta mendukung pengembangan kompetensi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan organisasi.

b) **Pengembangan Kurikulum Digital dan Komunitas Inovasi Kecerdasan Artifisial**

Bank Indonesia terus memperkuat transformasi digital untuk mendukung visi menjadi bank sentral digital terdepan melalui penguatan kurikulum digital dan pengembangan Komunitas Inovasi Kecerdasan Artifisial (KIKA). Kurikulum digital diarahkan untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan kapabilitas dasar pemanfaatan AI secara lintas fungsi guna mendukung digitalisasi proses bisnis serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Materi pembelajaran diselaraskan dengan kebutuhan pengembangan berbagai analisis di satuan kerja untuk meningkatkan efektivitas pengolahan data dan penyusunan kajian, memperkuat identifikasi risiko, serta mendukung perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih cepat dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Pada triwulan II 2026, internalisasi kurikulum digital diperkuat melalui program pengembangan kompetensi berbasis KIKA. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kapabilitas anggota KIKA sekaligus mendorong penerapan kompetensi digital dalam proses bisnis di masing-masing Satuan Kerja. Pengembangan kompetensi mencakup tiga modul utama, yaitu *data analytics*, AI, dan *central bank use cases*. Program pembelajaran KIKA disusun secara bertahap mulai dari kemampuan dasar pengelolaan dan analisis data hingga penerapan AI dalam proses bisnis. Pembelajaran mencakup pengembangan AI secara *end-to-end* yang didukung oleh kapabilitas metadata dan *data analytics* sebagai fondasi; pemanfaatan *Large Language Model* (LLM) termasuk *Generative AI* dan pengolahan data berbasis teks, serta penerapan metodologi terkini pada area kebijakan dan kelembagaan. Program ini diharapkan memperkuat kapabilitas anggota KIKA dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi digital secara lebih terarah, sekaligus mempercepat pemanfaatan AI di Bank Indonesia.

4.2.3. Transformasi Digital

Transformasi digital Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendukung pelaksanaan transformasi kebijakan dan kelembagaan guna tercapainya visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan. Transformasi digital difokuskan pada penguatan digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan melalui penyempurnaan *business process re-engineering* (BPR) berbasis digital yang mengutamakan *collaborative work* dan didukung oleh pemanfaatan AI. Upaya tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) visi inovasi digital, yakni: (i) pengembangan digitalisasi di area sistem pembayaran dan pendalaman pasar uang (*integrated digital payment system and finance*); (ii) pengembangan digitalisasi pendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, serta SDM (*integrated digital central bank*); dan (iii) peningkatan kapabilitas teknologi dan pengamanan secara *end-to-end* (*integrated digital technology*).

1) **Pengembangan Konsepsi Kebijakan Inovasi Bisnis Digital**

Bank Indonesia terus memperkuat transformasi digital kelembagaan melalui penyusunan konsepsi kebijakan inovasi bisnis digital (KIBD) sebagai landasan pengembangan bisnis dan teknologi digital yang selaras, terintegrasi, dan berorientasi pada penciptaan nilai. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, mengoptimalkan pemanfaatan *cloud* dan kecerdasan artifisial (AI), serta meningkatkan pengelolaan risiko digital dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kedaulatan data.

Pada triwulan II 2026, penyusunan konsepsi KIBD difokuskan pada asesmen kondisi eksisting dan perumusan rekomendasi kebijakan. Cakupan penguatan meliputi arah dan mekanisme inovasi bisnis digital, standardisasi konfigurasi pengembangan solusi digital, serta prinsip pemanfaatan dan pengelolaan *cloud* dan AI. Kerangka tersebut diselaraskan dengan kebijakan internal Bank Indonesia, ketentuan nasional, standar internasional, dan *best practices* yang relevan sebagai landasan bagi penyusunan pedoman implementasi. Penguatan ini diharapkan dapat mendorong penyederhanaan proses bisnis, meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan pengetahuan, serta membangun kapabilitas digital Bank Indonesia yang semakin adaptif dan terintegrasi.

Sejalan dengan penguatan kerangka transformasi digital tersebut, pada triwulan II 2026 Bank Indonesia mulai mempersiapkan modernisasi *Core Banking System* (CBS) melalui penyusunan konsepsi sebagai bagian dari penguatan fondasi teknologi layanan kebanksentralan. Pada tahap awal, modernisasi difokuskan pada penyelarasan dan pengelolaan data transaksi dengan mengacu pada standar internasional untuk mendukung penyusunan statistik keuangan pemerintah dan pemantauan realisasi anggaran (*Government Finance Statistics–Laporan Realisasi Anggaran/GFS-LRA*), serta penguatan integrasi dengan data Sistem Pembayaran.

Secara keseluruhan, penguatan KIBD dan modernisasi CBS merupakan bagian dari transformasi digital Bank Indonesia yang mencakup penguatan kerangka kebijakan dan fondasi teknologi secara terintegrasi. Transformasi tersebut diarahkan untuk membangun proses bisnis dan infrastruktur digital yang semakin andal, aman, adaptif, dan terintegrasi guna mendukung pelaksanaan tugas kebanksentralan yang semakin kompleks.

2) **Pengembangan *Integrated Digital Central Bank* dan *Integrated Digital Technology***

Bank Indonesia mengakselerasi transformasi digital melalui dua pilar utama yang saling terintegrasi, yaitu Integrated Digital Central Bank (IDCB) dan Integrated Digital Technology (IDT). IDCB diarahkan untuk memperkuat digitalisasi proses kebijakan dan kelembagaan secara *end-to-end*, sementara IDT dimaksudkan untuk menyediakan fondasi teknologi digital yang andal, aman, resilien, dan adaptif. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi, berbasis data, serta mampu merespons perkembangan teknologi dan kebutuhan perekonomian secara berkelanjutan.

a) **Pengembangan *Integrated Digital Central Bank* (IDCB)**

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan digitalisasi dan integrasi proses bisnis pada area kebijakan dan kelembagaan. Pada proses perumusan kebijakan, pengembangan diarahkan untuk memperkuat pengelolaan materi pembahasan dan proses persetujuan secara terintegrasi, sehingga mendukung keterhubungan proses sejak penyusunan materi, pembahasan, hingga pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG). Sementara itu, pada proses pelaksanaan kebijakan, pengembangan mencakup penguatan proses bisnis, penyusunan laporan, pengelolaan penugasan, dan indikator kebijakan untuk mendukung pemantauan serta evaluasi pelaksanaan keputusan, termasuk dalam RDG. Pengembangan juga terus dilakukan pada pengelolaan sumber daya manusia dan kinerja organisasi, serta pengelolaan aset, pengadaan, dan proyek secara terintegrasi. Penguatan IDCB diharapkan dapat membangun proses kerja yang semakin *end-to-end*, kolaboratif, dan berbasis data guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

b) **Pengembangan *Integrated Digital Technology* (IDT)**

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia juga melanjutkan penguatan IDT untuk menyediakan kapabilitas teknologi yang terintegrasi, andal, aman, dan berkelanjutan. Pengembangan mencakup penguatan *platform* teknologi untuk mendukung pengembangan aplikasi dan *user experience*, modernisasi infrastruktur pusat data, peningkatan kapabilitas lingkungan kerja digital, serta pemanfaatan teknologi *cloud* secara bertahap sesuai dengan prinsip tata kelola. Sejumlah kapabilitas telah memasuki tahap implementasi dan penyempurnaan, sementara pengembangan lainnya dilanjutkan melalui penyiapan infrastruktur dan penguatan desain dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan keberlanjutan teknologi.

Secara keseluruhan, pengembangan IDCB dan IDT memperkuat keterhubungan antara infrastruktur digital, proses bisnis, data, dan kapabilitas teknologi Bank Indonesia. Integrasi ketiga pilar tersebut diharapkan membentuk fondasi transformasi digital yang semakin andal, aman, resilien, dan adaptif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe

BAB 5

CAPAIAN KINERJA BANK INDONESIA

Di tengah tantangan lingkungan strategis yang semakin berat, Bank Indonesia berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan II 2026 sesuai tahapannya. Capaian ini menegaskan efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam merespons dinamika ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh inovasi dan transformasi berkelanjutan, baik di area kebijakan maupun kelembagaan, termasuk penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional. Sinergi erat yang terus dilakukan oleh Bank Indonesia sepanjang triwulan II 2026, baik dengan Pemerintah maupun mitra kerja strategis lainnya, turut memperkuat persepsi positif terhadap kebijakan Bank Indonesia dan perekonomian Indonesia, termasuk pengakuan dari lembaga internasional.

Pencapaian kinerja Bank Indonesia sepanjang triwulan II 2026 tecermin pada capaian IKU Bank Indonesia dalam 12 Program Strategis (PS) sebagai berikut:

PS 01 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lingkungan strategis global pada triwulan II 2026 diwarnai meningkatnya ketidakpastian akibat eskalasi konflik di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026. Perkembangan tersebut mendorong kenaikan harga minyak dunia, yang berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antarnegara, sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tekanan inflasi global. Ketidakpastian di pasar keuangan global juga makin memburuk, tecermin dari pergeseran aliran modal ke aset yang dianggap aman (*safe-haven assets*), indeks DXY dan ADXY yang terus menguat, serta mata uang *emerging markets* yang makin tertekan, termasuk Indonesia. Dalam kaitan tersebut, bauran kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat dan diarahkan untuk memperkuat stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional dan program Asta Cita Pemerintah. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada triwulan II 2026 diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya kondisi global, menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1% pada tahun 2026 dan 2027, serta memperkuat efektivitas transmisi kebijakan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter dan memperkuat ketahanan eksternal sebagai langkah antisipatif terhadap potensi dampak lanjutan dari dinamika global, guna tetap konsisten menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

1) **Inflasi inti yang rendah dan stabil pada kisaran sasarannya didukung transmisi kebijakan yang efektif**

   Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada triwulan II 2026 tetap terkendali dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2026 sebesar 2,5±1%. Inflasi IHK pada akhir triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,34% (yoy), relatif lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh inflasi inti yang tetap terjaga sebesar 2,76% (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga pencapaian sasaran inflasi. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) tercatat sebesar 3,42% (yoy) dipengaruhi oleh penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi global. Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* (VF) tercatat sebesar 5,58% (yoy) disumbang terutama oleh inflasi komoditas bawang merah, bawang putih, dan beras seiring dengan penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027.

   Bank Indonesia terus mengintegrasikan bauran kebijakan yang tetap konsisten untuk semakin memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta untuk mempertahankan inflasi pada tahun 2026 dan 2027 berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah (*"pro-stability"*). Kebijakan tersebut ditempuh melalui kebijakan suku bunga BI-Rate serta perluasan kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA), serta meningkatkan likuiditas.

   Di sisi pengendalian inflasi, Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi bersama Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID), termasuk melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Sinergi tersebut diarahkan untuk mengantisipasi risiko gangguan pasokan akibat

Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa di Sidoarjo, Jawa Timur.

cuaca, menjaga kecukupan pasokan pangan di tengah membaiknya permintaan, serta memastikan efektivitas pelaksanaan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pemantauan terhadap implementasi strategi 4K terus diperkuat melalui pelaksanaan operasi pasar, gerakan pangan murah, penguatan kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, serta pemantauan harga dan pasokan guna menjaga stabilitas harga dan mendukung pencapaian sasaran inflasi.

2) **Terjangkarnya ekspektasi inflasi sesuai dengan target inflasi**

Ekspektasi inflasi pada triwulan II 2026 tetap terjaga dalam kisaran sasaran inflasi sebesar 2,5±1%. Perkembangan tersebut mencerminkan keyakinan masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga, di tengah masih tingginya ketidakpastian dan gejolak perekonomian global. Bauran kebijakan moneter Bank Indonesia tetap difokuskan pada stabilitas untuk memperkuat ketahanan eksternal dari dampak rambatan global, menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, serta memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran.

Bank Indonesia secara konsisten menjaga *stance* suku bunga kebijakan moneter yang selaras dengan upaya pencapaian sasaran inflasi, dengan mempertimbangkan perkembangan dan prospek inflasi, nilai tukar Rupiah, serta kondisi perekonomian global dan domestik. Konsistensi kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan ekspektasi inflasi tetap terjangkar sesuai sasaran. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi bersama Pemerintah Pusat dan Daerah serta meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan kepada masyarakat dan pelaku pasar. Penguatan sinergi dan komunikasi tersebut dilakukan melalui koordinasi TPIP–TPID guna membangun pemahaman yang utuh terhadap bauran kebijakan yang ditempuh dan mengelola ekspektasi inflasi secara berkelanjutan.

3) **Tercapainya stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental perekonomian**

Bank Indonesia terus memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan melemahnya preferensi investor global untuk menempatkan dananya pada negara *emerging market*. Penguatan stabilisasi dilakukan melalui strategi *smart intervention* secara terukur di pasar spot, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan *Non-Deliverable Forward* (NDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Strategi tersebut ditempuh untuk menjaga pergerakan nilai tukar Rupiah agar tetap sejalan dengan nilai fundamental, meredam volatilitas yang berlebihan, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pada triwulan II 2026, pelaksanaan strategi stabilisasi nilai tukar diperkuat melalui peningkatan intensitas intervensi melalui transaksi DNDF dan NDF, pemberian insentif berupa penurunan tingkat *swap* lindung nilai (*hedging swap*) bagi investor asing, serta peningkatan intensitas komunikasi kebijakan kepada pelaku pasar. Bank Indonesia juga

melanjutkan operasi moneter valas melalui instrumen spot dan swap beli Bank Indonesia dalam mata uang non-USD, antara lain CNY/IDR, CNH/IDR dan JPY/IDR, serta transaksi repo valas dalam mata uang USD guna mendukung ketersediaan likuiditas valas di pasar domestik. Sejalan dengan itu, optimalisasi operasi moneter *pro-market* terus diperkuat, termasuk melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan tetap menjaga struktur suku bunga SRBI sejalan dengan kenaikan BI-Rate. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik, mendorong masuknya aliran modal asing, memperkuat pendalaman pasar uang, dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Boks.2: Bank Indonesia Terus Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah di Tengah Volatilitas Global

Central Banking Forum 2026 di Jakarta.

Di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global akibat eskalasi konflik geopolitik, Bank Indonesia terus memperkuat komunikasi kebijakan sebagai bagian dari bauran kebijakan untuk menjaga ekspektasi dan kepercayaan pasar. Komunikasi yang kredibel, konsisten, dan tepat waktu menjadi instrumen penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.

Dalam seminar "Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Volatilitas Nilai Tukar Global" yang merupakan rangkaian Central Banking Forum 2026 di Jakarta pada 13 April 2026, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menegaskan bahwa dinamika global saat ini merupakan kondisi yang tidak biasa sehingga memerlukan respons kebijakan yang konsisten, *pre-emptive*, dan terukur. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter dengan memperkuat intervensi di pasar *offshore* melalui *Non-Deliverable Forward* (NDF) serta intervensi di pasar domestik melalui pasar *spot*, Domestic *Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Langkah tersebut didukung oleh kecukupan cadangan devisa Indonesia yang pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar USD 148,3 miliar, setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, sehingga memberikan ruang yang memadai bagi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, memperkuat daya tarik aset domestik, serta memastikan kecukupan likuiditas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah dan komunikasi kebijakan yang konsisten kepada para pemangku kepentingan akan terus dilakukan untuk menjaga ekspektasi, memperkuat kepercayaan pasar, dan meningkatkan efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia.

4) **Tercapainya kecukupan cadangan devisa yang memenuhi standar internasional dan sesuai target yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur**

Pengelolaan cadangan devisa pada triwulan II 2026 diarahkan untuk memastikan kecukupan cadangan devisa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan pemenuhan kewajiban internasional dalam valas, sekaligus memperkuat upaya menjaga stabilitas nilai tukar. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir triwulan II 2026 tercatat sebesar USD 145,6 miliar, setara dengan 5,5 bulan impor, atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Adapun posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2026 terjaga sebesar USD145,3 miliar, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Posisi tersebut berada di atas standar kecukupan internasional, yakni 3 bulan impor, dan telah memperkuat ketahanan sektor eksternal serta mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Sejalan dengan mandat untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah dinamika lingkungan global yang volatil dan penuh ketidakpastian, pengelolaan cadangan devisa diprioritaskan untuk memastikan ketersediaan valas yang memadai. Strategi pengelolaan cadangan devisa tetap mengedepankan upaya menjaga *preserved value* cadangan devisa, dan secara keseluruhan dilakukan berlandaskan pada prinsip keamanan dan kesiagaan, tanpa mengabaikan optimalitas pendapatan.

Optimalitas pengelolaan cadangan devisa didukung oleh penguatan sinergi dengan Pemerintah, perluasan kerja sama keuangan internasional, serta penguatan tata kelola, teknologi digital dan kompetensi sumber daya manusia. Bersama dengan kementerian terkait, Bank Indonesia secara berkala melakukan koordinasi dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran valas Pemerintah serta pengaturan aliran modal masuk dan keluar Indonesia. Perluasan kerja sama keuangan internasional antara lain ditempuh melalui perluasan *repo line* dan *swap arrangement* dengan bank sentral maupun lembaga keuangan internasional mitra di kawasan. Penguatan tata kelola pengelolaan cadangan devisa dilakukan melalui penyempurnaan ketentuan internal, peningkatan kualitas sistem dan infrastruktur pendukung, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia, guna memastikan pengelolaan cadangan devisa yang akuntabel, transparan, dan sejalan dengan praktik terbaik internasional.

5) **Tercapainya suku bunga pasar uang sesuai suku bunga kebijakan dengan yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur**

Bank Indonesia terus memperkuat pelaksanaan operasi moneter untuk menjaga pergerakan suku bunga Pasar Uang Antarbank (PUAB) *overnight* tetap berada dalam koridor suku bunga kebijakan, sekaligus memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada triwulan II 2026, operasi moneter diarahkan untuk mengelola struktur bunga di pasar uang yang sejalan dengan kebijakan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter *pro-market*. Operasi moneter juga diarahkan untuk mendukung ekspansi moneter dengan memastikan pertumbuhan uang primer berada di atas 10%, sejalan dengan kebutuhan likuiditas perekonomian dan upaya menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Penguatan operasi moneter juga dilakukan melalui optimalisasi berbagai instrumen secara terukur dan berorientasi pasar. Bank Indonesia mengoptimalkan penerbitan SRBI untuk mendukung pengelolaan likuiditas, memperkuat pendalaman pasar uang, serta meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik bagi investor. Pada saat yang sama, Bank Indonesia menyediakan likuiditas melalui transaksi *repurchase agreement* (repo) berbagai tenor bagi perbankan. Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder juga dilakukan secara terukur sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas moneter, sekaligus untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan mendukung efektivitas kebijakan moneter.

Untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan, Bank Indonesia terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan perbankan, dunia usaha, dan Pemerintah. Penguatan komunikasi dan koordinasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan pengelolaan likuiditas, memperkuat pemahaman pelaku ekonomi terhadap arah kebijakan moneter, serta menjaga keyakinan pasar di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.

PS 02 Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektor riil Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, dengan tetap mempertahankan stabilitas makroekonomi di tengah tingginya ketidakpastian global. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik pada level nasional maupun regional, dilakukan untuk memperkuat pencapaian inflasi dalam rentang sasaran, transaksi berjalan yang sehat, dan stabilitas eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

6) **Terjalinnya koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah untuk pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan bersama Pemerintah Pusat dan Daerah melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN). Sinergi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi melalui koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang responsif terhadap perkembangan harga dan pasokan pangan, termasuk antisipasi risiko gangguan cuaca, seperti El Niño, yang berpotensi memengaruhi produksi, distribusi, dan harga komoditas pangan. Pada triwulan II 2026, penguatan koordinasi antara lain dilakukan melalui rapat Koordinasi TPIP–TPID dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa di Sidoarjo pada Mei 2026, yang menghasilkan kesepakatan strategis pengendalian inflasi pangan. Dalam jangka pendek, kesepakatan diarahkan untuk penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian, regenerasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, pembiayaan dan perlindungan usaha tani, penguatan *offtaker* dan kelembagaan pangan daerah, serta kerja sama antardaerah (KAD) dan distribusi pangan. Dalam jangka menengah-panjang, kesepakatan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem hulu-hilir, antara lain melalui perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, penguatan inovasi dan korporatisasi, serta penguatan neraca pangan.

Bank Indonesia juga memperkuat evaluasi program pengendalian inflasi di daerah melalui penilaian substansi, efektivitas, dan inovasi dalam laporan TPID tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk mengidentifikasi praktik terbaik, mendorong replikasi inovasi antardaerah, dan meningkatkan kualitas implementasi pengendalian inflasi. Penguatan tersebut sejalan dengan penetapan *framework* GPIPS 2026 bersama Pemerintah sebagai acuan pelaksanaan pengendalian inflasi pangan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Boks.3: Memperkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS)

Pembukaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa di Sidoarjo, Jawa Timur.

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional pada 13 Mei 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur. GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dirancang untuk menjawab tantangan pengendalian inflasi pangan yang semakin kompleks, melalui sinergi kebijakan yang lebih terintegrasi dengan agenda ketahanan pangan nasional.

Deputi Gubernur Bank Indonesia menegaskan bahwa GPIPS 2026 dilakukan melalui sinergi erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah,

dengan penguatan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. GPIPS juga diarahkan untuk memperkuat produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sebagai bagian dari implementasi GPIPS Wilayah Jawa, Bank Indonesia bersama Pemerintah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) Wilayah Jawa pada Mei 2026 yang menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis dalam rangka pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan. Dalam jangka pendek, kesepakatan diarahkan pada penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian, regenerasi dan peningkatan kapasitas SDM, pembiayaan dan perlindungan usaha tani, penguatan *offtaker* dan kelembagaan pangan daerah, serta penguatan kerja sama antardaerah (KAD) dan distribusi pangan.

Sejalan dengan itu, implementasi GPIPS Wilayah Jawa juga mendorong penguatan rantai pasok dan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir melalui KAD dengan skema *business-to-business* (B2B), sinergi kelompok tani dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/Makan Bergizi Gratis (SPPG/MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta dukungan pembiayaan untuk modernisasi sisi hilir. Penguatan stabilisasi pasokan dan distribusi dilakukan melalui sinergi BUMD pangan, Bulog, koperasi, Rumah Tani Nusantara, dan PT Pos Indonesia, sementara produktivitas dan pengelolaan pascapanen diperkuat melalui dukungan sarana produksi dan pascapanen.

Dalam jangka menengah-panjang, strategi difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem hulu-hilir, antara lain melalui perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, pengembangan benih unggul dan adaptasi iklim, penguatan inovasi dan korporatisasi petani, serta penyempurnaan sistem informasi dan neraca pangan daerah.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui implementasi GPIPS, dengan mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi rantai pasok dan distribusi pangan, penguatan KAD, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan ekosistem pangan nasional.

7) **Terjalinnya sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk menjaga stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi**

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama Pemerintah guna menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Sinergi tersebut antara lain diwujudkan melalui penyampaian asesmen dan rekomendasi mengenai asumsi dasar makroekonomi, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar Rupiah, sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyampaian rekomendasi tersebut diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan fiskal yang tetap responsif terhadap dinamika perekonomian global dan domestik serta selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional.

Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan K/L terkait dalam mendukung penerbitan SBN dalam valas. Koordinasi dilakukan antara lain dalam penerbitan *Samurai Bonds*, *global bonds* dalam denominasi euro dan dolar AS melalui format SEC-21, *Panda Bonds*, serta *Kangaroo Bonds*. Koordinasi dilakukan melalui penyampaian asesmen kondisi pasar keuangan global serta pertukaran data dan informasi untuk mendukung diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, dan memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN secara efektif dan efisien, dengan tetap menjaga stabilitas pasar keuangan dan ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

PS 03 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketidakpastian global yang masih tinggi memicu volatilitas aliran modal dan tekanan nilai tukar, sehingga berpotensi meningkatkan risiko likuiditas dan risiko pasar di negara-negara *emerging markets* (EMs). Kondisi tersebut meningkatkan tantangan dalam memitigasi rambatan tekanan global serta menjaga ketahanan eksternal dan dukungan pembiayaan terhadap perekonomian domestik. Menghadapi hal tersebut, kebijakan makroprudensial

perlu terus diperkuat untuk memitigasi risiko dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memastikan intermediasi tetap berjalan secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah ini perlu ditopang bauran kebijakan Bank Indonesia, dan sinergi kebijakan nasional yang solid guna memperkuat stabilitas ekonomi dan ketahanan eksternal.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

8) **Tercapainya pertumbuhan kredit/pembiayaan yang optimal untuk mendukung program strategis Pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**

Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang berkelanjutan. Kebijakan *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) dipertahankan sebesar 0% guna memberikan ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit kepada dunia usaha dan rumah tangga, dengan tetap menjaga ketahanan permodalan dalam menghadapi potensi risiko siklikal.

Penguatan dukungan terhadap kapasitas pembiayaan perbankan juga dilakukan melalui peningkatan batas maksimum Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) bank dari 35% menjadi 40%. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perbankan dalam memperoleh sumber pendanaan luar negeri guna mendukung penyaluran kredit, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko eksternal. Selain itu, berlaku efektif mulai 1 Juli 2026, Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) melalui perluasan cakupan serta penguatan kriteria surat berharga dan surat berharga syariah korporasi yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan RIM. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan, memperluas alternatif pembiayaan korporasi melalui pasar keuangan, serta mendukung pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang berkualitas bagi perekonomian.

9) **Terjaganya risiko likuiditas perbankan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan**

Bank Indonesia terus memperkuat pengawasan makroprudensial untuk menjaga ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Pengawasan dilakukan melalui asesmen risiko likuiditas bank secara menyeluruh dengan mempertimbangkan peran dan keterkaitan bank dalam area makroprudensial, pelaksanaan kebijakan moneter dan aktivitas pasar keuangan, serta penyelenggaraan sistem pembayaran. Asesmen kecukupan likuiditas perbankan juga terus diperkuat baik dalam Rupiah maupun valas untuk memastikan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, mendukung penyaluran kredit dan pembiayaan secara optimal, serta memitigasi potensi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan.

Pada triwulan II 2026, kualitas asesmen diperkuat dengan analisis perilaku dan risiko likuiditas bank, termasuk pengelolaan alokasi aset, dampak peningkatan BI-Rate, interkoneksi pada PUAB, pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) *Averaging*, dan pemantauan dana pemerintah pada bank penerima Saldo Anggaran Lebih (SAL). Seluruh asesmen dilakukan dalam kerangka *Integrated Dynamic Systemic Risk Surveillance* (IDRS) untuk memastikan berjalannya pengawasan terhadap potensi peningkatan eksposur risiko likuiditas, termasuk transmisinya terhadap risiko sistemik dan stabilitas sistem keuangan. Dukungan *supervisory technology* terus berjalan melalui penguatan *data analytics* terhadap perkembangan berita/media (*news monitoring*) yang bertujuan memantau persepsi dan informasi kualitatif yang dapat berpengaruh terhadap kondisi likuiditas perbankan. Berdasarkan hasil asesmen dan/atau pemeriksaan, Bank Indonesia menyusun rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut pengawasan untuk memperkuat ketahanan individual bank, meningkatkan efektivitas fungsi intermediasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

10) **Terjaganya risiko pasar perbankan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan**

Bank Indonesia terus memperkuat pengawasan terhadap risiko pasar perbankan untuk menjaga ketahanan individual bank dan stabilitas sistem keuangan. Pengawasan mencakup asesmen terhadap risiko nilai tukar dan suku bunga, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan dan posisi *profit/loss* bank. Penguatan asesmen turut dilakukan melalui pengembangan proksi Posisi Devisa Neto (PDN) *intraday* untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai eksposur valas dan potensi risiko yang dihadapi bank sepanjang hari transaksi. Selain itu, Bank Indonesia melakukan asesmen terhadap perkembangan aktivitas *Dealer* Utama PUVA dalam rangka mendukung pendalaman pasar dan peran dalam redistribusi likuiditas.

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan dan/atau

***on-site visit* terhadap aktivitas transaksi valas bank**. Pemeriksaan ditujukan untuk menilai kepatuhan, kecukupan tata kelola, efektivitas manajemen risiko, serta kesesuaian aktivitas transaksi dengan ketentuan yang berlaku, termasuk terkait *underlying* transaksi. Hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan selanjutnya menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut pengawasan untuk memitigasi potensi risiko nilai tukar dan suku bunga, memperkuat ketahanan perbankan, serta mendukung efektivitas kebijakan moneter dan pendalaman pasar keuangan.

11) **Tercapainya pertumbuhan kredit yang inklusif dan/atau hijau untuk mendukung program strategis Pemerintah dalam rangka mendorong penciptaan lapangan kerja**

Sebagai bagian dari dukungan terhadap inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan pengembangan keuangan berkelanjutan, Bank Indonesia terus memperkuat upaya peningkatan pembiayaan kepada UMKM. Salah satu instrumen yang digunakan adalah kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Pada 2025, realisasi RPIM tercatat sebesar 32,04% atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat 33,57%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi RPIM yang lebih rendah antara lain dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang masih terbatas, kenaikan biaya operasional akibat meningkatnya biaya *input*, serta strategi perbankan yang masih fokus pada konsolidasi kredit UMKM.

Sejalan dengan hasil evaluasi, Bank Indonesia memperkuat kebijakan RPIM melalui perluasan modalitas pembiayaan. Perluasan modalitas tersebut meliputi perluasan cakupan penyaluran kredit atau pembiayaan termasuk kepada pemasok, distributor, dan/atau mitra badan usaha, perluasan mekanisme kerja sama penyaluran kredit UMKM antarbank umum melalui skema *channeling* dan *executing*, serta penguatan mekanisme transfer RPIM antarbank berbasis kontrak yang akan berlaku sejak Oktober 2026. Bank Indonesia juga terus memperkuat implementasi KLM kepada bank penyalur kredit/pembiayaan untuk sektor inklusif. Penguatan ini dilakukan melalui pemberian insentif likuiditas yang terarah, sehingga mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM dan sektor produktif lainnya.

PS 04 Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi erat dengan KSSK dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung peningkatan intermediasi dan mendorong pembiayaan perekonomian secara berkelanjutan. Penguatan sinergi tersebut semakin penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan volatilitas pasar keuangan yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan, baik yang bersumber dari risiko pasar, risiko likuiditas, maupun risiko kredit. Dalam konteks tersebut, koordinasi kebijakan di dalam KSSK tidak hanya untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan terhadap berbagai sumber risiko, tetapi juga untuk memastikan respons kebijakan yang terkoordinasi dan efektif, termasuk melalui penguatan komunikasi publik, sehingga mampu menjaga kepercayaan pasar serta mendukung penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas sesuai program Asta Cita Pemerintah.

Konfrensi Pers Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan II 2025 di Jakarta.

Sejalan dengan penguatan koordinasi dalam KSSK, Bank Indonesia juga memperkuat sinergi kebijakan secara bilateral dengan K/L dan pelaku industri untuk mendorong intermediasi pada sektor-sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satu fokus koordinasi adalah penguatan pembiayaan sektor perumahan melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, REI, BP Tapera, dan PT SMF, antara lain untuk membahas strategi peningkatan kapasitas pembiayaan dan mendorong penyaluran kredit sektor perumahan sebagai bagian dari program PINISI.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

12) **Terjalinnya sinergi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dengan KSSK, OJK, dan/atau Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan yang optimal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan**

ank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan sekaligus mendukung pengembangan sektor keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Sepanjang triwulan II 2026, koordinasi Bank Indonesia dan OJK dilakukan melalui forum Komite Kerja Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KKD), mencakup koordinasi penyusunan revisit Petunjuk Pelaksanaan Bersama BI-OJK tentang *Joint Stress Test* (Juklak JST), pembahasan pengawasan perbankan, pengembangan data keuangan berkelanjutan, serta penguatan kebijakan. Koordinasi tersebut menghasilkan berbagai rekomendasi strategis, termasuk penguatan mekanisme pertukaran dan pengaliran data untuk ketersediaan informasi yang diperlukan dalam mendukung efektivitas pengawasan, analisis kebijakan, serta perumusan kebijakan yang lebih komprehensif.

Penguatan sinergi dan koordinasi juga dilakukan bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Pada triwulan II 2026, koordinasi yang dilakukan Bank Indonesia dan LPS mencakup pembahasan revisit Nota Kesepahaman (NK) BI-LPS sebagai upaya penguatan mekanisme koordinasi Bank Indonesia dan LPS, dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi dan kebutuhan koordinasi terkini. Selain itu, koordinasi juga dilakukan terkait penguatan mekanisme pertukaran data dan/atau informasi untuk memperkuat efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan data untuk mendukung pelaksanaan tugas di masing-masing otoritas.

Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi bersama OJK dalam rangka harmonisasi peraturan di sektor keuangan. Pada periode triwulan II tahun 2026, telah dilakukan berbagai pembahasan dan harmonisasi atas ketentuan BI dan OJK, antara lain Rancangan Perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (RPADG Perubahan Kedua KLM), Rancangan Peraturan OJK tentang Pemeriksaan Bank, serta Rancangan Peraturan ADK mengenai Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi BPR Syariah. Harmonisasi dilakukan untuk memastikan keselarasan substansi pengaturan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga, meminimalkan potensi tumpang tindih atau kesenjangan pengaturan, serta memperkuat kepastian hukum dan efektivitas implementasi kebijakan. Hasil koordinasi selanjutnya menjadi dasar penyempurnaan ketentuan dan mekanisme kerja sama antarotoritas guna mendukung stabilitas sistem keuangan serta pengembangan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

13) **Terjalinnya sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan KSSK, OJK, dan/atau LPS dalam rangka menjaga ketahanan sistem keuangan, termasuk pencegahan dan penanganan krisis**

Dalam kerangka KSSK, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan bersama Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS untuk menjaga stabilitas dan ketahanan sistem keuangan di tengah tingginya ketidakpastian global. Pada triwulan II 2026, koordinasi tersebut diperkuat melalui Rapat Berkala KSSK II Tahun 2026 untuk membahas perkembangan terkini perekonomian dan sektor keuangan serta mengidentifikasi potensi risiko ke depan. Hasil pembahasan selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan respons kebijakan di masing-masing lembaga yang lebih terkoordinasi sebagai upaya bersama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan optimalitas pembiayaan bagi perekonomian nasional.

Koordinasi antaranggota KSSK diperkuat melalui penyelenggaraan Simulasi Tematik (Simtik) tahun 2026. Simtik difokuskan pada pengujian kecukupan ketentuan dan kesiapan mekanisme koordinasi

antaranggota KSSK dalam menghadapi potensi krisis perbankan. Pelaksanaan Simtik menghasilkan sejumlah *key takeaways* sebagai dasar penguatan pengaturan di masing-masing lembaga agar semakin selaras, penyempurnaan mekanisme koordinasi antaranggota KSSK agar semakin efektif, serta peningkatan kesiapan komunikasi publik bersama dalam mendukung penanganan dan resolusi bank.

Bank Indonesia dan OJK juga terus meningkatkan koordinasi pemeriksaan bank melalui pertukaran informasi, penyelarasan cakupan pemeriksaan, dan penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Koordinasi tersebut diarahkan untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi perbankan dan mengidentifikasi potensi risiko secara lebih dini.

PS 05 Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta pelindungan konsumen, untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Dinamika global yang terus berkembang, ekonomi keuangan digital (EKD) yang terus terakselerasi, dan inovasi pembayaran yang semakin kompleks menuntut sistem pembayaran yang semakin lancar, andal, dan adaptif. Dari sisi domestik, peningkatan volume dan keragaman transaksi digital, bertambahnya pelaku industri, serta berkembangnya aset dan instrumen digital memperluas kebutuhan terhadap infrastruktur dan tata kelola sistem pembayaan yang kuat. Digitalisasi sistem pembayaran juga menghadirkan tantangan, terutama terkait risiko siber, sehingga memerlukan penguatan pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen untuk menjaga keamanan sistem, serta memastikan kesiapan infrastruktur secara merata. Merespons perkembangan tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan sistem pembayaran melalui peningkatan keandalan infrastruktur dan struktur industri, perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan konektivitas pembayaran antarnegara, pengelolaan uang Rupiah, serta penguatan pelindungan konsumen. Keseluruhan langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, andal, dan efisien, menjaga kepercayaan publik, serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan sejalan dengan program Asta Cita.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta pelindungan konsumen, untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

14) **Transaksi sistem pembayaran yang cepat, mudah, dan murah**

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran yang *pro-growth* untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi, terutama bagi pelaku usaha mikro. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan penerapan kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS sebesar 0% bagi *merchant* Usaha Mikro (UMi) guna menekan biaya transaksi, memperluas akses terhadap pembayaran digital, serta mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan inklusi keuangan. Penerapan kebijakan tersebut diperkuat dengan kampanye dan promosi penggunaan QRIS secara masif dan terarah untuk meningkatkan jumlah pengguna, volume transaksi, serta memperluas akseptasi QRIS

Peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia dan QRIS Antarnegara Indonesia - Tiongkok di Jakarta.

di berbagai sektor dan wilayah. Total pengguna QRIS pada triwulan II 2026 mencapai 65,77 juta, diiringi peningkatan jumlah merchant QRIS menjadi 44,86 juta dan volume transaksi QRIS yang mencapai 12,54 miliar transaksi. Sejalan dengan itu, digitalisasi sistem pembayaran juga tecermin dari pertumbuhan *digital payments* sebesar 16,8% (ytd), dengan volume transaksi mencapai 16,07 miliar transaksi. Hal ini turut didukung implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang terus menunjukkan perkembangan positif, tecermin dari volume transaksi SNAP yang mencapai 13,33 miliar transaksi.

Bank Indonesia juga terus memperkuat edukasi dan pendampingan kepada *merchant* mengenai pemanfaatan QRIS, keamanan bertransaksi, dan pengelolaan usaha berbasis digital. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan industri sistem pembayaran, perbankan, penyedia jasa pembayaran, Pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait guna mendorong akuisisi *merchant* baru serta meningkatkan keaktifan dan kualitas penggunaan QRIS. Selain itu, perluasan konektivitas pembayaran lintas negara terus dilakukan melalui pengembangan kerja sama QRIS antarnegara, antara lain QRIS Indonesia–Korea Selatan dan QRIS Indonesia–Tiongkok. Perluasan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi lintas negara, mendukung sektor perdagangan dan pariwisata, serta memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia dengan negara mitra.

Boks.4: *Launching* QRIS Antarnegara Indonesia-Korea Selatan

Launching Qris Antarnegara Indonesia - Korea Selatan di Jakarta.

Bank Indonesia bersama Bank of Korea secara resmi meluncurkan konektivitas pembayaran QR Antarnegara Indonesia–Korea Selatan yang memungkinkan masyarakat kedua negara melakukan transaksi lintas batas menggunakan QR code domestik masing-masing secara langsung dalam mata uang lokal. Peresmian ini merupakan implementasi *Joint Vision Statement* (JVS) antara Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Korea serta menjadi tonggak penting dalam memperkuat konektivitas ekonomi digital kedua negara.

Peresmian dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Senior Bank of Korea melalui seremoni yang diselenggarakan secara bersamaan di Indonesia dan Korea Selatan. Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa konektivitas pembayaran QR Antarnegara merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pembayaran yang lebih terintegrasi, efisien, dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan UMKM, sektor pariwisata, dan aktivitas ekonomi lintas negara. Sejalan dengan hal tersebut, Bank of Korea menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan sistem pembayaran dan konektivitas ekonomi digital kedua negara.

Implementasi QR Antarnegara Indonesia–Korea Selatan merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, Bank of Korea, ASPI beserta anggotanya, *Korea Financial Telecommunications & Clearings Institute* (KFTC), serta lembaga keuangan yang berpartisipasi. Peluncuran ini melengkapi jaringan konektivitas pembayaran QR lintas negara yang sebelumnya telah terjalin dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang.

Sejak diluncurkan, QRIS terus menunjukkan perkembangan yang positif sebagai instrumen pembayaran digital nasional, dengan jumlah pengguna mencapai 60,77 juta hingga Februari 2026. Pemanfaatan QR Antarnegara juga terus meningkat, tecermin dari volume transaksi lintas negara yang terus bertambah dan

tingginya transaksi. Ke depan, Bank Indonesia bersama Bank of Korea berkomitmen untuk terus memastikan terselenggaranya sistem pembayaran lintas negara yang aman, andal, efisien, dan inklusif guna mendukung integrasi ekonomi digital serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia melanjutkan penyiapan program QRIS Jelajah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk memperluas akseptasi dan meningkatkan penggunaan QRIS di berbagai wilayah. Penyiapan program diperkuat dari aspek operasional, antara lain melalui penyusunan konsep dan mekanisme pelaksanaan, penetapan wilayah dan peserta, serta penguatan koordinasi teknis, disertai strategi publikasi dan komunikasi yang terarah untuk meningkatkan partisipasi serta pemahaman masyarakat mengenai manfaat pembayaran digital. Pelaksanaan program juga didukung oleh penguatan sinergi dengan K/L, Pemerintah Daerah, industri sistem pembayaran, serta pemangku kepentingan terkait guna mendorong perluasan digitalisasi transaksi dan pengembangan potensi ekonomi daerah.

Bank Indonesia juga terus memperkuat ekosistem inovasi digital nasional melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI). Penguatan tersebut dilakukan melalui fasilitasi pengembangan dan pengujian inovasi, kolaborasi antara regulator, industri, pelaku usaha, dan penyedia teknologi, serta penguatan kapabilitas dan literasi digital. PIDI diarahkan sebagai wadah untuk mengakselerasi pengembangan inovasi sistem pembayaran yang aman, efisien, inklusif, dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang terintegrasi, berdaya saing, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Boks.5: Penguatan ekosistem inovasi digital nasional melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia

Peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia dan QRIS Antarnegara Indonesia - Tiongkok di Jakarta.

Bank Indonesia meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI): DIGDAYA x Hackathon sebagai upaya memperkuat pengembangan talenta digital yang inovatif dan adaptif dalam mendukung transformasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045. Peluncuran ini juga dirangkaikan dengan peresmian implementasi QRIS Antarnegara Indonesia–Tiongkok, sebagai wujud penguatan konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

Peluncuran PIDI dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta didukung oleh OJK, ASPI, AFTECH, APUVINDO, LPPI, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. PIDI dirancang sebagai wadah pengembangan talenta digital melalui rangkaian *essential training*, *practitioner training*, *capstone project*, hingga *business matching*, sehingga mampu menghasilkan solusi inovatif yang implementatif dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia bersama *People's Bank of China* (PBoC) meresmikan implementasi QRIS Antarnegara Indonesia–Tiongkok sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas pembayaran lintas negara yang aman, efisien, inklusif, serta mendukung penggunaan mata uang lokal (*Local Currency Transaction*/ LCT) dalam transaksi bilateral. Peluncuran ini sekaligus

menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama di bidang digital dan sistem pembayaran.

Peluncuran PIDI dan implementasi QRIS Antarnegara Indonesia–Tiongkok mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui pengembangan talenta digital, akselerasi inovasi, serta perluasan konektivitas sistem pembayaran lintas negara. Ke depan, sinergi antara otoritas, industri, dan talenta digital diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem digital yang semakin inovatif, inklusif, dan berdaya saing global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

15) **Ketersediaan Rupiah untuk mendukung *sovereignty* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**

Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar melalui pemantauan kebutuhan uang Rupiah secara berkala, dan pengelolaan Rupiah secara terintegrasi dari Pusat hingga Daerah. Pemantauan kebutuhan uang Rupiah dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan aktivitas ekonomi, pola transaksi masyarakat, kebutuhan perbankan, karakteristik kewilayahan, serta faktor musiman sebagai dasar penyusunan strategi pemenuhan kebutuhan uang di seluruh wilayah Indonesia. Penguatan pengelolaan uang Rupiah dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melaksanakan Survei Tingkat Kelayakan Uang (STKU) pada seluruh lokasi sampel sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan. Survei tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kelayakan dan kualitas uang Rupiah yang beredar di masyarakat, sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dalam memastikan ketersediaan uang yang berkualitas dan layak edar. Hasil STKU selanjutnya dianalisis sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan PUR. Rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperkuat strategi pemenuhan kebutuhan uang Rupiah, meningkatkan kualitas uang layak edar, serta mengoptimalkan kegiatan distribusi, pengolahan, dan penarikan uang tidak layak edar (UTLE), sehingga ketersediaan Rupiah tetap terjaga secara merata di seluruh wilayah NKRI.

Penguatan pengelolaan Rupiah secara terintegrasi dilakukan guna menjamin ketersediaan uang Rupiah yang merata, aman, dan berkualitas di seluruh wilayah NKRI, sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Strategi pengedaran Rupiah terus diperkuat dengan mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, perkembangan demografi dan pola kebutuhan masyarakat, kesiapan jaringan distribusi, serta perkembangan digitalisasi. Implementasinya didukung oleh sinergi Bank Indonesia dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem PUR, termasuk koordinasi dan sosialisasi kepada DPR RI mengenai pengelolaan Rupiah yang mencakup keseluruhan tahapan 6P PUR, yaitu perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan.

16) **Terwujudnya industri jasa sistem pembayaran yang memenuhi Standard Kompetensi, Manajemen Risiko dan Infrastruktur Teknologi (KMI)**

Bank Indonesia terus berupaya mendorong implementasi Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran (SKSP) melalui pemantauan penyelenggara SKSP secara terintegrasi serta akselerasi pemenuhan kewajiban SKSP oleh pelaku industri. Untuk menjaga kualitas dan kredibilitas penyelenggaraan SKSP, Bank Indonesia memperkuat perangkat SKSP melalui pengkinian materi ajar, *training of trainers* bagi instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Sistem Pembayaran (LPK-SP) dan asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Sistem Pembayaran (LSP-SP), serta peningkatan peran aktif Forum LPK-SP dan LSP-SP.

Sejalan dengan perkembangan sistem pembayaran, kebutuhan industri, serta arah kebijakan dan regulasi terkini, Bank Indonesia juga melakukan asesmen terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang sistem pembayaran sebagai bagian dari upaya *continuous improvement*. Asesmen tersebut dilakukan melalui sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain asosiasi industri sistem pembayaran dan Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan (FKDOP), untuk mengidentifikasi kebutuhan pengkinian kompetensi SDM pelaku industri. Sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi, Bank Indonesia berkoordinasi dengan BNSP dan LSP SP dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi sistem pembayaran melalui skema Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ), sehingga membuka opsi perluasan jangkauan pelaksanaan sertifikasi kompetensi ke depan.

Dari sisi pengawasan, Bank Indonesia terus memperkuat pengawasan dan implementasi pengaturan industri sistem pembayaran guna membangun ekosistem pembayaran yang sehat dan bertanggung jawab, dengan tetap menjaga kepatuhan, keamanan transaksi, pelindungan konsumen, keandalan infrastruktur dan stabilitas sistem pembayaran. Penguatan tersebut dilakukan melalui pemantauan berkala atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan terhadap industri jasa sistem pembayaran untuk memastikan efektivitas perbaikan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan mitigasi risiko secara berkelanjutan. Penguatan pengawasan juga mencakup penilaian atas manajemen risiko dan infrastruktur teknologi informasi perbankan untuk memastikan keamanan, keandalan, dan keberlangsungan penyelenggaraan sistem pembayaran, serta penilaian atas rencana pengembangan produk, aktivitas, dan/atau kerja sama Penyelenggara Jasa Pembayaran (PSP). Implementasi pengaturan juga didukung oleh koordinasi dengan industri dalam penyusunan dan penerapan pengaturan bagi penyelenggara penunjang.

17) **Infrastruktur Sistem Pembayaran yang aman dan andal**

Bank Indonesia terus menjaga kelancaran, keamanan, dan keandalan penyelenggaraan sistem pembayaran, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun infrastruktur industri. Kelancaran, keamanan, dan keandalan BI-RTGS, BI-FAST, dan SKNBI terus dijaga agar senantiasa memenuhi standar internasional tata kelola dan manajemen risiko. Operasionalisasinya didukung pemantauan proses transaksi, pengelolaan kapasitas dan kinerja sistem, penanganan gangguan, serta penerapan mekanisme keberlangsungan layanan guna meminimalkan risiko operasional dan menjaga kontinuitas layanan sistem pembayaran.

Untuk infrastruktur sistem pembayaran di industri, Bank Indonesia secara berkala memantau ketersediaan dan kesiapan infrastruktur guna memastikan kecukupan kapasitas, keandalan teknologi informasi dan komunikasi, kesiapan sistem cadangan, serta efektivitas mekanisme penanganan gangguan oleh penyelenggara. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga tingkat ketersediaan layanan, memperkuat ketahanan operasional industri, serta memastikan transaksi masyarakat tetap dapat berlangsung secara aman, lancar, dan efisien.

Untuk memperkuat resiliensi penyelenggaraan SP-FMI, serta sejalan dengan pengembangan SP-FMI Bank Indonesia dalam kerangka *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang Indonesia (BPPU) 2030, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan industri. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia menyelenggarakan Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan (FKDOP) bagi peserta SP-FMI Bank Indonesia. Forum tersebut merupakan sarana diskusi dan koordinasi untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengaturan dan operasional infrastruktur. Dalam FKDOP, Bank Indonesia mendiseminasikan kebijakan dan menyampaikan perkembangan terkini penyelenggaraan SP-FMI BI, serta mendiskusikan berbagai isu strategis sistem pembayaran dengan peserta. Bank Indonesia juga melaksanakan *focus group discussion* (FGD) dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan perwakilan peserta BI-RTGS untuk mengevaluasi fitur dan layanan BI-RTGS serta memperoleh masukan bagi pengembangan operasional dan layanan ke depan yang sejalan dengan standar resiliensi *Principle for Financial Market Infrastructures* (PFMI).

Sinergi dan koordinasi internasional juga terus diperkuat untuk memastikan penyelenggaraan dan pengembangan infrastruktur SP-FMI selaras dengan inisiatif regional, standar internasional, dan *best practices*. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melaksanakan fasilitasi, katalisasi, dan koordinasi melalui *Executives' Meeting of Asia-Pacific Central Banks Working Group* (EMEAP) dan pertemuan ASEAN+3 *Cross-Border Settlement Infrastructure* Forum (CSIF). Keterlibatan dalam berbagai forum tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur SP-FMI yang relevan dengan perkembangan regional, sekaligus menjaga kepercayaan lembaga internasional, otoritas terkait, dan industri, termasuk investor internasional.

18) **Terwujudnya kebijakan dan program pelindungan konsumen nasional**

Bank Indonesia terus memperkuat pelindungan konsumen melalui pelaksanaan edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan literasi, kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan secara aman. Pada triwulan II 2026, edukasi pelindungan konsumen dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Peresmian Gerai Cakrawala Edukasi dan Ruang Diskusi Aman untuk Semua Konsumen Indonesia (CERDAS) Peduli, Kenali, Adukan (PeKA) di Universitas Sebelas Maret, Hari Konsumen Nasional (HARKONAS), Jogja Financial Festival, dan Karya Kreatif Jawa Barat. Kegiatan tersebut mencakup penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban konsumen, karakteristik dan risiko produk serta layanan keuangan, keamanan bertransaksi, serta mekanisme

penyampaian pengaduan. Pelaksanaan edukasi turut diperkuat melalui sinergi dengan K/L, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan terkait guna memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan efektivitas pelindungan konsumen.

Selain melalui edukasi, Bank Indonesia secara berkala memantau tindak lanjut dan penyelesaian penanganan pengaduan konsumen oleh penyelenggara. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pengaduan ditindaklanjuti secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Hasil pemantauan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola penanganan pengaduan, meningkatkan kepatuhan penyelenggara, dan menyempurnakan kebijakan pelindungan konsumen.

PS 06 Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran, serta pelindungan konsumen antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan digital, serta semakin meningkatnya kompleksitas risiko sistem pembayaran, sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan mitra strategis semakin penting untuk membangun ekosistem pembayaran yang cepat, aman dan andal. Peningkatan transaksi digital, perluasan pelaku industri, perkembangan *fintech* dan *e-commerce* membuka peluang bagi hadirnya layanan pembayaran yang semakin cepat, aman, dan efisien, sekaligus meningkatkan tantangan dalam kesiapan infrastruktur, pengelolaan risiko, pelindungan konsumen dan penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), serta pengelolaan uang Rupiah yang optimal. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah, otoritas terkait, asosiasi dan industri untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan ekosistem ekonomi dan keuangan digital, mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah dan andal, serta memastikan ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

19) **Terjalinnya sinergi dalam rangka mendukung percepatan ekonomi dan keuangan digital**

Pada triwulan II 2026, sinergi dan kolaborasi kebijakan sistem pembayaran antara Bank Indonesia dengan otoritas terkait telah berhasil memperluas digitalisasi dan konektivitas sistem pembayaran, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Hal tersebut tecermin pada perluasan implementasi QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) pada layanan transportasi publik di Sulawesi Selatan dan Batam guna meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pembayaran masyarakat. Bank Indonesia juga memperluas kerja sama QRIS Antarnegara dengan peluncuran implementasi QRIS Antarnegara Indonesia–Korea Selatan dan Indonesia–Tiongkok. Penguatan konektivitas tersebut diarahkan untuk memfasilitasi transaksi lintas negara yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien, sekaligus mendukung aktivitas perdagangan, pariwisata, UMKM, serta penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan KATALIS P2DD II yang disinergikan dengan program pelatihan DIGDAYA untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi digitalisasi transaksi. Evaluasi kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah melalui Championship TP2DD 2026 juga terus dilakukan untuk mendorong inovasi dan replikasi praktik terbaik, serta kelanjutan dukungan fasilitasi uji coba digitalisasi bantuan sosial. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional.

20) **Terjalinnya sinergi dalam rangka mendukung Pengelolaan Uang Rupiah**

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) yang efektif, aman, dan terintegrasi. Pada triwulan II 2026, koordinasi dilakukan dengan Kementerian Keuangan melalui penyelenggaraan Forum Mata Uang triwulan II 2026, serta dengan mitra strategis lainnya, seperti DPR RI melalui diskusi perkembangan dan arah kebijakan PUR. Sinergi dengan industri juga diperkuat melalui pelaksanaan Forum Industri Pengelolaan Uang Rupiah (FORIN PUR) yang dihadiri oleh APJATIN, FKDOP, Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR),

Press Statement Penguatan Sinergi Pemberantasan Rupiah Palsu di Jakarta.

dan perbankan dalam rangka sosialisasi regulasi dan kebijakan PUR, serta koordinasi, pertukaran informasi, dan penyelarasan langkah dalam rangka penguatan kebijakan industri PUR dan peningkatan kualitas layanan dan tata kelola PUR ke depan.

Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi antarlembaga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan uang Rupiah palsu guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah. Koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Rakor Botasupal) yang mencakup penguatan pemahaman mengenai unsur pengaman atau *security feature* yang digunakan pada uang Rupiah serta edukasi mengenai cara mengenali ciri-ciri keaslian uang Rupiah. Bank Indonesia juga melakukan pemetaan dan penyesuaian terhadap Kerja Sama Operasional (KSO) yang telah berjalan antara PJPUR dan Kantor Koordinator guna meningkatkan efektivitas, kejelasan peran, dan kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pada Mei 2026 telah dilaksanakan pemusnahan kertas uang Rupiah palsu di Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk memastikan uang palsu yang telah selesai diproses sesuai ketentuan tidak beredar kembali di masyarakat.

Boks.6: Pemusnahan kertas uang Rupiah palsu di Bank Indonesia

Press Statement Penguatan Sinergi Pemberantasan Rupiah Palsu di Jakarta.

Bank Indonesia (BI) bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareksrim Polri) dan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), yaitu Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Keuangan, berkomitmen penuh dalam upaya pemberantasan uang Rupiah palsu.

Sebagaimana mandat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta sebagai langkah menjaga keamanan

transaksi menggunakan uang Rupiah, Bank Indonesia memperkuat komitmen dalam pemberantasan uang Rupiah palsu, yang salah satunya diwujudkan dalam pelaksanaan pemusnahan kertas uang Rupiah palsu di Bank Indonesia, pada tanggal 13 Mei 2026. Hadir pada kesempatan ini Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali bersama para Pimpinan Badan Reserse Kriminal Polri dan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pimpinan Kejaksaan Agung RI, Bea Cukai, Pengadilan Negeri, Polda, serta Kejaksaan Tinggi Negeri. Pemusnahan Rupiah palsu dilakukan di Bank Indonesia menggunakan mesin racik yang menghasilkan cacahan kertas yang sangat kecil sehingga tidak lagi menyerupai uang. Pemusnahan juga dilakukan sesuai dengan prosedur ketat sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berperan vital dalam mencegah peredaran uang Rupiah palsu. Untuk itu, Bank Indonesia bersama Botasupal senantiasa menggalakkan kampanye Cinta, Bangga, Paham Rupiah. Dalam kampanye ini, Bank Indonesia mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan keaslian uang Rupiah kertas melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta senantiasa merawat uang Rupiah dengan baik agar tetap mudah dikenali keasliannya. Rawat Rupiah dengan menerapkan 5 Jangan: Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi.

21) **Terjalinnya sinergi terkait penerapan prinsip Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), dan pengawasan Sistem Pembayaran (SP), serta penegakan perilaku pasar (*market conduct*)**

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka mendukung implementasi program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM) pada Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR). Dengan koordinasi tersebut, dihasilkan penyelarasan pemahaman dan langkah pengawasan sebagai landasan untuk meningkatkan kepatuhan PJPUR terhadap ketentuan yang berlaku, serta memperkuat mitigasi risiko penyalahgunaan kegiatan pengolahan uang Rupiah dalam rangka memperkuat pencegahan tindak pidana keuangan.

Sinergi pengawasan sistem pembayaran dan penegakan *market conduct* juga terus diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PSP bank, memperkuat pelindungan konsumen, serta menjaga keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi Bank Indonesia dengan OJK dalam pelaksanaan KKD I terkait rencana pemeriksaan terhadap PSP bank. Koordinasi menghasilkan penyelarasan objek, ruang lingkup, metodologi, dan jadwal pemeriksaan sistem pembayaran serta *market conduct*, serta pertukaran data dan informasi sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

22) **Terjalinnya sinergi terkait Pelindungan Konsumen**

Pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen serta kewaspadaan terhadap risiko produk dan layanan keuangan terus diperluas melalui sinergi peningkatan efektivitas pelindungan konsumen antara Bank Indonesia dengan kementerian dan lembaga terkait. Pada triwulan II 2026, sinergi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional sebagai *flagship event* bersama Kementerian Perdagangan. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pelindungan konsumen yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Literasi dan keberdayaan konsumen juga terus ditingkatkan untuk memperkuat pelindungan konsumen di tengah perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang semakin pesat. Pelaksanaan edukasi pelindungan konsumen diperluas kepada kelompok masyarakat prioritas, antara lain Pekerja Migran Indonesia dan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN. Edukasi mencakup pemahaman mengenai karakteristik dan risiko produk serta layanan keuangan, keamanan bertransaksi, pencegahan penipuan, serta mekanisme penanganan pengaduan. Untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaksanaan edukasi, Bank Indonesia turut menyusun modul edukasi bagi sektor prioritas yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan tingkat kerentanan masing-masing kelompok sasaran.

PS 07 Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan perubahan lanskap pasar keuangan, Bank Indonesia terus memperkuat pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta

FGD Implementasi Ketentuan Underlying Transaksi Valas bersama mitra kerja di Jakarta

Asing (PUVA) untuk mendukung efektivitas kebijakan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada triwulan II 2026, eskalasi konflik di Timur Tengah meningkatkan volatilitas pasar keuangan global, disertai penguatan dolar AS dan kenaikan premi risiko investasi yang memberikan tekanan terhadap aliran modal dan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, digitalisasi dan inovasi keuangan terus mendorong perubahan lanskap pasar keuangan sehingga memerlukan penguatan respons kebijakan dan pengawasan. Dalam merespons dinamika tersebut, Bank Indonesia memperkuat strategi OM *pro-market* untuk menarik aliran masuk portofolio asing sekaligus mendorong pendalaman PUVA guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur, mengawasi, dan mengembangkan PUVA untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

23) **Peningkatan volume transaksi dan likuiditas, serta harga yang transparan dan kredibel dalam rangka mewujudkan PUVA yang modern dan maju**

Bank Indonesia terus memperkuat pengembangan PUVA untuk mewujudkan pasar keuangan domestik yang semakin dalam, likuid, efisien, transparan, dan berdaya tahan. Pengembangan dilakukan secara terintegrasi melalui perluasan produk dan transaksi, penguatan kredibilitas pembentukan harga (*pricing*), pengembangan ekosistem Derivatif PUVA, serta pendalaman PUVA Syariah. Berbagai upaya tersebut didukung oleh penyempurnaan pengaturan dan tata kelola, harmonisasi praktik pasar dengan standar internasional, penguatan pelaporan dan perizinan, serta pengembangan infrastruktur pasar keuangan. Hingga triwulan II 2026, volume transaksi pasar uang Rupiah mencapai Rp61,27 triliun, transaksi pasar uang valuta asing sebesar USD13,1 miliar, dan transaksi pasar uang syariah sebesar Rp4,6 triliun. Pengembangan PUVA secara terintegrasi dilakukan melalui berbagai upaya sebagai berikut.

a) **Pengembangan Produk PUVA**

Pengembangan produk PUVA terus diarahkan untuk memperluas pilihan instrumen dan transaksi, meningkatkan likuiditas, serta mendorong diversifikasi aktivitas pasar. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan transaksi valuta asing, termasuk transaksi berdasarkan prinsip syariah, guna memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Penyempurnaan tersebut antara lain mencakup penyesuaian *threshold* transaksi valuta asing terhadap Rupiah dengan dokumen *underlying* untuk mendukung pengembangan produk dan aktivitas transaksi di pasar valuta asing.

Diversifikasi transaksi valuta asing juga terus diperluas untuk memperkuat kedalaman dan resiliensi pasar domestik. Pengembangan ekosistem PUVA dalam Renminbi Tiongkok (RMB) dan Yen Jepang (JPY) dilanjutkan melalui asesmen dan koordinasi dengan berbagai pemangku

kepentingan. Sejalan dengan itu, harmonisasi praktik pasar dengan standar internasional terus diperkuat, antara lain melalui pengembangan standar kontrak margin transaksi derivatif PUVA bekerja sama dengan *International Swaps and Derivatives Association* (ISDA), asosiasi industri, praktisi hukum, perbankan, dan lembaga terkait. Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperluas alternatif transaksi, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya dukung PUVA terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan.

b) **Pengembangan *Pricing* PUVA**

Bank Indonesia terus memperkuat pembentukan harga (*price discovery*) yang transparan dan kredibel melalui pengembangan referensi harga PUVA yang representatif dan dapat diandalkan oleh pelaku pasar. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia memublikasikan kurva imbal hasil transaksi pasar uang yang menggambarkan struktur suku bunga pasar uang pada berbagai tenor. Publikasi ini dapat menjadi referensi bagi pelaku pasar dalam melakukan valuasi instrumen, penentuan harga transaksi, pengelolaan risiko, serta pengambilan keputusan investasi dan pendanaan.

Penguatan *pricing* juga didukung oleh penyediaan referensi harga melalui Indonesia *Overnight Index Average* (INDONIA) dan Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR). INDONIA berperan sebagai suku bunga acuan transaksi Rupiah, sementara JISDOR menjadi referensi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. Ketersediaan referensi tersebut mendukung transparansi dan efisiensi pembentukan harga sekaligus memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan pendalaman pasar keuangan domestik.

c) **Pengembangan Derivatif PUVA**

Pengembangan Derivatif PUVA terus diperkuat untuk membentuk ekosistem transaksi derivatif yang transparan, tertata, dan didukung tata kelola yang baik. Sejalan dengan pemberlakuan kewajiban pelaporan Derivatif PUVA kepada Bank Indonesia sejak 2 Februari 2026, pada triwulan II 2026 pengembangan difokuskan pada penguatan sistem pelaporan dan kesiapan pelaku pasar, termasuk persiapan pengembangan sistem pelaporan *online*. Penguatan pelaporan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan data transaksi serta profil pengguna jasa sebagai basis pengawasan berbasis risiko dan perumusan kebijakan pengembangan Derivatif PUVA.

Penguatan ekosistem Derivatif PUVA juga dilakukan melalui penyempurnaan proses perizinan dan tata kelola penyelenggara. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melaksanakan fungsi perizinan, antara lain terkait perubahan kelembagaan Derivatif PUVA dan penyesuaian ketentuan serta prosedur (*rule book*) penyelenggara IPK. Penyempurnaan proses perizinan turut dilakukan melalui penyusunan petunjuk teknis yang selaras dengan pengembangan aplikasi perizinan Bank Indonesia EASE tahap 2. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan standardisasi, efektivitas, dan efisiensi proses perizinan sekaligus mendukung ekosistem Derivatif PUVA yang sehat dan kredibel.

d) **Pengembangan PUVA Syariah**

Bank Indonesia terus memperkuat PUVA Syariah sebagai bagian dari pendalaman pasar keuangan syariah dan penguatan pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Pengembangan dilakukan sejalan dengan implementasi BPPU melalui pendekatan 3P+I yang mencakup produk, pelaku, *pricing*, dan infrastruktur.

Dari sisi produk, pengembangan difokuskan pada penguatan landasan pengaturan untuk mendukung perluasan instrumen dan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia menerbitkan sejumlah ketentuan yang mencakup perubahan peraturan pelaksanaan PLJPS bagi Bank Umum Syariah, penyempurnaan ketentuan transaksi pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah, serta ketentuan internal yang mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, PLJPS, dan transaksi pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Penyempurnaan tersebut memberikan landasan bagi pengembangan aktivitas PUVA Syariah yang semakin beragam dengan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Dari sisi *pricing*, pengembangan difokuskan pada pembentukan harga acuan yang representatif, transparan, dan kredibel untuk mendukung aktivitas transaksi PUVA Syariah. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan pendalaman rencana pengembangan sistem yang mendukung proses *price discovery* dan publikasi *reference rate* syariah. Ketersediaan harga acuan tersebut diharapkan dapat memperkuat referensi bagi

pelaku pasar dalam melakukan transaksi, meningkatkan efisiensi pembentukan harga, serta mendukung pendalaman dan peningkatan likuiditas PUVA Syariah.

24) **Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang aman dan andal serta Pelaku yang profesional dalam rangka mewujudkan PUVA yang modern dan maju**

Bank Indonesia terus memperkuat IPK untuk mendukung pendalaman PUVA melalui ekosistem pasar yang semakin terintegrasi, efisien, aman, dan berdaya tahan. Penguatan diarahkan pada peningkatan konektivitas infrastruktur transaksi, kliring, dan setelmen secara *end-to-end*, perluasan akses pelaku pasar, penguatan mitigasi risiko, serta peningkatan kualitas data dan transparansi pasar. Berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari transformasi IPK menuju infrastruktur pasar keuangan yang modern, andal, dan selaras dengan praktik terbaik internasional.

Pada triwulan II 2026, transformasi IPK terus dilanjutkan melalui penguatan infrastruktur pada seluruh tahapan transaksi. Pada sisi *front-end*, pengembangan dan optimalisasi BI-ETP serta penguatan peran *market operator* terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keandalan pelaksanaan transaksi. Pada sisi kliring, penguatan CCP dilakukan melalui upaya memperoleh status *recognized* CCP di berbagai yurisdiksi, perluasan keanggotaan dan cakupan transaksi yang dapat dikliringkan, serta pengembangan interkoneksi dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya. Sementara itu, pada sisi setelmen, pengembangan BI-SSSS Gen III terus dilanjutkan untuk meningkatkan keandalan, kapasitas, keamanan, dan fleksibilitas layanan penatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga. Penguatan konektivitas pada keseluruhan tahapan tersebut diarahkan untuk mendukung pemrosesan transaksi pasar keuangan yang semakin terintegrasi secara *end-to-end*.

Penguatan IPK turut didukung oleh pengembangan infrastruktur data untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pembentukan harga di PUVA. Pengembangan dilakukan melalui penguatan integrasi, standardisasi, dan pengelolaan data transaksi sehingga dapat mendukung ketersediaan informasi pasar yang berkualitas, pembentukan harga yang kredibel, pengawasan berbasis data, serta perumusan kebijakan yang semakin akurat dan responsif.

Sejalan dengan penguatan infrastruktur, Bank Indonesia terus meningkatkan kualitas pelaku dan tata kelola penyelenggaraan PUVA untuk membentuk pasar yang profesional, kredibel, dan berintegritas. Dari sisi pengaturan, penguatan dilakukan melalui penerbitan PADG mengenai Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara IPK, serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* (SRO) PUVA untuk memperkuat standar, persyaratan, tata kelola, dan tanggung jawab pelaku, penyelenggara IPK, serta SRO PUVA. Penguatan tersebut diarahkan untuk mendukung aktivitas pasar yang teratur, wajar, transparan, dan efisien.

Penguatan profesionalisme pelaku juga dilakukan melalui penyempurnaan standar kompetensi yang semakin relevan dengan perkembangan PUVA. Pada 14 Mei 2026, ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 118 Tahun 2026 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Tresuri Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagai hasil kaji ulang standar sebelumnya. Penyempurnaan SKKNI memperluas cakupan dari 6 menjadi 25 unit kompetensi, termasuk aspek manajemen risiko, integritas, dan etika pasar, serta disertai penyesuaian nomenklatur menjadi SKKNI Bidang Tresuri PUVA. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat menjaga relevansi kompetensi pelaku dengan perkembangan industri sekaligus memperkuat profesionalisme dan integritas pasar.

Pada PUVA Syariah, penguatan difokuskan pada perluasan basis pelaku, peningkatan kompetensi, dan standardisasi transaksi untuk mendukung pendalaman pasar uang syariah. Perluasan basis pelaku antara lain didorong melalui kesepakatan kerja sama SiPA (Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank) antara BSN, Aladin, dan BCA Syariah. Dari sisi kompetensi, Bank Indonesia mendukung pelaksanaan uji sertifikasi *treasury dealer* syariah melalui penyediaan tenaga ahli asesor serta mendorong pengembangan profesi Ahli Syariah Pasar Uang untuk memperkuat ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kesyariahan dan pemahaman praktik transaksi pasar uang. Sementara itu, standardisasi transaksi diperkuat melalui penyelesaian *handbook* Repo Syariah, SiPA, Lindung Nilai Syariah, dan Surat Berharga Komersial (SBK) Syariah oleh Kelompok Kerja PUVA Syariah sebagai pedoman pelaksanaan transaksi yang terstandardisasi dan sesuai dengan prinsip syariah. Keseluruhan upaya tersebut diarahkan untuk membentuk pasar uang syariah yang semakin dalam, likuid, inklusif, profesional, dan berdaya tahan.

Boks.7: Sosialisasi Penerbitan *Market Code of Conduct* (MCoC) Edisi V untuk Perkuat Integritas Pasar Keuangan

Launching dan Sosialisasi Market Code of Conduct Edisi V.

Meningkatnya ketidakpastian global akibat tekanan geopolitik dan dinamika kebijakan ekonomi global memperkuat urgensi penerapan kode etik oleh pelaku pasar keuangan. Kepercayaan terhadap pasar tidak hanya dibangun melalui regulasi dan infrastruktur yang kuat, tetapi juga melalui perilaku pelaku pasar yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta sesuai *best practices*. Kode etik pasar berperan strategis dalam menjaga kredibilitas dan integritas pasar, meningkatkan efisiensi pembentukan harga, memperkuat kepercayaan investor, serta memitigasi risiko yang timbul akibat pelanggaran etika maupun penyimpangan perilaku profesional.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pasar keuangan Indonesia yang aman, kompetitif, dan berintegritas, Bank Indonesia mendukung peluncuran *Market Code of Conduct* (MCoC) atau *Brown Book* Edisi V pada tanggal 15 April 2026. Peluncuran tersebut diprakarsai oleh Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) bersama Association Cambiste Internationale – Financial Markets Association (ACI FMA).

Selain memuat prinsip-prinsip dalam Global FX Code, penerbitan MCoC Edisi V menjadi tonggak penting karena menempatkan Indonesia sebagai negara pertama yang mengadopsi pembaruan *ACI FMA Handbook* 2026 ke dalam standar domestik. MCoC Edisi V memuat prinsip-prinsip utama yang mencakup fungsi pasar, perilaku profesional *(personal conduct)*, kesiapan operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan aspek keamanan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong terselenggaranya transaksi pasar keuangan yang semakin etis, transparan, aman, dan berintegritas. Lebih lanjut, MCoC Edisi V diharapkan menjadi rujukan utama bagi pelaku pasar keuangan di Indonesia dalam membangun, menerapkan, dan menegakkan standar etika serta praktik pasar yang baik.

Pendalaman pasar keuangan yang kuat dan berkelanjutan perlu berjalan seiring dengan penguatan standar etika dan perilaku profesional guna menjaga integritas serta kepercayaan terhadap pasar. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia terus mendorong seluruh pelaku pasar untuk menerapkan MCoC Edisi V secara konsisten dan disertai komitmen yang kuat.

Sinergi antara otoritas, asosiasi, dan pelaku pasar diharapkan semakin memperkokoh fondasi pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) Indonesia yang modern, aktif, kompeten, kompetitif, dan berintegritas, sejalan dengan arah dan sasaran *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

25) **Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah, OJK, dan LPS serta asosiasi dalam kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan literasi keuangan untuk pendalaman pasar keuangan nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.**

Bank Indonesia mendorong penguatan landasan hukum penerapan *transfer of title* (ToT) sebagai bagian dari reformasi pasar keuangan dan fondasi bagi pengembangan transaksi derivatif yang sejalan dengan praktik internasional. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia telah menyusun asesmen hukum ToT secara komprehensif dan melakukan koordinasi serta pembahasan intensif bersama Kementerian Keuangan, OJK, akademisi, praktisi, dan pelaku industri, termasuk

APUVINDO. Rangkaian proses ini menjadi dasar dalam merumuskan kerangka ToT yang selanjutnya menjadi bagian dari posisi hukum Bank Indonesia dalam pembahasan amandemen UU P2SK bersama Pemerintah dan DPR RI. Upaya tersebut memperoleh hasil positif dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang secara eksplisit mengatur *transfer margin* melalui mekanisme pengalihan hak milik *(transfer of title)*, termasuk hak penerima margin untuk menggunakan, mengalihkan, atau menjaminkan margin, kewajiban pengembalian margin yang setara, serta pelindungan margin dari harta pailit atau harta dalam likuidasi dalam kondisi tertentu. Penguatan kepastian hukum tersebut menjadi fondasi penting bagi penerapan margin yang lebih efektif, penguatan manajemen risiko, optimalisasi implementasi CCP, serta peningkatan efisiensi dan pendalaman PUVA. Sebagai tindak lanjut, Bank Indonesia akan menerjemahkan mandat UU P2SK tersebut ke dalam kerangka pengaturan di PUVA, serta melanjutkan koordinasi dengan otoritas dan pelaku industri untuk memastikan kesiapan implementasi ToT secara efektif dan selaras dengan standar internasional.

Bank Indonesia terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di pasar keuangan untuk mendorong perluasan basis investor ritel domestik. Pada triwulan II 2026, program Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) diselenggarakan di berbagai wilayah, antara lain LIKE IT Series #1 di Palembang, LIKE IT Series #2 di Ambon, dan LIKE IT Series #3 di Yogyakarta, bekerja sama dengan KPwDN dan pemangku kepentingan di sektor keuangan. Rangkaian kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai karakteristik, manfaat, dan risiko berbagai instrumen investasi, termasuk pentingnya berinvestasi secara legal, aman, dan sesuai dengan profil risiko. Perluasan penyelenggaraan LIKE IT di berbagai daerah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi, memperluas jumlah dan sebaran investor ritel, serta memperkuat basis investor domestik guna mendukung pendalaman dan ketahanan pasar keuangan nasional.

PS 08 Merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah serta memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, Bank Indonesia terus memperkuat kontribusi kebijakannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Fragmentasi perdagangan, volatilitas pasar keuangan internasional, dan meningkatnya ketegangan geopolitik memengaruhi perekonomian domestik melalui perdagangan, investasi, pembiayaan, dan aliran modal. Dalam kondisi tersebut, penguatan sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan (IEKB) sebagai bagian dari bauran kebijakan *pro-growth*. Penguatan dilakukan melalui perluasan akses pasar dan pembiayaan, peningkatan kapasitas dan literasi pelaku usaha, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan sinergi antarpemangku kepentingan. Upaya dimaksud juga diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi hijau dan komitmen Indonesia untuk mencapai *net zero emissions* pada 2060 atau lebih cepat.

Pengembangan IEKB dilakukan secara terintegrasi dengan ekonomi dan keuangan syariah guna memperluas akses ekonomi dan keuangan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha, serta mendorong pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing industri halal nasional untuk mendukung Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Di sisi domestik, perluasan akses pembiayaan kepada UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Persepsi risiko kredit, keterbatasan agunan, kesenjangan informasi, kualitas pencatatan keuangan, dan kapasitas usaha yang belum merata masih menjadi kendala dalam memperoleh pembiayaan formal, termasuk yang berbasis syariah.

Merespons berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat ekosistem IEKB dan ekonomi-keuangan syariah melalui perluasan akses pasar dan pembiayaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM, serta pengembangan industri halal. Penguatan literasi, digitalisasi, dan tata kelola keuangan sosial syariah turut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan ekosistem. Sinergi dengan Pemerintah, otoritas terkait, industri keuangan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat untuk mendorong sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sepanjang triwulan II 2026, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi-keuangan

inklusif dan hijau baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah serta memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

26) **Tercapainya pertumbuhan pembiayaan syariah, akses keuangan serta akses pasar bagi UMKM dan pelaku usaha syariah untuk mendukung program strategis Pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**

Bank Indonesia terus memperkuat akses pembiayaan dan pasar bagi UMKM dan pelaku usaha syariah melalui pengembangan ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut antara lain ditempuh melalui fasilitasi *business matching* kredit/pembiayaan dalam rangkaian Bulan Pembiayaan Syariah (BPS), Festival Ekonomi Syariah (FESyar), dan Karya Kreatif Indonesia (KKI), serta melalui *Strategic Regional Program* (SRP) bersama KPwDN. Pada triwulan II 2026, BPS dilaksanakan secara terintegrasi melalui tiga tahapan, yaitu *Sharia Business Literacy* untuk meningkatkan literasi dan kapasitas pelaku usaha; *Sharia Business Linkage* untuk mempertemukan pelaku usaha dengan sumber pembiayaan melalui kurasi, pendampingan, *bootcamp*, *business matching*, pengembangan skema pembiayaan inovatif, serta Gerakan Sadar Wakaf khususnya wakaf produktif; dan *Sharia Business Showcase* untuk menampilkan realisasi dan komitmen pembiayaan (*business deals*). Pelaksanaan BPS didukung kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), perusahaan teknologi finansial, asosiasi, dan lembaga sosial syariah guna memperluas jangkauan pembiayaan dan akses pasar.

Penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah juga dilakukan melalui rangkaian FESyar di tiga kawasan, yaitu Jawa, Sumatera, dan Kawasan Timur Indonesia. Pada triwulan II 2026, penguatan edukasi dan literasi melalui FESyar difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu (i) forum ekonomi dan edukasi publik melalui *Sharia Economic Forum* dan kampanye *Halal Lifestyle*; (ii) peningkatan kapasitas melalui *Training of Trainers* (ToT), edukasi, serta pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM; dan (iii) penguatan kewirausahaan dan inovasi syariah melalui Olimpiade Ekonomi dan Keuangan Syariah (OESN) serta program kemandirian ekonomi pesantren. Implementasinya diperkuat melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain melalui *Talkshow* Halal bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), ToT bagi *content creator*, guru, dan dai, serta pengembangan kewirausahaan pesantren.

Sinergi pengembangan UMKM dan pelaku usaha syariah di daerah terus diperluas melalui pelaksanaan 13 SRP di lima wilayah KPwDN hingga triwulan II 2026. Berbagai upaya tersebut turut mendukung penguatan akses pembiayaan, yang tecermin pada pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah sebesar 11,43% (yoy) pada triwulan II 2026. Secara keseluruhan, penguatan ekosistem pembiayaan, edukasi dan literasi, serta sinergi di daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha, memperluas akses pembiayaan dan pasar, serta memperkuat kontribusi ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

27) **Terlaksananya program pemberdayaan, literasi, dan edukasi ekonomi-keuangan inklusif dan hijau baik konvensional maupun syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**

Bank Indonesia terus mendorong peningkatan daya saing UMKM dan pelaku usaha syariah (PUS) melalui penguatan kapasitas, digitalisasi, perluasan akses pasar dan pembiayaan, serta peningkatan produktivitas. Pada triwulan II 2026, penguatan tersebut antara lain dilakukan melalui peluncuran Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu (TKUT) 2026 yang mengintegrasikan pengembangan usaha konvensional dan syariah melalui empat inisiatif unggulan, yaitu Cangkir Barista, Citra Nusa, Air Berkah Indonesia, dan Tani Berkah Indonesia.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan pada penguatan ekosistem produk halal, keuangan syariah, serta peningkatan literasi, inklusi, dan *halal lifestyle*. Implementasinya dilakukan secara terintegrasi di pusat dan daerah, antara lain melalui program Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA) 2026 pada sektor *halal food* dan *modest fashion*. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha melalui pendampingan serta memperluas akses pasar melalui fasilitasi keikutsertaan pelaku usaha dalam berbagai ajang promosi domestik dan internasional.

Penguatan kemandirian ekonomi pesantren terus diperluas melalui pengembangan ekosistem usaha yang semakin produktif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya tersebut ditempuh melalui pengembangan *virtual market*, kerja sama perdagangan antarpesantren, penguatan kelembagaan melalui Koperasi Digital Pesantren Nusantara (Pesantara), serta perluasan akses pembiayaan. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia juga memulai *pilot project* Program Kemandirian Ekonomi Pesantren berbasis komoditas

Peluncuran Kalkulator Hijau Versi 2 di Jakarta.

pangan strategis di Aceh, Kalimantan Barat, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Program mencakup peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan dan pemasaran, perluasan kerja sama antarpesantren, serta penerapan ekonomi hijau dan digitalisasi.

Pengembangan model usaha pesantren turut diperkuat melalui Program TKUT 2026, khususnya Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Kedua program diarahkan untuk mengembangkan usaha air minum dalam kemasan (AMDK) berbasis sumber daya lokal serta usaha pertanian berbasis teknologi *greenhouse* dan hidroponik. Implementasinya dilakukan melalui pendampingan terpadu dari hulu hingga hilir, termasuk penguatan tata kelola dan manajemen kewirausahaan, guna meningkatkan kemandirian dan daya saing pesantren sekaligus mendukung ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi daerah.

Peningkatan literasi dan kapasitas pelaku usaha juga terus diperkuat melalui berbagai program edukasi dan pengembangan kompetensi. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia menyelenggarakan 33 kegiatan, antara lain *Sharia Economic and Financial Outlook* (ShEFO) 2026, ToT ekonomi dan keuangan syariah bagi guru, *content creator*, dan da'i, Olimpiade Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional, serta penguatan kapasitas UMKM melalui SIAPIK dan sosialisasi model bisnis. Berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan literasi pelaku usaha, termasuk literasi keuangan inklusif dan hijau, serta memperluas akses UMKM dan PUS terhadap ekosistem usaha yang semakin produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

28) **Terjalinnya koordinasi/kerja sama/kesepakatan dengan otoritas (termasuk OJK, dan Pemerintah)/ Asosiasi/Komunitas/Lembaga Nasional dan Internasional dalam rangka ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan baik konvensional maupun syariah**

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan K/L dan mitra kerja terkait dalam rangka penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan. Di lingkup internal, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal mengenai Kebijakan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan (IEKB) , sebagai pedoman mekanisme koordinasi dan pelaksanaan peran Bank Indonesia dalam mengembangkan dan mengatur penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Di lingkup nasional, sinergi di sektor keuangan dalam pengembangan kebijakan dan infrastruktur keuangan berkelanjutan terus diperkuat melalui berbagai agenda kebijakan. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia bersama OJK, Kementerian Keuangan, dan K/L terkait berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengembangan Keuangan Berkelanjutan (PKB) sebagai peraturan pelaksanaan UU P2SK, asesmen awal *joint climate risk stress test* (CRST), serta pengembangan arsitektur basis data keuangan berkelanjutan OJK-BI. Selain itu, kolaborasi erat dilakukan bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, OJK, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK-IAI), serta akademisi dan *think tanks* guna membahas mobilisasi pendanaan berkelanjutan, potensi dukungan bank sentral dalam

pengembangan pasar karbon, penguatan implementasi taksonomi berkelanjutan, asesmen dampak risiko iklim lintas sektor, serta pengembangan *nature-related policy*. Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan dan OJK sebagai anggota *ex officio* Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK-IAI) turut mendukung pengembangan standar pelaporan keuangan berkelanjutan.

Sinergi pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif juga terus didukung kerja sama dengan berbagai lembaga. Guna memperkuat literasi keuangan digital dan memperluas akses pembiayaan UMKM yang menjadi bagian dari transformasi kebijakan menuju kesejahteraan keuangan masyarakat, Bank Indonesia bersama Kemenko Perekonomian meluncurkan AKSI KLIK dan gerakan AKU BISA SEJAHTERA. Selanjutnya, guna memperkuat daya saing UMKM terutama pada sektor kerajinan, Bank Indonesia memperbarui Nota Kesepahaman bersama Dewan Kerajinan Nasional. Koordinasi dengan OJK terus diperkuat melalui pertemuan KKD.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah didukung melalui kerja sama dengan berbagai lembaga. Bank Indonesia bekerja sama dengan Muhammadiyah dalam penyusunan *Roadmap* Ekonomi dan Digitalisasi Muhammadiyah, BAZNAS dalam optimalisasi dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya, serta KNEKS, Kementerian Agama, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengembangan Sharia Economic Development Fund (SEDF). Selain itu, Bank Indonesia turut mempersiapkan perpanjangan Nota Kesepahaman (NK) dengan Nahdlatul Ulama dan menginisiasi NK dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Dalam mendukung penguatan ekosistem halal, sinergi fasilitasi terus ditingkatkan dan telah mendukung penerbitan 3.841 sertifikat halal produk serta sertifikasi bagi 40 juru sembelih halal. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat daya saing pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Di lingkup internasional, kerja sama diperkuat melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum keuangan berkelanjutan dan syariah. Di tingkat ASEAN, Bank Indonesia melanjutkan *chairmanship* ASEAN *Senior Level Committee Task Force on Sustainable Finance* (SLC-TF SF) bersama State Bank of Vietnam, termasuk penyusunan ASEAN *Common Ground Framework for Climate Risk Stress Testing* (CRST). Di tingkat global, Bank Indonesia berpartisipasi dalam BRICS Sustainable Finance Group (SFG), antara lain melalui penyusunan laporan mengenai peran bank sentral dalam optimalisasi pembiayaan hijau dan berkelanjutan, termasuk pembiayaan adaptasi, serta mengikuti *capacity-building workshop* Presidensi BRICS 2026.

Bank Indonesia terus memperkuat perannya dalam berbagai forum ekonomi dan keuangan syariah internasional. Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam International Islamic Liquidity Management (IILM), Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), dan Islamic Development Bank (IsDB). Selain itu, Bank Indonesia bersama Bank Negara Malaysia tengah melaksanakan riset mengenai pengembangan pasar uang syariah (*Islamic Money Market Development*) dengan melibatkan IFSB dan OJK.

PS 09 Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan nasional. Langkah tersebut ditempuh di tengah dinamika lingkungan strategis global yang semakin kompleks, ditandai dengan fragmentasi yang meluas, diikuti oleh kebijakan proteksionisme, antara lain penerapan tarif resiprokal oleh AS yang kemudian memicu kebijakan balasan dari berbagai negara. Perkembangan tersebut mendorong pergeseran aliran modal dari *emerging market* ke *safe-haven asset* di negara maju, sehingga meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Dalam merespons dinamika tersebut, Bank Indonesia menempuh kebijakan internasional yang strategis dan proaktif, seperti mendorong transaksi berbasis mata uang lokal, menjaga kepercayaan lembaga internasional dan pemeringkat dengan pengelolaan persepsi positif terhadap perekonomian nasional, serta penguatan strategi diplomasi di forum internasional. Berbagai langkah tersebut merupakan wujud dukungan Bank Indonesia untuk turut menjaga perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah situasi global yang semakin menantang.

Sepanjang triwulan II 2026, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

29) **Terjalinnya kerja sama internasional bilateral Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter mitra yang mendukung kepentingan Bank Indonesia/ Republik Indonesia**

Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama bilateral dengan bank sentral dan otoritas moneter mitra untuk mendukung stabilitas eksternal, memperluas penggunaan mata uang lokal, serta meningkatkan konektivitas dan ketahanan infrastruktur keuangan. Pada triwulan II 2026, penguatan kerja sama antara Bank Indonesia dan The People's Bank of China (PBoC) telah menghasilkan sejumlah *deliverables* utama untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui perluasan penggunaan mata uang lokal dan penguatan infrastruktur keuangan. Bank Indonesia dan PBoC telah menyepakati penjajakan penguatan kerja sama *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA), sekaligus menegaskan komitmen untuk perluasan penggunaan mata uang lokal dan penguatan konektivitas pembayaran lintas batas Indonesia-Tiongkok.

***High Level Meeting* (HLM) *Joint Work Program* (JWP) yang berlangsung pada 11 Juni 2026 di Shanghai tersebut menghasilkan tiga capaian utama.** Pertama, penandatanganan *Memorandum of Understanding Local Currency Transaction* (MOU LCT) antara Bank Indonesia, PBoC, dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) untuk memperkuat LCT Indonesia-Tiongkok dengan memperluas cakupan wilayah ke Hong Kong. Kedua, peluncuran pembayaran QR lintas batas Indonesia-Tiongkok yang didukung kerangka LCT dan melibatkan 191 penyedia jasa sistem pembayaran di Tiongkok serta 24 penyedia di Indonesia. Ketiga, penetapan Bank Mandiri sebagai peserta langsung (*direct participant*) dalam *Cross-border Interbank Payment System* (CIPS) guna meningkatkan efisiensi kliring dan penyelesaian transaksi bilateral, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur pembayaran lintas batas. Bank Indonesia dan PBoC turut menandatangani MOU Pembentukan Renminbi *Clearing Arrangement* di Indonesia untuk mendukung ekosistem RMB domestik dan penyediaan likuiditas bagi kegiatan perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan. Keseluruhan capaian tersebut diharapkan dapat memperkuat kerja sama keuangan bilateral serta mendukung transaksi yang lebih efisien bagi pelaku usaha dan masyarakat kedua negara.

Penguatan ekosistem transaksi berbasis mata uang lokal juga dilakukan bersama Monetary Authority of Singapore (MAS) melalui penyelesaian *Operational Guidelines* (OG) *Local Currency Transaction* (LCT) BI-MAS. Panduan ini menjadi dasar implementasi kerja sama LCT Indonesia-Singapura yang tertuang dalam MOU LCT antara Bank Indonesia dan MAS tahun 2022. Melalui kerja sama ini, kedua otoritas mendorong penyelesaian transaksi bilateral antara pelaku usaha Indonesia dengan Singapura melalui Bank ACCD dengan cakupan transaksi berjalan dan investasi langsung. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung stabilitas nilai tukar kedua negara sekaligus untuk memperkuat integrasi keuangan ASEAN.

Sementara itu, penguatan hubungan kelembagaan dan kerja sama bilateral antara Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia (BNM) dilakukan melalui *Structured Bilateral Cooperation* (SBC) di berbagai bidang strategis kebanksentralan. Kerja sama tersebut mencakup kebijakan moneter, stabilitas keuangan dan makroprudensial, sistem pembayaran dan digitalisasi, pengembangan sektor keuangan, pengembangan kapasitas, serta pertukaran informasi. Kesepakatan tersebut memperluas ruang kolaborasi pada bidang yang menjadi kepentingan bersama sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara Bank Indonesia dan BNM dalam merespons dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks.

30) **Terjaganya kepentingan Bank Indonesia/Republik Indonesia melalui peningkatan pengaruh, kontribusi, dan keterwakilan dalam forum/organisasi/lembaga/ kerja sama internasional**

Bank Indonesia terus memperkuat peran aktif dalam forum kerja sama internasional melalui penyampaian posisi dan pandangan kebijakan yang mendukung kepentingan nasional, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan maupun mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tingkat regional, posisi Bank Indonesia diarahkan untuk memperkuat stabilitas dan integrasi ekonomi-keuangan kawasan, sedangkan pada tingkat global, Bank Indonesia menyampaikan pandangan dan asesmen yang mendukung kepentingan nasional serta mendorong respons kebijakan yang selaras dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi dan keuangan global. Posisi dan pandangan tersebut disampaikan dalam berbagai forum strategis, antara lain Bank for International Settlements (BIS) *Bimonthly Meetings*, BIS *Annual General Meeting*, Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP) *Deputies Meeting*, ASEAN dan ASEAN+3 *Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting*, serta kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB).

Pertemuan EMEAP Working Group on Banking Supervision ke-59 di Hong Kong.

Di tingkat regional, Bank Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mendukung agenda strategis ekonomi dan keuangan Indonesia. Pada jalur keuangan ASEAN, Bank Indonesia memberikan dukungan terhadap *Priority Economic Deliverables* (PEDs) yang diusung pada keketuaan Filipina 2026, yang meliputi area *capital market*, *regional payment connectivity*, dan *financial inclusion*. Bank Indonesia turut berkontribusi dalam *Project Revive* untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas proses kerja sama sektor keuangan di kawasan serta mendukung pembentukan kembali *ASEAN Swap Arrangement*. Melalui EMEAP *Deputies Meeting* pada April 2026, Bank Indonesia mendorong penguatan koordinasi kebijakan antarbank sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan regional, termasuk melalui pertukaran pandangan mengenai pemanfaatan AI dalam operasional bank sentral dan penanganan *digital fraud and scams*. Sementara itu, pada forum ASEAN+3, Bank Indonesia turut memperkuat *Chiang Mai Initiative Multilateralisation* (CMIM) melalui dukungan terhadap penambahan fasilitas CMIM *Rapid Financing Facility* (CMIM-RFF). Kontribusi juga diberikan sebagai *Implementing Agency* ADB *Policy-Based Loan: Financial Market Deepening Program* (ADB PBL FMDP), sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia dalam pelaksanaan agenda reformasi kebijakan untuk memperdalam pasar keuangan, mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital, serta memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tingkat global, Bank Indonesia terus menyampaikan posisi dan *stances* kebijakan untuk merespons dinamika ekonomi global sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional. Pada BIS *Bimonthly Meetings* Mei 2026, Bank Indonesia menyampaikan asesmen bahwa *shock* harga minyak dunia memiliki dampak yang relatif terbatas pada konsumsi domestik, tecermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid pada triwulan II 2026. Selanjutnya, dalam BIS *Annual General Meeting*, Bank Indonesia menyampaikan asesmen mengenai manfaat adopsi AI bagi efisiensi dan pengendalian inflasi, dengan tetap mencermati implikasinya terhadap PDB, neraca pembayaran, dan stabilitas makrofinansial.

Keterwakilan Indonesia dalam forum global turut diperkuat melalui partisipasi Bank Indonesia pada IMF–World Bank Spring Meetings 2026 dan G20. Pada rangkaian IMF–World Bank Spring Meetings 2026 pada 13 – 18 April 2026 di Washington, D.C., serta 3rd G20 *Finance and Central Bank Deputies Meeting* pada 14 – 15 Mei 2026 di Fort Lauderdale, Florida, Amerika Serikat, Bank Indonesia berkontribusi dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia, memperkuat kerja sama dan sinergi antar otoritas, serta mendorong respons kebijakan global dan regional yang selaras dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Boks.8: Posisi Bank Indonesia dalam Merespons Ketidakpastian Ekonomi Global pada IMF Spring Meetings 2026

Pertemuan Musim Semi IMF–World Bank 2026 di Washington, D.C., Amerika Serikat.

Dalam pertemuan Musim Semi International Monetary Fund dan World Bank (IMF – World Bank), negara-negara anggota IMF mendorong langkah bersama untuk menghadapi ketidakpastian global, sekaligus memastikan transformasi ekonomi bermanfaat bagi pertumbuhan dunia. IMF memandang perekonomian global tetap resilien, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian yang semakin kompleks, terutama akibat perang di Timur Tengah. Di sisi lain, perubahan besar di bidang teknologi, demografi, dan lingkungan turut menciptakan tantangan sekaligus peluang baru. Perubahan tersebut antara lain adalah AI yang berpotensi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, namun juga dapat menimbulkan disrupsi di berbagai sektor seiring pesatnya perkembangan teknologi tersebut.

Pada forum tersebut, Gubernur Bank Indonesia menegaskan komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah dinamika global. Komitmen dimaksud ditempuh melalui pengelolaan nilai tukar yang fleksibel dan terukur, penguatan instrumen moneter untuk menjaga daya tarik aset domestik, serta pengelolaan likuiditas yang hati-hati agar tetap mendukung pertumbuhan. Sinergi erat bersama Pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, termasuk komitmen mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB dan realokasi belanja ke sektor produktif, turut menjadi bagian penting untuk memperkuat kredibilitas kebijakan nasional. Dalam jangka menengah, Indonesia terus mendorong arah transformasi struktural menuju sektor ekonomi yang bernilai tambah lebih tinggi melalui hilirisasi dan pengembangan sektor berbasis teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pertemuan juga menghasilkan kesepakatan *Global Policy Agenda* sebagai langkah bersama dalam mengelola tekanan dan transformasi ekonomi. Agenda tersebut menekankan pentingnya bagi otoritas untuk fokus pada langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global sekaligus memastikan transformasi ekonomi memberi manfaat bagi pertumbuhan. Langkah tersebut menitikberatkan pada upaya menjaga ekspektasi inflasi dengan memperkuat komunikasi kebijakan dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas keuangan melalui penguatan pengawasan dan regulasi perbankan, serta mempertahankan kredibilitas kebijakan fiskal di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Negara-negara anggota turut mendorong reformasi struktural, memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan, serta meningkatkan kerja sama internasional.

Penguatan ketahanan kolektif turut menjadi perhatian melalui pengembangan jaring pengaman keuangan global. IMF menyoroti perlunya upaya bersama untuk terus memperkuat kapasitas dalam menjalankan fungsi surveilans, pembiayaan, dan asistensi teknis bagi negara anggota yang membutuhkan. Rangkaian agenda tersebut menegaskan pentingnya sinergi kebijakan domestik dan kerja sama internasional untuk menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memastikan transformasi ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas bagi pertumbuhan global.

Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM+3) ke-29 di Samarkand, Uzbekistan.

31) **Terjalinnya sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memajukan ekonomi Republik Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan**

Bank Indonesia terus memperkuat komunikasi kebijakan dengan lembaga internasional dan investor global guna menjaga persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia. Upaya tersebut penting untuk mendukung kredibilitas kebijakan, menjaga kepercayaan investor, dan memperkuat daya tarik investasi di tengah ketidakpastian global. Persepsi positif terhadap ketahanan dan prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga, tecermin dari asesmen positif yang konsisten mengenai Indonesia dalam publikasi ASEAN+3 *Regional Economic Outlook* (AREO), *Country Note Indonesia* pada BIS *Papers* 2026, dan hasil IMF *Staff Visit*. Capaian tersebut dudukung oleh komunikasi kebijakan yang intensif dengan lembaga internasional dan investor global, termasuk melalui delapan kegiatan *Investor Conference Call* (ICC) dan 93 kegiatan *investor meeting/outreach*, serta promosi investasi dan perdagangan internasional untuk mendorong investasi langsung dan mendukung penguatan sektor eksternal.

Ketahanan dan persepsi positif terhadap ekonomi Indonesia turut mendapat pengakuan dalam proses *annual review* Sovereign Credit Rating Indonesia oleh S&P, yang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memfasilitasi pertemuan bersama K/L terkait, perwakilan lembaga internasional, dan analis ekonomi independen untuk memastikan asesmen lembaga pemeringkat didasarkan pada gambaran perekonomian yang utuh dan terkini. Pembahasan difokuskan pada ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, prospek fiskal, kebijakan sektor sumber daya alam, perkembangan Danantara, serta prospek pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia terus mendorong perluasan promosi perdagangan dan investasi untuk membuka peluang transaksi ekspor, memperluas akses pasar produk UMKM, serta mempertemukan proyek investasi Indonesia dengan calon investor. Promosi perdagangan dilaksanakan antara lain melalui *World of Coffee* San Diego, *World of Coffee* Bangkok, Amsterdam *Coffee Festival*, *Food and Hospitality* Asia, Shizuoka *Business Forum*, SIAL Shanghai, dan Korea *Import Expo* 2026. Promosi investasi internasional dilakukan melalui Indonesia–Japan *Investment Forum* 2026 dengan mengoptimalkan jaringan KPwLN, sementara di dalam negeri dilaksanakan promosi terpadu melalui KPwDN, antara lain *Central Java Investment Business Forum* (CJIBF) dan UMKM Grande 2026. Berbagai kegiatan tersebut membuka peluang transaksi ekspor dan memperluas akses pasar produk UMKM, sekaligus mempertemukan proyek investasi Indonesia dengan calon investor.

Sebagai hasil, minat pasar dan investor terhadap Indonesia tetap terjaga, tecermin dari apresiasi pembeli internasional terhadap produk unggulan Indonesia. Produk Indonesia, khususnya kopi, kakao, dan produk unggulan lainnya, memperoleh apresiasi dari pembeli internasional, sementara investor menunjukkan minat pada sektor energi terbarukan, pertanian dan

hilirisasi pangan, pariwisata, pertambangan, serta kawasan industri. Investor Jepang secara khusus menunjukkan ketertarikan pada investasi hijau, hilirisasi industri, infrastruktur, dan kawasan industri berteknologi tinggi. Konversi minat menjadi transaksi dan investasi masih sangat dipengaruhi oleh kesiapan pelaku usaha dan proyek, termasuk aspek teknis, komersial, kelembagaan, serta keberadaan mitra lokal, *offtaker*, dan *strategic partner*.

Ke depan, promosi perdagangan dan investasi diarahkan semakin tertarget dan berbasis *market intelligence*. Penguatan kurasi dan pendampingan UMKM serta pemilik proyek perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan produk, kapasitas produksi, sertifikasi, dan kelayakan proyek. Strategi promosi juga perlu diperkuat melalui *branding*, *storytelling*, *success story*, pengembangan produk sesuai kebutuhan pasar, serta *pre-event business matching* yang lebih terstruktur untuk meningkatkan peluang terjadinya transaksi dan realisasi investasi.

PS 10 Merumuskan dan implementasi bauran kebijakan kelembagaan, serta dukungan organisasi, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional

Dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks mendorong Bank Indonesia untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan. Amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), perubahan lanskap ekonomi keuangan serta dinamika teknologi dan sumber daya memerlukan penguatan dalam pengelolaan organisasi dan sumber daya. Hal tersebut mencakup manajemen strategis dan kinerja, desain organisasi dan proses bisnis, pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia secara efektif, efisien, serta didukung tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional

Bank Indonesia merespons perkembangan tersebut dengan mengoptimalkan Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK). Implementasi BKK ditempuh melalui penyempurnaan proses bisnis, percepatan transformasi digital, pengelolaan sumber daya keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas, dan relevan dengan kebutuhan bank sentral di era digital. Keseluruhan upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan organisasi yang semakin efektif, adaptif, dan berdaya tahan, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan Bank Indonesia dalam mendukung pencapaian tujuan yang diamanatkan Undang-Undang.

Sepanjang triwulan II 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan dan mengimplementasikan bauran kebijakan kelembagaan, dengan dukungan organisasi, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

32) **Terlaksananya organisasi yang efektif dan transformatif dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan profesional**

Bank Indonesia terus memperkuat efektivitas pengelolaan organisasi yang tecermin pada pelaksanaan program strategis dan program kerja yang selaras dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Penguatan tersebut dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan keselarasan pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan, memperkuat koordinasi, serta menetapkan tindak lanjut yang diperlukan. Pada triwulan II 2026, evaluasi dilakukan terhadap seluruh program strategis dan program kerja untuk memperkuat implementasi dan memastikan penyelesaiannya sesuai target pada akhir tahun. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam memperkuat koordinasi dan menetapkan langkah tindak lanjut yang diperlukan, termasuk dalam merespons dinamika kebijakan dan kelembagaan yang semakin kompleks. Dengan demikian, pelaksanaan program strategis tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga memastikan efektivitas implementasi dan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran kelembagaan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan tata kelola yang baik dan profesional untuk mendukung terwujudnya organisasi yang efektif dan transformatif. Sejalan dengan penguatan efektivitas pengelolaan organisasi, Bank Indonesia juga terus menjaga dan meningkatkan penerapan tata kelola sebagai fondasi dalam mendukung pencapaian kinerja kelembagaan. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil asesmen tata kelola tahun 2025 sesuai *action plan* yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan rekomendasi hasil asesmen ditindaklanjuti secara konsisten dan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan penerapan tata kelola secara berkelanjutan. Selain itu, persiapan asesmen tata kelola tahun 2026 terus dilakukan melalui identifikasi kebutuhan penyempurnaan metodologi dan indikator

asesmen agar tetap relevan dan selaras dengan perkembangan organisasi dan proses bisnis terkini, baik dari aspek ketentuan maupun implementasi.

33) **Terjaganya akuntabilitas dan kinerja keuangan lembaga**

Bank Indonesia Bank Indonesia terus menjaga akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan melalui penerapan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tecermin dari kembali diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2025 dari BPK pada Juni 2026. Dengan capaian tersebut, Bank Indonesia telah memperoleh opini WTP untuk ke-23 kalinya sejak tahun 2003. LKTBI Tahun 2025 *audited* selanjutnya dipublikasikan di media massa dan *website* Bank Indonesia pada 4 Juni 2026. Pencapaian tersebut mencerminkan konsistensi pengelolaan keuangan Bank Indonesia dalam jangka panjang, sekaligus memenuhi amanat Undang-Undang dan memperkuat transparansi kepada publik dan pemangku kepentingan.

Untuk menjaga konsistensi kualitas pengelolaan keuangan tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat peran dan kapabilitas pengelola keuangan. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia terus melakukan memperkuat peran dan kapabilitas pengelola keuangan melalui kegiatan asistensi dan *advisory*, termasuk di KPwDN, sehingga standar akuntabilitas dapat diterapkan secara konsisten hingga ke tingkat operasional di daerah. Langkah tersebut mendukung keberlanjutan pencapaian opini WTP serta terjaganya kualitas pengelolaan keuangan di Bank Indonesia.

Dari sisi kinerja keuangan, kondisi keuangan Bank Indonesia tetap terkendali dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja kelembagaan. Dalam jangka menengah-panjang, kondisi tersebut tecermin dari rasio modal Bank Indonesia yang masih berada pada tingkat yang relatif baik. Pemantauan kinerja keuangan dilakukan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi dampak dinamika lingkungan strategis global dan nasional terhadap kondisi keuangan Bank Indonesia.

34) **Tersedianya sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan baik secara kuantitas dan kualitas, yang kompeten, profesional, produktif, berintegritas, dan berakhlak mulia**

Bank Indonesia terus mengembangkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Pengembangan dilakukan melalui program pembelajaran, antara lain melalui program pengembangan kompetensi, program pengembangan keahlian khusus, dan program pengembangan kepemimpinan kebanksentralan, yang dilengkapi dengan *international exposure* dan substansi digital. Program tersebut diarahkan untuk memperluas wawasan global dan meningkatkan kecakapan digital, sekaligus mempersiapkan kader kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan organisasi ke depan.

Pemenuhan kebutuhan SDM dan pengembangan karier terus dilakukan melalui penataan jabatan, jenjang karier, dan penempatan pegawai yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Hingga triwulan II 2026, upaya yang dilakukan mencakup pengelolaan pegawai potensial, promosi, penempatan pegawai yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan, serta penempatan pegawai sesuai dengan kalender pengelolaan SDM. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan ketersediaan SDM dengan kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sekaligus menyediakan jalur pengembangan karier yang terencana, jelas, dan terukur.

Pemetaan kepemimpinan dan *future skills* juga terus diperkuat sebagai basis perencanaan pengembangan SDM dan suksesi kepemimpinan. Pemetaan dilakukan antara lain melalui Program Tugas Belajar (PTB) dan pengembangan karier untuk mengidentifikasi kebutuhan serta kesenjangan kompetensi secara lebih dini. Hasil pemetaan menjadi basis dalam mengarahkan pengembangan kapasitas pegawai dan mempersiapkan kader kepemimpinan secara berkesinambungan guna mendukung keberlanjutan kinerja organisasi.

Sejalan dengan penguatan pengembangan kompetensi secara menyeluruh, Bank Indonesia juga menyusun desain kurikulum bagi pegawai *non-officer*. Penyusunan kurikulum diarahkan untuk membangun jalur pembelajaran yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, perkembangan kompetensi, serta dinamika organisasi, sehingga mendukung peningkatan kapabilitas dan produktivitas pegawai secara berkelanjutan.

PS 11 Merumuskan dan implementasi landasan hukum, manajemen risiko, audit internal, dan komunikasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional

Perluasan mandat Bank Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK

perlu didukung oleh penguatan tata kelola kelembagaan guna mewujudkan pelaksanaan wewenang yang akuntabel, profesional, dan transparan. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia terus memperkuat landasan hukum, manajemen risiko, audit intern, dan komunikasi sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional. Penguatan tersebut diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan dan proses bisnis didukung oleh kerangka hukum yang memadai, pengelolaan risiko yang efektif, pengendalian intern yang andal, serta komunikasi yang transparan dan kredibel. Dengan dukungan fungsi-fungsi tersebut, Bank Indonesia diharapkan dapat semakin mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan mandatnya dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan di tengah lingkungan strategis yang terus berkembang.

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan dan mengimplementasikan landasan hukum, manajemen risiko, audit internal, dan komunikasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

35) **Terpenuhinya peraturan Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang dan kebutuhan Bank Indonesia dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan profesional**

Bank Indonesia terus memastikan setiap kebijakan dan serta pelaksanaan tugas dan wewenangnya didukung oleh landasan hukum yang memadai melalui penerbitan peraturan yang sejalan dengan mandat UU. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia telah menerbitkan 37 (tiga puluh tujuh) peraturan yang terdiri dari 9 (sembilan) peraturan yang bersifat prinsipil dan strategis, serta 28 (dua puluh delapan) peraturan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan yang bersifat prinsipil dan strategis. Penerbitan peraturan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan maupun tindak lanjut atas peraturan perundang-undangan, antara lain UU Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK, serta respons terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan penguatan fungsi kelembagaan secara menyeluruh. Regulasi yang diterbitkan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku industri dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas yang berada dalam ruang lingkup pengaturan Bank Indonesia.

36) **Terpenuhinya tingkat maturitas manajemen risiko dan audit intern dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan professional**

Bank Indonesia terus meningkatkan pengelolaan dan pengendalian risiko guna memperkuat maturitas manajemen risiko sebagai bagian dari upaya mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan profesional. Penguatan dilakukan melalui penyempurnaan profil risiko satuan kerja dengan memanfaatkan digitalisasi serta penguatan proses bisnis pengendalian risiko dengan menerapkan prinsip simplifikasi, standardisasi dan sistemisasi. Sejalan dengan itu, kapasitas *internal control officer* (ICO) turut diperkuat sebagai upaya mempertahankan kapabilitas dan mendorong penerapan budaya risiko di seluruh satuan kerja Bank Indonesia. Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas hasil asesmen maturitas manajemen risiko dan persiapan asesmen manajemen risiko tahun 2026. Persiapan asesmen dilakukan melalui penyempurnaan metodologi, koordinasi dengan satuan kerja terkait, dan pengumpulan dokumen yang diperlukan.

Bank Indonesia juga terus memperkuat maturitas keberlangsungan tugas sebagai bagian dari pengelolaan risiko kelembagaan. Implementasi kerangka Protokol Manajemen Krisis Kelembagaan dilakukan sebagai bagian dari Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi Bank Indonesia. Pada triwulan II 2026, tahapan implementasi dilanjutkan melalui *piloting* asesmen dan surveilans risiko, khususnya pada area operasional, untuk memperkuat kesiapan (*preparedness)* dalam menjaga keberlangsungan kebijakan dan operasional Bank Indonesia. Penguatan tersebut mendukung upaya peningkatan maturitas manajemen risiko dan audit intern serta efektivitas pengendalian internal.

Sejalan dengan penguatan manajemen risiko, Bank Indonesia juga terus melanjutkan upaya peningkatan maturitas audit intern melalui pengelolaan efektivitas fungsi *assurance* dan *consulting* dalam mendukung pengendalian internal. Fungsi *assurance* yang dilakukan melalui pelaksanaan audit strategis, kepatuhan, dan keuangan ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas proses bisnis, penerapan manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan untuk mendukung penerapan tata kelola yang baik dan profesional. Sementara itu, fungsi *consulting* dilakukan melalui pemberian advis atas penyempurnaan ketentuan, pemantauan tindak lanjut hasil audit intern dan audit ekstern, serta koordinasi dengan satuan kerja terkait. Langkah ini mendukung efektivitas pengendalian internal dan penerapan tata kelola yang baik, serta memastikan tindak

lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan diselesaikan secara tepat waktu. Sampai dengan triwulan II 2026, Bank Indonesia telah melaksanakan audit strategis, kepatuhan, dan keuangan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2026 sebagai upaya untuk mempersiapkan pelaksanaan penilaian maturitas audit intern yang akan datang.

Lebih lanjut, Bank Indonesia juga melakukan penguatan kapabilitas audit intern yang dilakukan melalui pengembangan metodologi penilaian agar semakin komprehensif dan holistik. Upaya tersebut diwujudkan melalui perumusan hasil *piloting overall opinion* atas objek proses bisnis di KPwDN. Metodologi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi, efektivitas, dan kecukupan pengendalian pada proses bisnis yang dievaluasi.

37) **Kualitas komunikasi untuk pemenuhan ketentuan transparansi, kredibilitas kebijakan, dan menjaga persepsi publik dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan profesional**

Bank Indonesia terus memperkuat komunikasi kebijakan yang transparan, kredibel, dan efektif untuk membangun pemahaman terhadap arah kebijakan, mengelola ekspektasi publik, serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Pada triwulan II 2026, komunikasi kebijakan diperkuat secara responsif terhadap dinamika perekonomian dan persepsi publik melalui penyelarasan narasi, optimalisasi berbagai kanal komunikasi, serta penguatan *engagement* dengan pemangku kepentingan. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan arah dan respons kebijakan Bank Indonesia dapat dipahami secara tepat serta dikomunikasikan secara konsisten dan terarah.

Efektivitas komunikasi kebijakan diperkuat melalui perluasan diseminasi dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan yang didukung pemantauan serta evaluasi secara berkelanjutan. Pada triwulan II 2026, diseminasi kebijakan dilakukan melalui konferensi pers RDG Bulanan, publikasi siaran pers, media massa nasional, serta berbagai kanal komunikasi Bank Indonesia. Dialog dengan ekonom, akademisi, tokoh masyarakat, media, dan mitra strategis juga terus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan sekaligus memperoleh masukan atas perkembangan ekonomi dan persepsi pemangku kepentingan, termasuk sebagai salah satu sumber masukan dalam penyusunan *Economic Views*. Secara paralel, respons publik pada berbagai kanal komunikasi terus dipantau dan dievaluasi untuk menyempurnakan narasi, pendekatan, dan strategi komunikasi agar semakin relevan, kredibel, dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

Sejalan dengan penguatan komunikasi kebijakan, Bank Indonesia terus meningkatkan keterbukaan informasi publik untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada triwulan II 2026, penguatan dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan akses informasi, penyelarasan standar layanan informasi publik di seluruh satuan kerja dan kantor perwakilan, serta penyempurnaan pemantauan dan evaluasi. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan informasi publik yang semakin transparan dan akuntabel sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Indonesia.

PS 12 Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional

Akselerasi transformasi digital meningkatkan kebutuhan terhadap pengelolaan aset dan infrastruktur yang semakin andal. Pemanfaatan layanan digital Bank Indonesia yang semakin luas, disertai meningkatnya eksposur terhadap risiko siber, memerlukan adopsi teknologi secara terarah dan terintegrasi. Pada saat yang sama, dinamika regulasi lintas sektor dan kompleksitas pelaksanaan program, termasuk di lokasi dengan keterbatasan akses, menuntut dukungan infrastruktur dan pengelolaan yang semakin andal. Kondisi ini mendorong perlunya pengelolaan sumber daya yang terintegrasi, adaptif, dan resilien, dengan tetap berlandaskan tata kelola yang baik dan profesional.

Bank Indonesia merespons tantangan tersebut dengan mempercepat pemanfaatan berbagai teknologi terkini untuk memperkuat kapabilitas, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Upaya ini didukung melalui penguatan pengelolaan sumber daya, khususnya aset teknologi digital dan aset fisik, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik. Pengelolaan aset dilakukan melalui pengembangan dan pemanfaatan inovasi digital serta data yang semakin terintegrasi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung konsep *modern office* dan *modern living*, serta pengelolaan program secara menyeluruh. Keseluruhan langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja, menjaga keandalan operasional, serta memperkuat kesiapan Bank Indonesia dalam merespons perkembangan lingkungan strategis.

Sepanjang triwulan II 2026, Bank Indonesia melanjutkan berbagai inisiatif dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan aset fisik serta aset sistem informasi secara terintegrasi sebagai bagian dari penguatan kinerja kelembagaan yang efektif, efisien, dan bertata kelola. Perkembangan pelaksanaan inisiatif tersebut tecermin dalam pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut:

38) **Terwujudnya modern office dan modern living yang berkualitas, terencana, terintegrasi, dan digital dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan profesional**

Bank Indonesia terus menjaga keandalan infrastruktur pendukung aplikasi kritikal melalui perawatan dan pemeliharaan secara preventif dan berkala. Pemeliharaan preventif dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan operasional pada sistem yang menopang kelangsungan fungsi-fungsi strategis Bank Indonesia. Melalui langkah ini, potensi kegagalan infrastruktur diharapkan dapat diantisipasi lebih dini sebelum berdampak pada layanan. Bank Indonesia juga berkoordinasi intensif dengan instansi terkait dalam menjaga sustainabilitas pasokan listrik untuk aplikasi kritikal. Koordinasi dengan pihak eksternal ini diperlukan untuk memastikan kontinuitas pasokan daya bagi sistem-sistem vital, mengingat keandalan infrastruktur internal tetap bergantung pada faktor pendukung di luar kendali langsung organisasi. Kualitas layanan listrik pada aplikasi kritikal serta peralatan *backup* selalu terjaga dalam kondisi yang prima sehingga mendukung keberlanjutan operasionalisasi aplikasi tanpa gangguan.

39) **Terwujudnya aset teknologi digital yang berkualitas, terencana, terintegrasi, dan andal dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan profesional**

Pada triwulan II 2026, Bank Indonesia terus memperkuat pengelolaan aset teknologi digital melalui koordinasi persiapan asesmen maturitas Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) berupa *Cyber Security Maturity* (CSM), serta asesmen maturitas *Information Technology Service Management* (ITSM) dan pengamanan siber. Persiapan asesmen tersebut menjadi sarana evaluasi internal atas kecukupan tata kelola keamanan siber dan layanan teknologi informasi, sekaligus upaya untuk mengidentifikasi area yang masih memerlukan penguatan sebelum dilakukan penilaian oleh pihak eksternal. Bank Indonesia juga melaksanakan *Preventive Maintenance* (PM), *Corrective Maintenance* (CM), dan Rencana Pemulihan Teknologi Informasi (RPTI) untuk menjaga keandalan dan kesiapan layanan teknologi informasi. Rangkaian pemeliharaan dan kesiapan pemulihan tersebut ditujukan untuk menjaga kontinuitas layanan teknologi informasi, sekaligus memastikan organisasi tetap siap merespons gangguan tak terduga tanpa mengganggu keberlangsungan operasional.

40) **Terwujudnya pengadaan untuk pengelolaan aset dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang terencana, berkualitas, dan bertata kelola dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan profesional**

Bank Indonesia secara konsisten memperkuat tata kelola pengadaan melalui pengukuran *Procurement Maturity Assessment* (PMA). Pengukuran oleh pihak eksternal menggunakan model *Procurement Excellence Plus* untuk menilai kematangan fungsi pengadaan secara holistik yang mencakup dimensi strategi, operasional, organisasi, dan teknologi. Berdasarkan penilaian pada tahun 2025, Bank Indonesia berhasil menjaga level maturitas pengadaan di level strategis dan proaktif. Penilaian strategis pada aspek strategi, operasional, dan organisasi mencerminkan pengelolaan pengadaan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis kinerja. Pada aspek teknologi, satu *key driver* mengalami kenaikan menjadi level strategis, sedangkan dua *key driver* lainnya berada pada level proaktif. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pengadaan.

Digitalisasi proses pengadaan juga dikembangkan melalui inisiatif *price and supplier analysis* pada area proses bisnis pengadaan. Inisiatif yang sedang dikembangkan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan *key drivers* pada aspek teknologi menuju level strategis, khususnya penggunaan *data analytics* untuk memperkuat pengambilan keputusan.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto

LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, interkoneksi, interoperabilitas yang menggambarkan bentuk keterhubungan antarinfrastruktur pasar keuangan.
3-Smart	Program kepemimpinan Bank Indonesia untuk menciptakan pemimpin yang profesional yang memiliki kompetensi *(book smart)*, berpengalaman *(street smart)*, dan memiliki perilaku mulia *(spiritual smart)*.
Agile	Kemampuan untuk bergerak cepat dan mudah
Bauran Kebijakan Bank Indonesia	Integrasi kebijakan secara dinamis yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, yakni kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan system pembayaran, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung untuk memperoleh kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.
Bauran Kebijakan Kelembagaan	Penggunaan beberapa kebijakan pada area kelembagaan dengan basis kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan/*compliance*. Hal ini diperlukan sebagai langkah dalam memastikan keseimbangan antara memastikan tercapainya mandat Bank Indonesia melalui kinerja yang efektif dengan upaya mendorong produktivitas sumber daya secara efisien, serta memastikan ketaatan hukum dan akuntabilitas melalui tata kelola yang baik.
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara *real time* dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan SKNBI.
Bank Indonesia – *Real-Time Gross Settlement*	Sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
Bilateral Meeting	Pertemuan resmi antara dua pihak, yang biasanya mewakili negara, organisasi, atau perusahaan, untuk membahas isu-isu yang relevan bagi kedua belah pihak.
Blueprint	Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja.
Cadangan devisa	Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valas kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.
Capital Adequacy Ratio	Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
Central Bank Digital Currency	Mata uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.
Countercyclical Capital Buffer (CCyB)	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga *(buffer)* untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan *(excessive credit growth)* sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

ISTILAH	PENJELASAN
Cross Border	Lintas batas, lintas negara.
Dana Pihak Ketiga	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Devisa	Sejumlah emas atau valas yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
Devisa Hasil Ekspor	Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital.
Domestic Non-Deliverable Forward	Transaksi derivatif standar (*plain vanilla*) berupa transaksi *forward* yang dilakukan dengan mekanisme *fixing* dan mata uang penyelesaiannya dalam Rupiah.
Dynamic Systemic Risk Surveillance	Kerangka pengawasan yang bersifat *forward looking* dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia.
E-commerce	Transaksi perdagangan secara *online* atau menggunakan teknologi internet.
Ekonomi digital	Ekonomi yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Ekonomi dan keuangan hijau	Sistem ekonomi dan keuangan yang mendukung upaya menjaga dan memperhatikan aspek lingkungan dan/atau iklim.
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
Electronic Trading Platform	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
Elektronifikasi	Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai.
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETDP)	Suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
End-to-end	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif.
Festival Ekonomi Syariah (FESyar)	Kegiatan sejenis Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang berskala regional dan nasional serta merupakan kegiatan *road to* ISEF.
Hedging	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko.
Hedging Swap	Transaksi swap yang digunakan untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko perubahan nilai suatu variabel keuangan, biasanya suku bunga, nilai tukar, atau harga komoditas.
HLM	*High Level Meeting*
Industri Halal	Industri yang sejalan dengan kriteria kehalalan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri.
IndONIA	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu *overnight* di Indonesia.

ISTILAH	PENJELASAN
Inflasi	Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunannya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (*cost-push*) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (*demand-pull*).
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *volatile foods* dan *administered prices*.
Integrasi	Penyatuan infrastruktur *post trade* dalam satu institusi yang sama untuk rantai nilai (*value chain*) layanan transaksi.
Interkoneksi	Kemampuan antarsistem bertukar informasi atau bertransaksi membutuhkan perantara, atau dengan kata lain interkoneksi antar sistem terjadi secara tidak langsung.
Interoperabilitas	Kemampuan dua sistem untuk berkomunikasi atau bertransaksi secara langsung.
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)	Acara tahunan Bank Indonesia yang berskala nasional dan internasional dan terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu Sharia *Economic Forum* dan *Sharia Fair*. Kegiatan forum terdiri dari seminar/*workshop*, sedangkan *Sharia Fair* merupakan *outlet* bagi pelaku usaha industri halal, pesantren, Lembaga keuangan, dan lembaga terkait.
Keuangan digital	Keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau *web* melalui pihak ketiga.
Keuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal.
Keynote	Pembicara dalam sebuah acara, seminar, atau konferensi yang ditunjuk untuk menyampaikan pidato utama (*keynote speech*).
Lending Appetite	Minat atau kecenderungan bank/lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit/pinjaman.
Likuiditas	Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.
Loan to Value	Rasio pinjaman yang diberikan bank terhadap nilai aset.
Local Currency Bilateral Swap Agreement	Bentuk kerja sama keuangan bilateral yang lazim dilakukan oleh bank sentral, yang memungkinkan suatu bank sentral untuk mendapatkan valuta asing dari bank sentral mitra dengan cara saling mempertukarkan mata uang lokal masing-masing negara, untuk kemudian dipertukarkan Kembali pada saat jatuh tempo yang telah disepakati.
Local Currency Transaction	Transaksi bilateral antar dua negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, untuk mendiversifikasi *currency exposure*.

ISTILAH	PENJELASAN
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.
Neraca Pembayaran Indonesia	Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
Net inflows	selisih antara total kontribusi atau pembelian baru (inflows) dan total penarikan atau penjualan (outflows) dari suatu investasi atau entitas.
Non Performing Loan	Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet.
Online	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
Operasi Moneter	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (*Standing Facilities*).
Outstanding	Jumlah yang masih berjalan, beredar, atau belum lunas dalam suatu instrumen keuangan.
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudsensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki *buffer* likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.
Pre-emptive	Tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi, dengan tujuan untuk mencegah atau mengantisipasi risiko, masalah, atau ancaman potensial.
Preserved Value	Nilai yang berhasil dipertahankan/terjaga.
Prinsip Kolektif Kolegial	Prinsip tata kelola pengambilan keputusan yang menekankan pembahasan bersama, kesetaraan peran antaranggota dalam menyampaikan pandangan, pencapaian keputusan melalui musyawarah atau mekanisme yang disepakati, serta pertanggungjawaban bersama atas keputusan yang dihasilkan.
Pro-growth	Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pro-stability	Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Proyek Garuda	Sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Indonesia yang kemudian disebut Rupiah Digital.
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)	Standar *QR Code* pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
QRIS *Cross Border*/Lintas Negara	Salah satu inisiatif kolaboratif untuk membangun standardisasi infrastruktur setelmen untuk perdagangan lintas batas.
QRIS Tap NFC	Sistem pembayaran berbasis teknologi *Near Field Communication* (NFC) yang memungkinkan pengguna cukup mendekatkan ponsel ke terminal pembayaran tanpa perlu memindai *QR code* secara manual.

ISTILAH	PENJELASAN
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi.
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial	Penyempurnaan dari kebijakan rasio kredit UMKM antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain dalam rangka memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif
Regional Payment Connectivity (RPC)	Perjanjian kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan yang disepakati oleh Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand.
Regulatory Reform	Proses perubahan, penyempurnaan, atau penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas kebijakan dalam suatu sektor atau industri.
Repurchase Agreement (Repo)	Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.
Rupiah Digital	Bentuk digital mata uang Rupiah.
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	Surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.
Sovereign Credit Rating	Peringkat utang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. *Sovereign Credit Rating* mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.
Spot	Transaksi valas dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari.
Strategic Foresight	Pendekatan sistematis dalam mengantisipasi tren, tantangan, dan peluang di masa depan guna membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dan adaptif terhadap perubahan.
Stress test	Uji ketahanan.
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah.
Super Apps	Aplikasi yang menggabungkan berbagai layanan dan fungsi dalam satu platform, memungkinkan pengguna untuk melakukan banyak aktivitas tanpa perlu berpindah aplikasi.
Supervisory Technology (Suptech)	Penggunaan teknologi inovatif oleh lembaga pengawas untuk mendukung implementasi fungsi pengawasan.

ISTILAH	PENJELASAN
Surat Berharga Negara	Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Surat Utang Negara	Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
Swap	Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (*mitra kerja*) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
Transformasi kelembagaan	Transformasi yang mencakup penguatan organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digitalisasi.
Triple Intervention	Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar *spot*, penyediaan likuiditas valas terkait instrumen lindung nilai melalui DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kecukupan likuiditas Rupiah.
Uang Elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu.
Uang Layak Edar	Uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Volatile Food	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
Wajar Tanpa Pengecualian	Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Waste to Energy	Proses mengubah limbah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan, seperti listrik, panas, atau bahan bakar.
White Paper	Laporan atau panduan yang ditulis secara mendalam untuk menginformasikan secara ringkas tentang suatu permasalahan dan solusinya.
Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger	Sistem pencatatan digital berbasis ledger untuk transaksi Rupiah Digital dalam skala wholesale.
Yield	Imbal hasil.

DAFTAR SINGKATAN

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, Interkoneksi, Interoperabilitas
3S	Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi
3T	Terdepan, Terluar, dan Terpencil
3P + 1I	*Product*, *Pricing*, Pelaku dan Infrastruktur
4P	Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, Pemeliharaan
AB3	Aku Bangga BI Bermakna
ACC-BIS	The Council dari Asian Consultative Council – Bank for International Settlement
ACCD	*Appointed Cross Currency Dealers*
AI	Artificial Intelligence
AIU	Analisis Indikator Utama
AL	Alat Likuid
AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
APUVINDO	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia
APU PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATL	*Above The Line*
ATM	*Automated Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri
ATM/D	*Automated Teller Machine/Deposit.*
B2B	*Business-to-Business*
BTL	*Below The Line*
BBWI	Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja
BIDIC	Bank Indonesia-Digital Innovation Center

ISTILAH	PENJELASAN
BI-ETP	Bank Indonesia – *Electronic Trading Platform*
BI-FAST	Bank Indonesia – *Fast Payment*
BI-RTGS	Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement*
BIS	Bank for International Settlements
BKBI	Bauran Kebijakan Bank Indonesia
BKK	Bauran Kebijakan Kelembagaan
BNM	Bank Negara Malaysia
BoP	*Balance of Payments*
BoT	Bank of Thailand
BOTASUPAL	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
BP2MI	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPPU	*Blueprint* Pengembangan Pasar Uang
BPR	Business Process Reengineering
BSBI	Badan Supervisi Bank Indonesia
BSP	Bangko Sentral ng Pilipina
BSPI	*Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
CAR	*Capital Adequacy Ratio*
CBDC	*Central Bank Digital Currency*
CBUAE	Bank Sentral Uni Emirat Arab
CCBO	*Certified Central Banking Officer*
CCP	*Central Counterparty*
CCyB	*Countercyclical Capital Buffer*

ISTILAH	PENJELASAN
CERDAS PeKA	Cakrawala Edukasi dan Ruang Diskusi Aman untuk Semua Konsumen Indonesia Peduli, Kenali, Adukan
CM	*Corrective Maintenance*
CP	*Consultative Paper*
CPMI	*Committee on Payments and Market Infrastructures*
CPMI-IOSCO	*Committee on Payments and Market Infrastructures–International Organization of Securities Commissions*
CSM	*Cyber Security Maturity*
dBPR	Digital *Business Process Reengineering*
DC	Data Center
DDM	*Digital Decision Making*
DHNP	Dokumen Hukum Non-Peraturan
DMP	*Decision Making Process*
DNDF	*Domestic Non-Deliverable Forward*
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPSP	Destinasi Pariwisata Super Prioritas
DSRS	*Dynamic Systemic Risk Surveillance*
DU	Dealer Utama
DWP	Digital Workplace Platform
EKD	Ekonomi Keuangan Digital
EMEAP	Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks
EPML	Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan
ERB	Ekspedisi Rupiah Berdaulat
ETP	*Electronic Trading Platform*
ETP	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah

ISTILAH	PENJELASAN
ETPD	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
EVP	*Employee Value Proposition*
FAQ	*Frequently Asked Question*
FATF	Financial Action Task Force
FDS	*fraud detection system*
FEB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
FEKDI	Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia
FFR	*Fed Funds Rate*
FGD	*Focus Group Discussion*
FKDOP	Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan
FK-PPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
FSAP	*Financial Sector Assessment Program*
FSI	*Financial Soundness Indicators*
G20	Group of Twenty
GBBI	Gerakan Bangga Buatan Indonesia
GEBER PK	Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen
GFS-LRA	*Government Finance Statistics* – Laporan Realisasi Anggaran
GIRU	*Global Investor Relation Unit*
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
GPIPS	Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera
GWM	Giro Wajib Minimum
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
IDCB	*Integrated Digital Central Bank*
IIP	International Investment Position

ISTILAH	PENJELASAN
IKKAT	Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi
IKN	Ibu Kota Nusantara
IKNB	Institusi Keuangan Non-Bank
IKRA	Industri Kreatif Syariah
IKU	Indikator Kinerja Utama
IMF	International Monetary Fund
IN2MOTION Fest	Indonesia International Modest Fashion Festival
IPK	Infrastruktur Pasar Keuangan
IndONIA	Indonesia Overnight *Index Average*
INDRA	*Integrated Analytic Data Repository and Analytic*
INFRATANI	Integrated Farming with Information Technology and Society
IRFCL	*International Reserves and Foreign Currency Liquidity*
IRU	*Investor Relation Unit*
IHT	*In House Training*
ISDA	*International Swaps and Derivatives Association*
ISEF	*Indonesia Sharia Economic Festival*
ISO	International Organization of Standardization
ITSK	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (inovasi teknologi sistem keuangan)
ITSM	*Information Technology Service Management*
JISDOR	Jakarta Interbank Spot Dollar Rate
JKD	Jaringan Komunikasi Data
KAD	Kerja Sama Antar Daerah
KEKDA	Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
K/L	Kementerian/Lembaga

ISTILAH	PENJELASAN
KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
KIBD	Kebijakan Inovasi Bisnis Digital
KIKA	Komunitas Inovasi Kecerdasan Artifisial
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KKI	Kartu Kredit Indonesia
KKI	Kerja Sama Keuangan Internasional
KKKM	Kerangka Kerja Kebijakan Moneter
KKMP	Kerangka Kerja Kebijakan Makroprudensial
KK PUVA Syariah	Kelompok Kerja PUVA Syariah
KKS	Ketahanan dan Keamanan Siber
KKSP	Kerangka Kerja Sistem Pembayaran
KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KLOI	Kementerian/Lembaga, Otoritas, dan Industri
KMIR	Kewajiban Menjaga Informasi Rahasia
KOL	*Key Opinion Leaders*
KOPERBI	Komplek Perkantoran Bank Indonesia
KPP	Kelompok Pegawai Potensial
KPwDN	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
KPwLN	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri
KSK	Kajian Stabilitas Keuangan
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUPVA BB	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LBUT	Laporan Bank Umum Terintegrasi
LCT	*Local Currency Transaction*

ISTILAH	PENJELASAN
LGA	Listrik-Gas-Air
LIP	Layanan Informasi Publik
LKTBI	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LLD	Laporan Lalu Lintas Devisa
LMS	*Learning Management System*
LNPRT	Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LRUK	Limbah Racik Uang Kertas
LSB	Lembaga Selain Bank
LU	Lapangan Usaha
MAS	Monetary Authority of Singapore
MBG	Makanan Bergizi Gratis
MCoC	*Market Code of Conduct*
MDR	*Merchant Discount Rate*
ME FATF	*Mutual Evaluation by the Financial Action Task Force*
MKTBI	Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia
ML	*Machine Learning*
MoU	*Memorandum of Understanding*
MuBI	Museum Bank Indonesia
MRBI	Manajemen Risiko Bank Indonesia
NCCD	*Non Centrally Cleared Derivative*
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	*Non Performing Loan*
NWGBR	*National Working Group on Benchmark Reform*
UMI	Usaha Mikro
UMi	Ultramikro

ISTILAH	PENJELASAN
OECD	*Organization for Economic Co-operation and Development*
OG	*Operational Guidelines*
OIS	*Overnight Index Swap*
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OM	Operasi Moneter
P2DD	Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
P2SK	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PCPM	Pendidikan Calon Pegawai Muda
PDB	Produk Domestik Bruto
PDG	Peraturan Dewan Gubernur
PDN	Posisi Devisa Neto
PIHPS	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
Pemda	Pemerintah Daerah
Perpres	Peraturan Presiden
PERURI	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
Pesantara	Koperasi Digital Pesantren Nusantara
PFMI	*Principles for Financial Market Infrastructures*
PIDI	Pusat Inovasi Digital Indonesia
PII	Posisi Investasi Internasional
PINISI	Percepatan Intermediasi Indonesia
PIP	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran
PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial

ISTILAH	PENJELASAN
PM	*Preventive Maintenance*
PMA	*Procurement Maturity Assessment*
PMK	Program Meningkatkan Kompetensi
PMK	Protokol Manajemen Krisis
PN	*Policy Notes*
PPSPM	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
PoC	*Proof of Concept*
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSP	Penyelenggara Sistem Pembayaran
PUAB	Pasar Uang Antarbank
PUKA BB	Penukaran Uang Kertas Asing Bukan Bank
PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
PUVA	Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
PQN	Pekan QRIS Nasional
PTB	Program Tugas Belajar
QRIS	*Quick Response Code Indonesian Standard*
QRIS TUNTAS	QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai
RDG	Rapat Dewan Gubernur
Repo	*Repurchase Agreement*
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIRU	*Regional Investor Relation Unit*
RPC	*Regional Payment Connectivity*
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPLN	Rasio Pendanaan Luar Negeri
RPTI	Rencana Pemulihan Teknologi Informasi
RRH	Rata-Rata Harian
SAL	Saldo Anggaran Lebih
SBC	*Structured Bilateral Cooperation*
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit

ISTILAH	PENJELASAN
SBK Syariah	Surat Berharga Komersial Syariah
SBN	Surat Berharga Negara
SBV	State Bank of Vietnam
SDM	Sumber Daya Manusia
SDMx	Statistical Data and Metadata eXchange
SERAMBI	Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri
SESPIBI	Sekolah Pimpinan Tinggi Bank Indonesia
ShEFO	Sharia Economic and Financial Outlook
SIAPIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
SiPA	Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
SI-PUR	Sistem Informasi Pengelolaan Uang Rupiah
Simkrisnas	Simulasi Krisis Nasional
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SNAP	Standar Nasional *Open API*
SPBI	Sistem Pembayaran Bank Indonesia
SPH	Survei Pemantauan Harga
SPIP	Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia
SPPG	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
SP-PUR	Sistem Pembayaran-Pengelolaan Uang Rupiah
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SSKI	Statistik Sistem Keuangan Indonesia
STP	*Straight-Through Processing*
SULNI	Statistik Utang Luar Negeri Indonesia
SupTech	*Supervisory Technology*

ISTILAH	PENJELASAN
SUVBI	Sukuk Valas Bank Indonesia
SVBI	Sekuritas Valas Bank Indonesia
TIKMI	Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi
ToT	*Training of Trainer*
TKUT	Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UE	Uang Elektronik
UGM	Universitas Gajah Mada
UI	Universitas Indonesia
ULE	Uang Layak Edar
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah

ISTILAH	PENJELASAN
UPB	Uang Pecahan Besar
UPK	Uang Pecahan Kecil
UU	Undang-Undang
UU P2SK	Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UYD	Uang Kartal Yang Diedarkan
Valas	Valuta Asing
VITAL	*Visualizing the outcomes*, *Theory understood*, *Algorithm fitted*, dan *Learn the meaning*
VF	*Volatile Food*
WB	World Bank
WTE	*Waste to Energy*
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
yoy	*Year on Year*

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350
www.bi.go.id